



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT SEMENTARA
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN**

**SEKRETARIS JENDERAL, INSPEKTORAT JENDERAL,
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SDM PERTANIAN, SERTA
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 1 Juli 2020
Waktu	: 10.30 s.d. 17.05 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: 1. Target nasional yang akan dicapai TA 2021; 2. Rencana program/kegiatan TA 2021 (volume/ha/unit/per kegiatan) dan output-dampak produksinya; 3. Rencana kebutuhan biaya per kegiatan TA 2021; 4. <i>Progress report</i> kegiatan penanganan COVID-19; 5. Isu-isu aktual; dan 6. Lain-lain.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 46 orang dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

11 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, S.E., (Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
3. Ir. Effendi Sianipar
4. Ono Surono, S.T.,
5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
6. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
7. Drs. I Made Urip, M.Si.
8. H. Yadi Srimulyadi
9. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
10. Maria Lestari, S.Pd.
11. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

6 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Budhy Setiawan
4. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
5. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
6. Alien Mus, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 8 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil ketua Komisi IV DPR RI)
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Renny Astuti, S.H., S.P.N.
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

4 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. Drs. H. Ibnu Multazam

3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
4. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
5. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Muslim, S.H.I., M.M.
4. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maosul S.Sy.
2. Ema Umiyyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
3. Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
5. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
6. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian); dan

7. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, M.S., DAA.
(Plt. Inspektur Jenderal Kementerian
Pertanian.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Sekretaris Jenderal, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Perkebunan, Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Badan Ketahanan Pangan serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian beserta jajarannya,

Hadirin yang kami hormati.

Mengawali Rapat hari ini pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal rapat Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Bamus pada tanggal 30 April 2020 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 17 Juni 2020 pada hari ini tanggal 1 Juli 2020, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Perkebunan, Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Badan Ketahanan Pangan serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dalam rangka membahas target nasional yang akan dicapai tahun anggaran 2021. Yang akan kita bahas bukan masalah uang tapi targetnya apa, programnya apa, pencapaiannya apa. Saya tidak mau bicara uang dulu, karena setelah programnya jelas baru kita alokasikan anggarannya. Dan output dampak produksinya, rencana kebutuhan biaya per kegiatan tahun anggaran 2021, progress report kegiatan penanganan COVID-19 dan isu-isu Aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Rapat Dengar Pendapat hari ini buka dan dinyatakan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pukul 10.30 WIB mohon maaf agak terlambat tadi saya terima tamu di atas. Dan akan diakhiri pada pukul

16.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 245 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI atau atas kesepakatan bersama. Dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Eselon I Kementerian Pertanian;
5. Kesimpulan Rapat,
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Hari ini adalah hari kedua rangkaian pembahasan program utama dan kegiatan prioritas Kementerian Pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin bahwa anggaran Kementerian/Lembaga pasti akan dipengaruhi oleh situasi perekonomian dunia. Sehingga melalui Eselon I masing-masing, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar merancang dengan seksama program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama program dan kegiatan yang terkait dengan produksi yang merupakan tugas utama dari Kementerian Pertanian.

Terdapat 4 Eselon I teknis Kementerian Pertanian yang menangani komoditas secara langsung, yaitu Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Perkebunan. Sehubungan dengan hal itu, tanpa mengurangi eksistensi Eselon yang lain keempat Direktorat Jenderal tersebut, seyogyanya mendapat dukungan penuh dari Eselon I lainnya. Lebih lanjut badan yang ada di Kementerian Pertanian berfungsi sebagai unit kerja penunjang untuk keberhasilan produksi yang merupakan Tupoksi utama Kementerian Pertanian.

Berdasarkan pola pikir tersebut di atas, maka justifikasi perencanaan program utama, *output* serta sasaran yang akan dicapai dilingkup Kementerian Pertanian harus menunjang program utama Direktorat Jenderal Komoditas. Yang saya maksudkan tadi 4 Direktorat Jenderal tadi. Marilah kita lakukan sesuatu yang diluar kebiasaan kita selama ini, kita mulai perencanaan anggaran tahun 2021 dengan menentukan terlebih dahulu program utama, tujuan, sasaran yang dicapai berdasarakan skala prioritas serta berapa volume yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama Kementerian Pertanian. Setelah itu baru kita merencanakan anggaran yang diperlukan akan dituangkan sebagai pagu indikatif tahun 2021.

Saya tidak mau seperti kemarin, kemarin itu ada Eselon I yang meng-*copy paste* program 2019 *copy paste* 2020, 2020 *copy paste* 2021, sehingga lupa di-*delete* atau ada yang tidak diganti. Alasannya klasik salah ketik, ya kalau bicara salah-salah ya mau jadi apa negara kita seperti ini. Begitu Bapak Johan, saya tidak mau ada *copy paste*, program benar-benar dipikirkan, ini programnya, pencapaiannya, tujuan akhirnya ini, sampai kesini. Saya tidak

mau ada suatu program pencapaiannya setinggi langit tetapi hasilnya cuman sekaki bukit, saya tidak mau terjadi itu.

Komisi IV DPR RI mengingatkan kembali agar masing-masing Eselon I untuk memperhatikan isu-isu yang terkini, berkembang di masyarakat khususnya yang terkait dengan Tupoksi utama saudara-saudara Dirjen. Badan Litbang misalnya betapa sering kita mendengar suara sumbang, karena hasil penelitian dilakukan oleh peneliti kita tidak dapat diaplikasikan di tingkat lapangan oleh pengguna utama pembangunan pertanian, yaitu para petani. Padahal anggaran institusi ini sangat besar, bahkan melebihi anggaran Direktorat Jenderal Komoditas yang menjalankan tugas utamanya untuk kegiatan produksi.

Jadi kemarin dalam Rapat Kerja dengan Eselon I, baik itu TP maupun ... menanyakan kok beli bibit jagung, benih padinya banyak sekali di luar. Terus apa kerjanya Litbang, apa yang dihasilkan? Kalau sudah ada Litbang kenapa tidak diproduksi yang banyak dibagikan kepada rakyat. Kemarin teman-teman banyak yang bertanya begitu, maka saya bilang hari ini saja tanyakan.

Demikian juga dengan Badan SDM yang sering kita berpikir bahwa tugas utamanya adalah mempersiapkan sumber daya manusia pertanian menjadi petani handal. Namun, kita sering lupa bahwa para petani kita juga harus handal, pelatihan-pelatihan itu dilaksanakan oleh Badan SDM jangan hanya dinikmati oleh pegawainya saja, tetapi juga dapat dinikmati oleh para petani ini. Jadi kemarin Eselon I SDM saya mengusulkan membuka wawasan untuk Poktan, Gapoktan penerima alat mesin pertanian wajib memiliki mesin pencuci alatnya atau kalau kita bilang steam cleaner itu harganya hanya Rp500 ribu sampai Rp600 ribu. kenapa begitu? Karena selama ini petani umumnya habis pakai taruh dululah, besok saja, besok lupa hujan nanti besoknya lagi. Karena apa? Kalau mencuci dengan manual itu bisa makan waktu 2 jam, dalam-dalamnya belum tentu bersih tetapi kalau dengan alat Rp500 ribu sampai Rp600 ribu itu begitu pulang cuman butuh 15 menit sudah bersih besok bisa digunakan lagi, tidak perlu pakai besok lusa. Jadi inilah salah satu tugasnya SDM.

Para rapat hari ini kita bersama-sama melihat serta merencanakan program dan kegiatan utama di Kementerian Pertanian. Bagaimana keterkaitan Eselon I dengan yang lainnya sehingga diperoleh program terpadu yang berujung pada tujuan yang sama. Kemarin antara Dirjen Hortikultura sama Kepala Badan Karantina tidak nyambung, ditanya Undang-Undangnya tidak tahu, sanksinya apa tidak tahu, *Alhamdulillah* orang tersebut bisa jadi Eselon I.

Selain itu, kami juga mengingatkan kembali agar komoditas yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat harus tercukupi, baik dari sisi jumlah maupun kontinuitas. Mari kita rumuskan bersama kebutuhan program dan kegiatan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan, antara lain daging dan gula kristal putih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat kita setiap hari. Setiap tahun Kementerian Pertanian merencanakan

swasembada. Jadi 2009 saya duduk di Komisi IV DPR RI itu kata-kata swasembada sudah ada, tapi *Alhamdulillah* cuman hanya kata-katanya saja swasembada. Ganti menteri tetap juga swasembada tetapi impor masih jalan terus bahkan bertambah banyak.

Saudara-saudara berpikir dengan satu prinsip yang sama. Saya ini boleh diomong sama orang dikatakan saya galak, iya. Tujuan saya apa? Kalau Bapak-bapak ini semua sukses saya, kami semua punya kebanggaan, karena kami kerja sama yang baik, saling mengingatkan, maka Bapak-bapak sukses. Kami cuman dapat kebanggaan bahwa sebagai wakil rakyat ada gunanya. Marilah kita berpikir satu prinsip mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan yang kemudian diterjemahkan dalam program dan kegiatan utama serta didukung dengan penguatan anggaran yang tepat.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sebelum kami mengakhiri pengantar ini, kami menggarisbawahi kembali terhadap program dan kegiatan utama yang sudah mendapatkan perhatian. Saya tegaskan kembali mendapat perhatian dan temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia agar sungguh-sungguh dicermati. Dan dipertimbangkan untuk tidak dilaksanakan kembali. Komisi IV DPR RI berharap, Inspektorat Jenderal beserta jajarannya dapat mencermati hal tersebut di atas dengan memberikan saran serta rekomendasi yang konstruktif kepada semua instansi di lingkup Kementerian Pertanian. Karena kalau Irjenya ke Lampung atau pemeriksaannya ke daerah sampai daerah nanti dijemput mobil, dibayarin hotel, dikasih oleh-oleh ya sudah *wassalam*, *Insha Allah* kalau dikasih uang saku langsung pulang.

Maka saya selaku Anggota, selaku Kapoksi sekarang jadi Pimpinan, saya berharap dana yang cukup anggaran untuk Inspektorat Jenderal, begitu juga di Kementerian Kelautan, Kementerian Kehutanan saya minta anggaran Inspektorat jangan sampai ke daerah mobil saja dijemput oleh yang mau diperiksa. Ya Pak Irjen ya, jangan hanya jempol saja.

Demikian pengantar kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Eselon I Kementerian Pertanian untuk menyampaikan penjelasan pemaparannya terkait hal-hal tersebut di atas.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, M.S.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Kom IV DPR RI, baik yang ada disini maupun yang mengikuti secara virtual, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan lanjutan Rapat Dengar Pendapat dalam keadaan sehat wal'afiat. Bapak Ketua, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas undangan Rapat Dengar Pendapat hari kedua ini, dengan Agenda Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 yang fokus kepada target nasional yang akan dicapai tahun 2021, Rencana Program dan Kegiatan dan Output Dampak Produksinya, Rencana Kebutuhan Biaya Per Kegiatan, kemudian Progress Report Kegiatan Penanganan COVID-19, serta isu-isu aktual.

Untuk mempersingkat waktu ijinakan Dirjen Perkebunan untuk bisa menyampaikan paparannya. Saya persilakan Bapak Dirjen.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DIRJEN PERKEBUNAN (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Terima kasih Bapak Sekjen.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi IV DPR RI, Wakil Ketua dan para Anggota baik yang ada diruangan ini maupun yang vidcon.

Pertama-tama tentu kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini untuk menyampaikan program kegiatan kami di Direktorat Jenderal Perkebunan tahun anggaran 2021.

Bapak Ketua dan Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati.

Fokus utama kegiatan kami diperkebunan kami akan fokus untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen kami untuk membangun logistik benih itu menjadi kegiatan yang utama yang pertama. Kemudian peningkatkan produksi, produktifitas nilai tambah dan daya saing, kemudian juga memoderinisasi perkebunan, optimasi jejaring *stake holder* dan juga peningkatan kapasitas SDM Kelembagaan utamanya pada pekebun kita yang ada di lapangan.

Bapak dan Ibu sekalian.

Adapun target yang ingin kami capai ditahun 2021 ada beberapa yang sudah masuk di prioritas nasional dan ada yang prioritas bidang. Prioritas nasional diantaranya adalah kelapa sawit, kopi, kakao, tebu, cengkeh, lada dan pala. Dengan target sebagai berikut, kepala sawit kita menargetkan di

2021 52,12 juta ton dan kopi 834,75 ribu ton dan kakao 682,66 ribu ton, dan kelapa 2,7 atau 2,8 juta ton dan karet 3,5 juta ton dan tebu 34 juta dan jambu mete 149 ribu ton, cengkeh 140 ribu ton, lada 102 ribu ton, pala 42,9 ribu ton, vanili cukup rendah Bapak dan Ibu para Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI sebesar 1,58 ribu ton dan teh 150 ribu ton, sagu 483 ribu ton dan nilam 535 ribu ton.

Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, saya potong sedikit anda jangan hanya memaparkan target produksi 2021 tetapi dengan target itu apakah petani bisa makan. Contoh, karet di tempat kamu berapa Kiki berapa harganya karet? Nah, bagaimana sadap saja lebih dari Rp3000,00 kemudian kopi, kopi saat ini harga di Lampung kurang lebih Rp17.000,00 jadi produksinya juga kita pikirkan bagaimana penyerapannya. Pandu mereka ekspornya bagaimana kalau ekspor. Ini yang lebih penting juga Pak, jangan hanya target produksi, uangnya sekian tetapi petaninya tetap miskin. Kita coba lihat misalnya karet, kemudian kopi, kakao, kemudian cengkeh inikan cengkeh regulasinya setahu saya tidak ada ya. Ada tidak regulasi cengkeh?

DIRJEN PERKEBUNAN:

Masuk di rokok itu regulasinya Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak, maksudnya impor sekarang hampir sebagian besar ini.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Tidak ada Pak.

KETUA RAPAT:

Seperti Bapak Hasan ngerokok ini, cengkehnya ini impor ini yang dari lokal cuman berapa persen selebihnya impor. Nah, ini harus diatur juga regulasinya, tujuannya apa? Untuk melindungi tadi petani Pak.

Lanjutkan.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Nanti di beberapa slide akan kami jelaskan bagaimana kami nanti fokus juga di peningkatan nilai tambah seperti di awal kami sebutkan tadi Bapak Ketua. Jadi di samping produksi produktifitas ada peningkatan nilai tambah dan daya saing untuk bisa memberikan peluang bagi peningkatan

harga yang sekarang lagi terpuruk seperti tadi disebutkan Bapak Ketua karet, kopi dan sebagainya.

Baik, kami lanjutkan sepintas saja Bapak Ketua. utamanya di slide nomor 5 saya ingin sampaikan bahwa pagu anggaran yang 1,19 itu fokus kami untuk membangun logistic benih tentu didukung juga dengan proporsi yang sudah kami desain di 37% Bapak dan Ibu para Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota. Kemudian peningkatan produksi 28%, nilai tambah dan daya saing 13% senilai Rp152 miliar, kemudian juga ada modernisasi perkebunan serta peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan perkebunan.

Berkait dengan logistik benih slide nomor 6 kami mohon, kami ingin melaporkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Kenapa kami konsen? Karena posisi saat ini antara pengadaan dan lokasi pengembangan kawasan sangat jauh, oleh karena itu, itu tidak efisien. Yang ada panah bergerak-bergerak ini maksudnya seperti misalnya sawit sebagian besar membeli Sumatera Utara di kembangkan di seluruh Indonesia. Kopi, kakao dari Jawa Timur di kembangkan di seluruh Indonesia. Ini yang membuat inefisien karena ada transport, kemudian juga belum lagi resiko benihnya mati pada saat sampe di tempat. Oleh karena itu, kita rubah untuk membangun nursery dan kebun sumber benih di setiap lokasi atau di sekitar kawasan pengembangan komoditas tersebut. Itu yang nanti akan menjadi upaya kami untuk meningkatkan penyediaan benih.

Yang kedua adalah tentu kita memilih Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian, tadi disinggung juga arahan Bapak Ketua untuk bisa link dengan Eselon I lain. Dalam konteks benih ini kami laporkan benih sumbernya berasal dari Litbang atau sumber lain dari lembaga penelitian lain memungkinkan dengan produktifitas yang lebih tinggi untuk di kembangkan di center yang berwujud nursery dan pembangunan kebun sumber benih. Itu yang berkaitan dengan perbenihan.

Kemudian yang terkait dengan pengembangan kawasan. Jadi perbenihan setelah ditaruh di setiap kawasan harapannya adalah petani akan mudah untuk mendapatkan benih karena lokasinya berdekatan. Oleh karena itu, seperti apa yang disarankan oleh Bapak Ketua bahwa membangun seat center yang Bahasa kami adalah membangun kebun sumber benih dan nursery itu sudah kami taruh di setiap kawasan.

Untuk kopi kami mengalokasikan 8.930 hektar untuk pengembangan kawasannya. Kakao 6.800, karet 3.100, kelapa 7.180 dan sebagainya dengan total komoditas yang kami kembangkan 74.720 hektar. Ini tentunya Pak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian, tadi mengarahkan bahwa hulu sampai hilir kita dekati dengan wadah kawasan ini, baik itu peningkatan produksi maupun peningkatan nilai tambah, seperti misalnya tadi disinggung karet misalnya Bapak Ketua nanti kami akan meningkatkan unit pengolahan dan pemasaran Bokar itu pada kelembagaan atau unit-unit itu kualitasnya karet kita tingkatkan yang semula biasanya seharga 3.000 sampai 6.000 bisa dibeli dengan harga 7.000 sampai 8.000. Ini yang nanti kami gunakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Nah, terkait dengan rincian output, target output kami dalam bentuk volume. Nah, ini sudah kami bagi meskipun nanti bisa ada satu pergeseran karena tadi ada beberapa arahan dari Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian, nantinya untuk bisa mengalokasikan proporsional daripada jumlah batang daripada benihnya. Jadi logistik benih ini totalnya 57 juta batang yang akan kita kembangkan dengan berbagai komoditas sebagaimana terinci dibawahnya.

Kemudian pengembangan kawasan juga demikian ada 73.720 hektar dengan rincian di masing-masing kawasan berbasis komoditas yang sudah kami tetapkan, kopi, kakao, karet dan sebagainya seperti pada table. Dan juga beberapa kegiatan di point 3 pasca panen dan pengolahan atau hilirisasi serta pemasaran kami mengalokasikan 348 unit itu adalah yang tadi salah satunya kami sebut sebagai unit-unit pengolahan atau peningkatan kualitas daripada produk perkebunan.

Kemudian juga menindaklanjuti apa yang sudah menjadi diskusi sebelumnya, terkait dengan OPT maupun kebakaran lahan dan kebun kami juga mengalokasikan untuk konsentrasi di 3.900 hektar untuk mengatasi ini tentu juga didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang sudah terlembaga Bapak Ketua, kami laporkan bahwa hingga saat ini sekitar 1.200 ada kasus kebakaran kebun dan lahan dan itu kami upayakan untuk menggerakkan lembaga yang sudah ada Kelompok Tani Peduli Api dan juga yang berkait dengan upaya-upaya preventif untuk juga merubah manajemen daripada perkebunan kita sehingga kebunnya terjaga dari kebakaran.

Kemudian untuk pengembangan desa pertanian organik 69 desa Bapak dan Ibu sekalian, dan juga proteksi tanaman perkebunan ada beberapa yang berkaitan di balai-balai besar kami untuk bisa melayani di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Wilayah Timur Indonesia. Itu beberapa yang terkait dengan target output.

Kemudian kegiatan utama serta program-program kami, ijin kami melaporkan di progress 2020 ini Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut di slide nomor 11, realisasi kami 22,67 per 27 hari ini kami cek sudah 24% lebih dengan masih ada *outstanding contract* yang memungkinkan untuk meningkatkan realisasi 36%.

Yang berkaitan dengan COVID, penanganan COVID-19 ada 3 kegiatan utama di kami, itu adalah untuk pembelian bahan pangan, obat-obatan, peralatan medis yang sudah kami realisasikan 100%. Kemudian yang ingin kami kejar sekarang padat kaya baru kami realisasikan 10% ini yang akan kami kejar. Kemudian juga yang berkaitan dengan perkarangan karena ini instrumennya adalah di perkarangan kami introduksi dengan kelapa genjah di perkarangan juga kegiatan yang masih kecil segera kami percepat untuk bisa realisasi lebih tinggi lagi.

Kemudian berkaitan dengan isu aktual Bapak Ketua, tadi juga disinggung berkaitan dengan kopi dan gula. Coba di slide nomor 14 dulu, meskipun belum mencapai daripada HET Rp12.500 untuk harga gula ini, ada

trend penurunan dari 4 Mei ke 26 Juni Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian, sebesar 15,8% dari Rp18.000 menjadi Rp15.000 memang harganya ini. Nah, tetapi perlu kami laporkan juga bahwa sudah ada perkembangan di Juni ini akan terjadi puncak giling yang produksinya kita perkirakan 430 sampai 530 ribu ton. Kemudian di Agustus masih meningkat sekitar 540 ribu ton dan juga nanti akan menurun di September dan seterusnya itu yang akan nanti menutup gula konsumsi kita.

Yang berkaitan dengan distribusi gula untuk dalam negeri yang belum maksimal ada beberapa ini juga akan mempengaruhi harga memang sepenuhnya bukan ada di kami, tapi kami ikut mendukung di beberapa kegiatan yang sinergi dengan Badan Ketahanan Pangan di dalam kerangka untuk meningkatkan harga ini melalui operasi pasar.

Kemudian yang berkaitan dengan kopi Bapak dan Ibu sekalian, mohon juga nanti arahan Bapak dan Ibu sekalian. Khususnya yang berkaitan dengan harga kopi dalam bentuk kopi cerry itu masih sangat rendah, ini yang kami tampilkan di sini adalah harga green bean-nya itu juga ada penurunan dari 28 menjadi 27. Upaya-upaya sudah kami lakukan Bapak Ketua, diantaranya adalah nanti akan kami tingkatkan di kegiatan peningkatan nilai tambah dan daya saing itu untuk meningkatkan kualitas kopi selain daripada karet tadi dengan bantuan-bantuan alat pasca panen kami. Kemudian juga demikian untuk alat pengolahan, juga akan kami tingkatkan untuk bisa memberikan bantuan kepada para petani kita.

Nah, yang penting adalah penyerapan hasil kopi ini dan kami sudah bekerja sama melalui vidcon untuk beberapa, karena memang ada kesulitan juga bagi eksportir karena diluar negeri ada *lockdown* sehingga gudang mereka relative masih penuh. Ini yang akan bermasalah, kami sudah menghubungi juga Bapepti untuk bisa memanfaatkan gudangnya untuk bisa dimanfaatkan menyerap ini dan kami merancang dengan system resi gudang yang bisa menolong diserap dulu dengan harga yang tidak merugikan petani dan kita mencari pihak ketiganya untuk bisa menyerap ini sehingga nanti petani tertolong dengan peningkatan harga ini.

Ini saya kira Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait tahun anggaran 2021. Mohon maaf.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sebentar saudara Dirjen, saya mau tanya salah satu peraturan atau Undang-Undang yang mengatakan kalau badan usaha ingin membangun pabrik gula wajin punya kebun tidak?

DIRJEN PERKEBUNAN:

Wajib Pak, minimal 20%.

KETUA RAPAT:

Minimal 20%?

DIRJEN PERKEBUNAN:

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Bapak pernah ke Lampung, ada tidak yang punya pabrik tidak punya kebun ada?

DIRJEN PERKEBUNAN:

Kami laporkan Bapak Ketua, dari sekian banyak perusahaan terus terang recording kami hanya 30% yang taat kepada Undang-Undang.

KETUA RAPAT:

Ya sudah kasih sanksi saja, jangan pengusaha itu berharap rafinasi untungnya besar sekali, tetapi memikirkan petani kecil. Kalau melanggar Undang-Undang sikat, saya yang dukung.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Iya Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Karena saya perhatikan nampaknya Bapak tidak pernah ada laporan kepada kami perihal pelanggaran-pelanggaran pabrik-pabrik itu. Kalau Gulaku punya pabrik, punya kebun, itu temannya Bapak Salim. Masalah gernas kakao juga dipikirkan ulang, 2010 Menteri Suswono itu gernas kakao 1 tahun 1 triliun lebih, hasilnya juga tidak jelas. Bapak Dirjen, saya mau tanya dalam 2021 ada tidak anggaran untuk *replanting* kelapa sawit dari APBN?

DIRJEN PERKEBUNAN:

Dari APBN tidak ada Bapak, dari BPDP.

KETUA RAPAT:

Kalau ada di APBN berarti Bapak sudah salah besar, sudah tidak cocok dari Dirjen. Karena di BPDPKS itu uangnya hampir 50 triliun yang dipakai untuk *replanting* belum mencapai 2 triliun. Kan masih banyak uang

disana, kenapa tidak digunakan. Tapi seperti yang lalu sudah pernah kita bahas disini tidak perlu berbelit-belit kalau untuk rakyat yang penting tidak ada penyimpangan untuk kepentingan pribadi pejabatnya, itu saya ingatkan ya.

Lanjut.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Saya persilakan Kepala Badan Ketahanan Pangan.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat para Wakil Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir pada pertemuan fisik sekarang maupun yang virtual.

Mohon ijin pertama saya akan sampaikan mengenai program Badan Ketahanan Pangan 2021. Langsung saja slide nomor 5, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Pimpinan yang saya sampaikan bahwa kegiatan Badan Ketahanan Pangan tentunya tidak terlepas dari kita intinya adalah mem-back up apa yang dilakukan Eselon I yang lain.

Ada satu kegiatan utama sebetulnya dimana yang pertama adalah mengenai ketersediaan akses dan konsumsi pangan yang berkualitas, itu fokusnya. Kemudian ada 3 kegiatan disana, kegiatan yang pertama adalah pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Yang kedua adalah pemantapan system distribusi dan stabilisasi harga pangan....

KETUA RAPAT:

Bapak Kepala Badan tunggu, tolong tampilkan tadi.

Ini lagi hot news, anaknya Mbak Kiki bisa tewas karena makan ini. Ini jamur enoki yang kena bakteri literia, tetapi disitu ada dikeluarkannya sertifikat oleh Badan Ketahanan Pangan. Dan ini tadi pagi masih dijual, saya bilang "anda berani menjual?" "oh, saya ada sertifikat ini yang dikeluarkan ini", oleh Badan Ketahanan Pangan. Coba saya minta, karena saya tidak mengerti tolong dijelaskan.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Baik, Bapak Ketua terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tunggu dulu dijelaskan dulu.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Boleh ditampilkan slide nomor 27, kami juga sudah siapkan Bapak Ketua. Slide nomor 27 mengenai pengendalian bakteri listeria dari jamur enoki asal Korea Selatan. Tolong Mas, slide nomor 27. Jadi prinsipnya Bapak Ketua, kami menerima notifikasi dari Infosan, yaitu tanggal 15 April itu kita menerima notifikasi dari Infosan. Infosan adalah *International Food Safety Network*, yang ada kejadian luar biasa di bulan Maret dan April di Amerika Serikat, Kanada, dan Austrasia yang mengkonsumsi jamur enoki asal Korea Selatan. Jadi disini asal Korea Selatan ditekankan oleh Infosan karena kami juga Anggota dari Infosan. Kemudian kami menindaklanjuti melakukan pengambilan contoh Bapak Ketua, pengambilan contoh kami lakukan tanggal 21 April 2020 dan 26 Mei 2020. Dan kita uji di laboratorium yang terakreditasi, yaitu di PT. Saraswati yang memang dia terakreditasi secara internasional. Berdasarkan uji tersebut, ternyata kontaminasi listeria pada jamur enoki melebihi batas ambang, yaitu diperoleh angka 10 pangkat 4.

KETUA RAPAT:

Jadi sudah melebihi batas ambang untuk kesehatan.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Nah, kemudian kami juga cari tahu apa itu listeria, listeria itu adalah satu bakteri yang itu adanya di timbulkan karena media, kemudian karena air dan juga media pembawa. Jadi ini sangat tergantung dari lokasi dimana dia ditumbuhkan. Oleh karena itu, notifikasi yang disampaikan oleh Infosan itu hanya untuk yang dari Korea Selatan dan diproduksi oleh perusahaan disana namanya Green co. Kami juga menanyakan apa sih akibatnya, akibatnya adalah gangguan pencernaan. Tapi ini sangat berbahaya bagi Ibu yang hamil dan manula dan anak-anak.

Oleh karena itu, kami mengambil langkah Bapak Ketua, jadi langkah yang pertama adalah kepada importir yang melakukan, kami minta mereka melakukan pemusnahan dan mereka sudah melakukan pemusnahan. Pemusnahan yang terakhir itu dilaksanakan tanggal 19 Juni 2020. Jadi kami memang pertama menerima notifikasi dan kemudian kami cek, kami minta mereka untuk melakukan pemusnahan, pertama 22 Mei, yang selanjutnya tanggal 19 Juni.

Nah, kemudian sebagai langkah preventif tentu kami memerintahkan semua, kami ini adalah otoritas keamanan pangan pusat Pak, di tiap daerah di Dinas Ketahanan Pangan ada yang namanya otoritas keamanan pangan daerah. Kami perintahkan kepada mereka untuk melakukan pengawasan jamur enoki asal Korea Selatan. Kemudian Kementan juga melalui Badan Karantina akan melakukan peningkatan pengawasan keamanan pangan dari

jamur enoki asal Korea Selatan. Dan selanjutnya *corrective action* pun kami sudah layangkan kepada kedutaan, kedutaan sudah kita sampaikan atas nama Kementerian Pertanian. Dan yang terakhir kami juga menghimbau masyarakat karena kita sudah pelajari karakter listeria ini dia akan mati pada 75 celcius dan direbus selama 5 menit. Jadi bagi masyarakat yang mengkonsumsi kami harapkan ini jangan mengonsumsi mentah sehingga kami di dalam pelabelan ini kami selalu menuliskan disana memang sudah kami dapatkan labelan tetapi tidak boleh dikonsumsi mentah, artinya harus direbus sampai 75 celcius.

Itu yang kami lakukan Bapak Ketua, jadi intinya bahwa kami sebetulnya memberikan *early warning* pak, untuk pencegahan dari ini semua. Dan kami sudah dapat laporan dari masing-masing daerah sampai ke Maluku tadi pagi yang Korea Selatan tidak ada di supermarket. Dan ini perlu kami sampaikan Bapak Ketua, bahwa peredaran jamur enoki ini harus dalam kemasan. Jadi jangan Bapak dan Ibu sekalian, membeli jamur enoki ini dalam bentuk eceran, dalam bentuk kemasan 200 gram dan biasanya sekali masak itu kita selesai. Yang bahaya adalah jamur enoki ini listeria ini bisa mengontaminasi silang, jadi kalau kita simpan di dalam kulkas dalam kondisi terbuka bisa menular ke yang lain yang dikonsumsi secara segar. Nah, ini kami sudah kami infokan kepada masyarakat. Itu Bapak Ketua, sementara yang kami lakukan.

KETUA RAPAT:

Saya mau tanya, apa fungsi Karantina disini?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Pengawasan, jadi mohon maaf Bapak Ketua. Jadi Karantina itu biasanya melakukan pengumpulan di *pre-border* Pak, kemudian setelah di market itu kami yang melakukan pengawasan.

KETUA RAPAT:

Oke, saya paham.

Tadi pagi saya baru tadi pagi saya photonya di *Hypermart* Cibubur Junction dekat rumah saya. Yang kedua, kemarin jawaban saudara Kepala Badan Karantina beda lagi, dalam Permentannya tidak ada jamur itu, listeria itu tidak ada. Jadi kami tidak punya wewenang untuk memeriksanya. Betul Sekjen, betul tidak kemarin ngomong begitu? Nah, jadi virusnya sudah masuk dibilangnya di Permennya tidak ada virus bakteri itu. Masya Allah, dan saya juga tadi Kepala Badan saya agak capek juga kalau tiap hari saya tarik urat leher sini. Tolong kata-kata tadi itu dicabut, belum terjadi KLB, kalau sudah KLB sudah pada mati, jangan ada kata belum KLB jangan, tadikan di bahan tayangan ada belum KLB, janganlah. Sebelum terjadi KLB tarik dulu yang ada, musnahkan. Ya saya paham bisa jadi human eror atau kelalaian manusia, tapi kalau terus menerus lalai-lalai apa jadinya.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kiki mau nanya tidak jadi?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi ya Pimpinan.

Bapak tadi walaupun penjabaran Bapak seperti ini, saya jadi bingung karena tadi ada *certificated* kurang lebih dari Badan Ketahanan Pangan. Sedangkan kemarin Bapak Karantina juga menyampaikan demikian *certificated* ini. Saya jadi bingung jadi acuannya *certificated* yang mana nanti Pak, itu payung hukumnya yang mana. Jadi itu saja sih, saya agak bingung saja, mohon pencerahannya Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Hermanto masalah apa, sama mau makan jamur juga?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Kalau ada jamurnya sekarang kita makan ini.

Bapak Ketua dan Bapak Dirjen.

Pembahasannya sudah dengan Bapak Ketua tadi, cuman saya meminta supaya itu ditarik saja Ketua, kemudian dimusnahkan. Dan sekarang saya tanya ini Bapak Dirjen, Bapak Dirjen sudah mengumumkan ke public atau belum bahwa barang ini berbahaya dan tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini penting karena ini kalau Bapak Dirjen mengatakan menunggu KLB wah ini Bapak Dirjen gegabah sekali saya pikir. Ini kita sama saja membunuh rakyat, mengganggu 267 juta penduduk Indonesia. Anak saya suka dengan jamur ini Pak, ini kalau di makan lagi ya berbahaya.

Demikian Bapak Ketua, saya minta itu dimusnahkan.

KETUA RAPAT:

Jadi mungkin maksudnya Bapak Hermanto sepulang nanti Kepala Badan konferensi pers menjelaskan kepada masyarakat yang seperti Bapak jelaskan di dalam ruangan tadi. Agar supaya apa? Kalau sudah saya

peringatkan dan saya kasih tahu masyarakat masih mau beli ya salahnya kamu. Betul kan?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Siap Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tapi harus diingatkan, baik itu melalui Sosmed, melalui media online, media cetak. Karena apa? Nanti yang salah ya anda Pak. Saya minta tolong nanti supaya penjelasan selesai baru kita bertanya lagi.

Silakan lanjutkan.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Ijin sebentar saya ingin sampaikan beberapa pertanyaan tadi. Bapak Hermanto, kami sudah melakukan pemusnahan dan tanggal 22 Mei dan 9 Juni sudah melakukan pemusnahan seluruh enoki yang berasal dari Green co. Jadi kita sudah melakukan pemusnahan.

Kemudian yang kedua, terkait dengan pers rilis Bapak Ketua, kami sudah melakukan tapi mohon tadi kami juga akan sebentar lagi. Semua media TV kami sudah lakukan, termasuk media online juga kita sudah sampaikan. Itu kemudian kepada Kedutaan Korea kami juga sudah memberikan *corrective action* sampai hari ini semua yang produk Green co sudah ditarik Pak. Jadi itu yang mungkin masih beredar adalah bukan produk Green co.

KETUA RAPAT:

Tetapi ini bahasanya Korea Pak.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Iya, Korea hanya satu produsennya Green co.

KETUA RAPAT:

Ya ini tadi yang saya temukan tulisannya Korea. Alangkah baiknya Bapak tidak perlu debat disini, suruh staf Bapak tengok disana.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Siap Pak.

KETUA RAPAT:

Juga minta tolong sama TV Parlemen, karena TV Parlemen ini menyebarkan ke TV-TV swasta lainnya. Untuk penjelasan lebih detail dan lebih banyak media yang memberitakan itu lebih baik.

Lanjut.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Siap Pak, nanti kami komunikasi dengan TV Parlemen.

Baik, mohon ijin Bapak Ketua kami akan melanjutkan program di Badan Ketahanan Pangan Pertanian. Yang tadi saya sampaikan bahwa intinya kita mendukung program-program di Eselon I yang lain. Untuk tahun 2021 ada 3 program kita, pemantapan penganeekaragaman pangan, kemudian distribusi dan ketersediaan pangan khususnya daerah penanganan rawan pangan Pak.

Oleh karena itu, kami mencoba menyusun program kami 2021, yang pertama adalah pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Karena yang pertama terkait di dalam sub kegiatannya adalah pertanian pangan lestari, perkarangan pangan lestari yang volumenya sasarannya adalah 4.300 titik, 4.300 kelompok tani. Nah, ini tentu meningkatkan dibandingkan tahun sekarang karena ini pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang tentu ditunggu oleh masyarakat saat ini dalam rangka menghadapi COVID-19.

Kemudian pengembangan pangan lokal dalam rangka diversifikasi juga kami lakukan agar kita tidak terlalu tergantung kepada beras. Oleh karena itu, pengembangan diversifikasi ini kita arahkan pada pangan pokok non beras dan tentunya non impor. Kemudian penguatan keamanan dan mutu pangan segar. Nah, ini temuan enoki menjadi koreksi besar bagi kami juga, kami akan menyempurnakan mulai dari Permentan-nya karena sampai dengan hari ini Permentan yang kita gunakan sebagai acuan itu untuk listeria memang sudah kita lakukan pengukurannya tetapi fokus kepada kubis, tomat dan toge, sehingga nanti kita tambahkan disana untuk jamur.

Nah, kemudian untuk pemantapan system distribusi pangan ini juga bagian penting Bapak Ketua, karena menurut kami bahwa pangan itu tidak cukup tersedia secara nasional tetapi harus tersedia di tiap provinsi bahkan bisa di konsumsi masyarakat khususnya masyarakat setempat. Oleh karena itu, kami merasakan bahwa hal ini harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Jadi PUPM ini adalah sebagai supplier kepada TTI, jadi kami membangu Gapoktan-Gapoktan kita namakan PUPM untuk memproduksi pangan yang murah dan berkualitas. Ada 4 komoditas yang selama ini kita garap Bapak Ketua, yaitu beras, kemudian bawang, cabai, dan telur. Nah, ini kemudian kita subsidi mereka, subsidi kita adalah pada operasionalnya bukan kepada produksinya. Sehingga diharapkan dengan begitu harga di produsen yang kita dapatkan langsung dari Gapoktan lebih murah dibandingkan harga dipasaran. Begitu

juga harga di Toko Tani kita saya punya net working begini Bapak Ketua, satu PUPM itu melayani 3 TTI itu maksimum Pak, yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kami mencoba kembangkan terus setiap tahunnya. Tahun ini katakana 850 Gapoktan, tahun depan kita tingkatkan menjadi 1.000 Gapoktan.

Kemudian penguatan cadangan pangan masyarakat desa. Ini yang selama ini kita tinggalkan Bapak Ketua, ini dalam rangka COVID ini apalagi *warning* kekeringan dan sebagainya saya rasa saatnya kita mempunyai ini lagi. Oleh karena itu, kami sudah memulai tahun 2020 tapi sangat kecil, kemudian tahun 2021 *Insha Allah* 800 lokasi atau .. desa. Tapi sebenarnya kami menghitung Pak, 38.700 yang harus punya lumbung karena itu daerah non sentral. Oleh karena itu, kami menco menggandeng dengan Kementerian Desa dengan memanfaatkan BumDes. BumDes ini dalam waktu dekat kami akan coba komunikasikan bagaimana agar BumDes ini berlaku dan berfungsi sebagai lumbung pangan di masyarakat.

Kemudian fasilitasi distribusi, monitoring dan system logistik nasional. Saya sampaikan tadi perdagangan pangan antar pulau antar provinsi ini terus terang Bapak Ketua, sampai hari ini yang menangani institusi nasional yang menangani itu hanya untuk komoditas beras, yaitu Bulog. Tetapi untuk komoditas yang lain bawang, cabai, telur, sebetulnya *auto pilot* Pak. Dan ini oleh karena itu, terasa sekali pada kondisi sekarang ini PSBB ini *auto pilot* itu tidak jalan. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun 2020 kami memulai Bapak Ketua. Kami memulai memindahkan barang dari sentral ke non sentral. Kami kirim misalnya bawang dari Brebes kita kirim sampai ke Maluku, itu kami lakukan Bapak Ketua. Mohon maaf ini, karena memang kami harus melakukan itu karena adanya kekurangan pangan di satu lokasi ya kena marah juga Kementan juga. Memang ini agak sedikit grey area dengan Kementerian Perdagangan, tapi kami lakukan bahkan kami mencoba bekerja sama dengan BUMN contohnya PT Berdikari terkait dengan distribusi telur dan juga dengan PT Pelni kami minta diskon kira-kira begitulah. Termasuk Garuda, karena ada yang kita harus kirim dengan pesawat. Kami pernah mengirim cabai rawit itu dari Wajo ke terakhir itu ke Sumatera Utara dengan pesawat Pak, kami harus lakukan itu karena memang barang itu mudah rusak.

Kemudian yang ketiga adalah pemantapan ketersediaan pangan khususnya dari rentan rawan pangan. Daerah rentan rawan pangan ini Bapak Ketua, kami sampaikan sebetulnya tahun lalu kami ingin kerjakan Bapak Ketua. Tahun lalu itu kita punya sekitar 856 kecamatan yang rentan rawan pangan, bukan rawan pangan, tapi rentan. Rawan dalam arti kalau kita lengah sedikit dia bisa jadi rawan, apalagi dalam masa COVID sekarang ini. Nah, Alhamdulillah kami tidak bisa melaksanakan tahun lalu karena ada pemotongan anggaran yang cukup besar bagi kami tentunya dan kami rencanakan lagi tahun 2021. *Insha Allah* kita bisa kalau ini bisa kita laksanakan di 600 desa.

Kemudian yang lain adalah pemanfaatan stok akses dan kerawanan pangan. Stok kami harus monitor Bapak Ketua, jadi kami tidak bisa percaya

begitu saja dengan laporan Kepala Dinas. Kami terus terang membangun yang namanya *quick count*, *quick count* ketersediaan pangan. Ini kami lakukan sebagai satu alternative, opsi alternative daripada ketersediaan pangan kita. Ternyata ini memang ada perbedaan dengan laporan dinas, dinas aman-aman saja Bapak Ketua, tapi kami mencoba melihat ini dengan memanfaatkan. Kami punya 1000 orang yang akan di seluruh Indonesia kita biayai untuk melakukan *quick count* ini dan laporannya per minggu. Tapi saya summary-kan per bulan kita lakukan, sehingga action kita pemindahan antar pulau, antar provinsi ini kita lakukan. Itu Bapak Ketua, program kita tahun 2021.

Saya mohon ijin menyampaikan kegiatan kita untuk tahun 2020 yang sudah kita laksanakan Bapak Ketua. Mohon ke caption nomor 16, jadi ada 4 kegiatan kita yang tentu terkait sangat erat dengan penanganan COVID-19. Yang pertama adalah perkarangan pangan lestari itu dari total anggaran yang ada realisasi kita Alhamdulillah sampai dengan hari ini sekitar 68%. Ini terdiri dari yang pertama adalah tugas kita adalah menempatkan ini pada lokasi *stunting*, kemudian yang sisanya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau saya tahun 2020 itu ada 1.900 kira-kira yang 1.100 itu adalah lokasi *stunting* yang merupakan program nasional, tetapi yang pemberdayaan masyarakat tinggal 770. Realisasinya yang *stunting* sudah cukup bagus Pak, cuman yang pemberdayaan masyarakat ini yang harus kita dorong lagi.

Kemudian yang kedua adalah lembaga distribusi pangan kita realisasinya adalah 88,37% dari total yang ada. Kemudian fasilitasi distribusi pangan realisasi kita 56,80% dan pengiatan cadangan atau lumbung pangan walaupun masih kecil yang kami lakukan sekitar 83%.

Kemudian lanjut saja, ini adalah lanjut, nah ini adalah realisasi kita untuk pangan lestari. Mohon maaf Bapak Ketua, saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan bahwa yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat ini sebetulnya adalah aspirasi Pak. Itu ada 775 lokasi, kemarin yang terakhir saya mohon maaf saya tidak menawar Bapak Ketua, karena kami juga harus menyeimbangkan anggaran ini sehingga per Dapil itu sekitar 14 lokasi, 14 kelompok. Realisasinya kita masih cukup rendah Pak, saya mohon ijin kami akan mengundang lagi para TA-nya supaya ini segera kita, karena kalau kita mulai bulan September tidak ada gunanya, jadi kita akan coba akan mengundang kembali.

Lanjut saja

KETUA RAPAT:

Saya potong sedikit, kalau selambat-lambatnya 31 Juli boleh tidak?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Siap.

KETUA RAPAT:

Jadi kami kan tutup masa sidang tanggal 16, kami semua pulang ke Dapil, karena dalam menentukan, memilih itu kan tidak gampang. Karena ini uang negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi saya minta yang terhormat para Anggota Komisi IV DPR RI, sebelum tanggal 30 Juli sudah harus masuk CPCL-nya, kalau tidak masuk jangan menyalahkan Kepala Badannya, jangan menyalahkan complain, karena waktunya sudah cukup lama.

Lanjutkan.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

F-PG (SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Sedikit Bapak Ketua, bisa waktu Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Masalah apa Bang?

F-PG (SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Masalah ini Pak Ketua, saya kira tadi kalau masalah CPCL kami sudah lama masuk Bapak Ketua, sebagian. Cuma ini apakah saran ini Bapak Ketua, kalau tidak salah itu sudah kita tambah anggaran berapa puluh miliar Bapak Ketua, kenapa 14 cuman dapat Ketua. Hitung saya begini Bapak Ketua, kalau 20 saja 1 miliar cuman Bapak Ketua, kita 50 sekian kan masih wajar Bapak Ketua.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, nanti dijawab.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Siap Pak Ketua, kami juga monitor juga nanti mengenai realisasi. Dan kami berharap betul memang akhir Juli terima kasih kalau akhir Juli bisa karena memang kami. Perhitungan kami kalau akhir Juli paling tidak dia bisa dua kali panen Pak, karena yang ditanam adalah tanaman umur pendek, maksimum yang umur 3 bulan, tapi ada yang 20 hari dan sebagainya.

Lanjut saja pada caption berikutnya, caption 20 saja lanjut. Nah, ini realisasi yang kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat Bapak Ketua. Jadi ada 22 provinsi di PUPM yang kita coba bantu mereka.

Sebetulnya intinya begini Pak, kami membantu biaya giling kalau ini beras, kami membantu biaya giling kemudian packaging, kemudian pengiriman kepada TTI kita. Itu kira-kira 1 PUPM itu 60 juta, dia dengan kewajiban dia menyetor berasnya 50 ton dengan harga Rp8.500,00 itu perhitungannya sudah mereka untung itu dan mereka mau melakukan itu.

Nah, ini yang kemudian kita dorong untuk menyediakan pangan yang murah dan berkualitas. Sampai hari ini saya sampaikan bahwa kami terus terang sebenarnya kewalahan Pak, karena begitu kami membuka pangan murah berkualitas ini celaknya yang mau Bansos mampir kepada kita juga. Jadi ini berat sekali sebetulnya kalau kami mau tingkatkan ini. mudah-mudahan ini kedepan bisa kita bangun kembali.

Lanjut saja halaman 22, 22 ini adalah gambaran kita mengintervensi distribusi antar provinsi, antar pulau. Bawang merah misalnya dari Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, Jawa Timur dan Jawa Barat kami harus kirim beberapa provinsi. Kemudian cabai merah juga besar juga demikian, sampai dengan telur ayam pun kami harus lakukan, karena ini untuk menyeimbangkan. Bukan berarti 100% di wilayah tujuan itu kita penuh tetapi kita paling tidak membantu.

Nah, terus lanjut ini adalah gambaran-gambaran kita bagaimana kita bergerak. Lanjut, yang terakhir adalah lumbung pangan. Ini yang sementara kita ingin tingkatkan Bapak Ketua dan Anggota, bahwa sekarang ini kami melihat banyak sekali yang memag berhasil dan berfungsi baik dan itu tentunya coba kami tularkan kepada daerah lain.

Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ketua dan para Anggota mohon arahannya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, bisa sedikit interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak Andi silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Bapak Kepala Ketahanan Pangan menjelaskan tadi tentang distribusi pangan ya Pak, yang sudah dianggarkan. Mungkin belum pernah saya mendengar di forum ini, di komisi ini bahwa ini menggunakan APBN untuk distribusinya ya. Terus itu barang siapa dan siapa yang menerima. Mungkin sedikit dijelaskan supaya ini agak jelas gitu.

Terima kasih Bapak Ketua.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Ijin Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti saja jawabnya sekalian.

Lanjut.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Selanjutnya saya minta Kepala Badan Litbang.

KETUA RAPAT:

Tolong kalau bisa PKH dulu karena Bapak Kanjeng Dirjen mau bertanya.

Silakan Dirjen PKH dulu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ya, silakan Dirjen PKH.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Mohon ijin Bapak Sekjen.

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi, Bapak Anggota,
Serta hadirin yang kami sangat hormati.

Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat kali ini kami ijin menyampaikan beberapa topik, diantaranya adalah rangka kebijakan program kegiatan, kemudian pelaksanaan bantuan antisipasi dampak COVID dan beberapa isu strategis lain.

Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Selaras dengan perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2024, ada dari 7 prioritas nasional yang ditetapkan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kontribusi terpenting terhadap pencapaian prioritas nasional, yaitu peningkatan ketahanan ekonomi, kemudian program prioritas terkait yaitu program prioritas ketersediaan, akses dan konsumsi pangan, kemudian nilai tambah dan lapangan kerja serta

investasi di sektor riil dan industrialisasi. Dari 2 program prioritas nasional tersebut, sub sector peternakan akan berkordinasi langsung dengan indicator kinerjanya pembangunan nasional yang peningkatan produksi daging.

Kemudian slide selanjutnya, slide nomor 4. Berdasarkan surat bersama pagu indikatif Kementerian Keuangan dan Bappenas, pagu indikatif Ditjen Peternakan dan Keswan tahun 2021 senilai Rp1,9 triliun. Indikatif kegiatan tersebut sesuai dengan tema RKP, yaitu pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan akan kami prioritaskan untuk mendukung pencapaian produksi daging melalui program ketersediaan pangan, akses dan konsumsi pangan. Dengan 13 kegiatan prioritas diantaranya, yaitu optimalisasi reproduksi. Kemudian penyediaan benih atau bibit sapi dan lain sebagainya. Kemudian penyediaan bibit, pengembangan penghijauan pakan ternak, penyediaan pakan olahan, kemudian penjaminan mutu dan keamanan pakan.

Program selanjutnya adalah program nilai tambah daya saing industri dengan 6 output prioritas diantaranya adalah pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan. Kemudian pemenuhan persyaratan produksi hewan masuk, kemudian pengawasan mutu dan keamanan produk, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Kemudian pengelolaan informasi dan pengembangan pemasaran ada di 34 lokasi.

Melalui 2 program utama di atas, program ketersediaan pangan, akses dan konsumsi pangan, nilai tambah daya saing industri serta dengan program dukungan manajemen diharapkan target ideal kinerja pembangunan peternakan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, yaitu produksi daging 5,15 juta ton. Kemudian yang terdiri dari sapi, kemudian ada unggas, ada kerbau, ada kambing, kemudian ada domba, ada babi dan itik. Selanjutnya peningkatan ekspor produk peternakan yang kita target 12% yang terdiri dari hewan hidup, produk pangan segar dan olahan, produk non pangan, obat hewan, bibit dan benih ternak.

Target kinerja yang dimanfaatkan dalam tahun 2021 merupakan target ideal sebelum adanya pandemi COVID-19. Jadi penyesuaian target nasional tersebut lebih lanjut akan kami sesuaikan dengan mitra kami di Bappenas, Kementerian Keuangan sesuai dengan literal meeting yang saat ini sedang berlangsung.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, saya mau tanya mumpung ada slidenya. Target ekspor 2021 33,75% yang 2020 berapa targetnya berapa, realisasinya berapa?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Mohon ijin sebenarnya yang 33,75 ini adalah target Kementerian Pertanian Pak Ketua yang kami akses dari 33,75 ini adalah 12% seperti yang kami uraikan di depan.

KETUA RAPAT:

Terus apa yang diekspor, sapi, kerbau, kambing, paling kalau saya lihat yang bisa diekspor itu hanya itik atau babi tidak begitu banyak sama ayam. Jadi Dirjen ini bukan dari lembaga pertanian, jadi anda mengambil 33,75 ini target Kementerian bukan target anda sebagai Dirjen.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

33,75 itu kami mempunyai akses 12% saja.

KETUA RAPAT:

Targetnya, target ekspor 33,75 bukan hanya ini saja. Jangan seperti kemarin di seluruh media gempar nilai ekspor naik 300%. Begitu saya tanya ya 5 tahun. Ya sudah lanjutkan.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

33,75 itu untuk Kementerian Pertanian, dari 33,75 itu sharing dari Dirjen Peternakan itu 12% saja. 33,75 itu adalah gabungan keseluruhan Pertanian, misalnya dari Dirjen-dirjen lain semuanya ada 33,75.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Interupsi Ketua, Pimpinan.

Maksud saya kalau ini Dirjen PKH kenapa menerangkan targetnya dirjen yang lain gitu.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Kami sebenarnya kemarin sudah koreksi

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Mestinya kan yang sudah dijelaskan yang lain sendiri-sendiri. Nah, mau diapakan gitu kalau kita bicara Dirjen PKH ini dari 33, ini kayak main-main gitu kalau diterangkan terus dijelaskan. Disitu Dirjen PKH hanya 12 yang lainnya itu adalah target Kementerian Pertanian. Nah, sampean itu di Kementerian Pertanian apa di Kementerian lain, gitu kira-kira kan saya nanya. Nah, mestinya kan focus mikirkan dirinya sendiri saja belum tentu kan gitu kira-kira Bapak Dirjen. Nah, tentu kita sangat mengharapkan Bapak Dirjen, di tahun 2021 itu tolong dong kalau sampean dan Bapak Menteri itukan 5 tahun ke depan targetnya per tahun berapa sih sampai 5 tahun nanti ke depan. Harus ada planning yang jelas jangan nanti ninggalkan anak cucu kita selalu impor terus gitu.

Ada beberapa perjanjian antara Australia sama Pemerintah kita bahwa terkait dengan bea masuk. Jangan gampang memberikan masukan kepada Pemerintah kita mungkin kepada Bapak Menteri atau kepada Bapak Menko terkait dengan bea masuk, karena bea masuk ini negara lain inginnya apa? Berharap bea masuk itu bebas nol. Nah, kalau nol mereka akan menaikkan itu, menaikkan harga mereka untuk ekspor ke kita.

Jadi harapan saya bahwa ini dijelaskan Pak Dirjen, 12% itu apa saja, titiknya jelas, seperti apa. Kalau memang itu punya Dirjen yang lain ya biarin saja Dirjen yang lain. Kan tentu nanti Bapak Sekjen yang akan menyampaikan.

Terima kasih Pimpinan, maaf.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Mohon ijin kami lanjutkan.

Terkait ekspor itu sebenarnya kita ini banyak mengekspor produk olahan dari unggas Pak. Kemudian ekspor telur, kemudian DOC ke Timor Leste. Jadi banyak sebenarnya produk-produk yang sudah kita ekspor. Jadi itu nyata tidak mungkin kita mengarang gitu istilahnya, kami bisa dikroscek datanya. Mohon ijin kami lanjut, lanjut ke slide berikutnya, slide 8.

Yang terhormat Bapak Ketua serta Anggota Komisi.

Pada serapan Ditjen PKH hingga tanggal 26 Juni 2020 berdasarkan data Kementerian Keuangan, yaitu 41,50% dari total pagu sebesar Rp1.153.000.000.000,00 total realisasi tersebut termasuk belanja aktual, kontrak yang telah didaftarkan dan surat perintah dari pencairan dana yang telah diproses di Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, untuk kegiatan yang saat ini masih dalam proses pengadaan Bapak Ketua beserta Bapak Anggota yang kami hormati, masih ada dalam proses termasuk dalam pengadaan hewan hidup, seperti kambing, domba, sapi dan lain sebagainya. Kami masih juga menunggu CPCL itu karena CPCL itu adalah termasuk indikator kami dalam melakukan kontrak Pak. Kecepatan tuntasnya CPCL itu kan sangat membantu kami dalam mengeksekusi kegiatan.

Slide selanjutnya, dalam rangka mengantisipasi dampak COVID, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan anggaran sebesar Rp145 miliar lebih dan hingga 26 Juni 2020 telah terealisasi sebanyak 43,92%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengantisipasi dampak COVID terdapat 3 kegiatan, diantaranya pencegahan dan penanganan penyebaran COVID, pengamanan ketersediaan pangan dan *sosial safety net*.

Untuk kegiatan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID meliputi kegiatan penanganan penyebaran COVID terkait dengan penyemprotan disinfektan, kemudian penyemprotan gedung kantor, kemudian

pengadaan vitamin, sanitaser, dan kemudian masker, pengadaan APD, fasilitasi swab, dan seterusnya. Untuk kegiatan pengamanan ketersediaan pangan meliputi bahan-bahan pangan untuk masyarakat petani berupa paket olahan pangan asal ternak yang sudah didistribusikan ke 34 provinsi. Sedangkan untuk social safety net merupakan kegiatan regular, insiminasi buatan, kemudian pemeriksaan kebuntingan dengan dialokasikan insentif operasional bagi petugas inseminator kami sebanyak 30.000 per asektor.

Demikian paparan yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ketua, sebagai bahan pertimbangan untuk penyeragaman dan penyempurnaan dan penyusunan pagu anggaran lebih lanjut.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Silakan khusus Bapak Darori sebelum ke Bapak Dirjen yang lain untuk menyampaikan saran dan pendapatnya.

Silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua terima kasih.

Bapak Dirjen dan Bapak Sekjen, kebetulan kami dipanggil-panggil di Baleg ini, Undang-Undang sampean juga yang dibahas juga di sana. Kalau tidak ada Komisi IV DPR RI hanya 3 orang disana dari partai lain, dari komisi lain. Kami, Bapak Ibnu sama Bapak Firman. Ini tolong mohon ijin Bapak Ketua.

Kemarin kami menerima Gapuspindo Gabungan Pengusaha, di terima sama Bapak Ketua, Bapak Salim, Bapak Bupati, Ibu Endang. Intinya begini Pak, saya juga bahwa ada Permennya Pertanian impor sapi potong dan sapi indukan itu diprsyaratkan 5%, betul? Nah, ini Gapuspindo itu keberatan. Alasannya kandangnya tidak cukup itu aneh, kalau kandangnya tidak cukup kenapa tidak dibagikan kepada masyarakat. Berdasarkan survey BPS pelihara sapi itu rakyat kecil yang 9% rakyat yang punya sapi 1-3 ekor. Dan itu rakyat itu tidak punya modal, tidak punya skill, tidak punya teknologi, sapinya kurus-kuru semua. Nah, Gapuspindo membuat surat kepada kita, kepada Ketua, meminta ini direvisi. Tolong dikajilah jangan dibiarkan ini, ini liar akhirnya.

Nah, menarik lagi menurut Gapuspindo tadi Bapak bisanya ekspor tapi daging kerbau dan sapi itu kita kebutuhannya kurang 50% hampir. Di mana yang betul datanya itu, ini tolong Bapak Sekjen ini kayak gini jadi bingung kita. Narasumber satunya bilang kita kekurangan daging, maka daging kerbau India datang. 50% hampir Pak, faktanya. Nah, sekarang Bapak Dirjen Ternak tadi ada 33% yang mana yang ekspor itu, apa turunannya tolong dijelaskan tadi jumlah sapi dikatakan ada sapi 438 ribu ton itu daging atau apa. Jadi teman-teman ini tidak bingung Bapak Ketua.

Kalau boleh satu lagi Bapak Ketua, ini di Dirjen BUN sudah bicara apa belum ya. Bapak Dirjen BUN tolong teman-teman ini mau Reses, saya sudah menjalani sama anda sudah 5 tahun tidak ada yang dibawa sama teman-teman, kenapa Kehutanan bisa bawa bibit produksi buah-buahan, perikanan Gemar Makan Ikan. Alangkah baiknya Bapak siapkan 50 ribu batang buah-buahan setiap Anggota. Tanam perkebunan yang produktif buah-buahan, contoh ini Kehutanan sudah 3 tahun kita bangga membagi bibit, ini Bapak yang mengadakan semua. Kalau 50 ribu beli bibit yang 20 ribu itu satu Anggota itu 1 miliar, kecil itu. Kalau 50 Anggota jadi 50 miliar tapi kita Kunker itu tidak hanya ngomong saja cerita di daerah. Ini loh saya bawa pohon durian, ini bawa pohon mangga. Saya kira teman-teman setuju, setuju tidak ya? Setuju ya.

KETUA RAPAT:

Lansung saja ini bukan pendapat, tapi perintah gitu Pak.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ini saya tidak berani perintah, Bapak Ketua yang memerintah. Itu saja dua, satu lagi Bapak Dirjen BUN kasus kebun di kehutanan tolong di komunikasikan. Ini sudah temuan BPK dan sudah masuk ke penegak hukum. KPK sudah nanya kepada saya inikan repot. Di Riau saja 1 juta hektar kebun rakyat di kawasan hutan, tolong dirapatkanlah. Saya sarankan kepada Bapak Menteri kemarin undang Perkebunan, ATR, Kehutanan, KPK, Jaksa, Polisi, ini mau diapakan, rakyat mau dipenjarakan atau diampuni. Saya kira ini kalau dibiarkan terus ini ATM ini, tolong karena rakyat juga ngadu kepada saya, dari pihak penegak hukum minta data kepada saya, karena saya dulu disana. Ini mau diapakan kalau dibiarkan ya monggo saja.

Saya kira itu dan saya mohon ijin Ketua, di WA disana disuruh ngomong soal Undang-Undang Pertanian belum hadir kesana belum datang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan Bapak Sunarna, setelah kami akan buka penanya yang cukup banyak.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan, waktu dikasih katanya saya harus suruh rapat di Banggar Pak.

KETUA RAPAT:

Karena Kapoksi ini, bahaya kalau tidak datang.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen, saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan saja terkait tadi disampaikan juga oleh Bapak Darori, jadi mungkin kemarin dengan kedatangan teman-teman Gapuspindo kebetulan saya, Bapak Darori, Pimpinan yang menerima, Bapak Salim. Kami sangat mengharapkan bahwa ini bisa segera ditindaklanjuti terkait dengan apa yang menjadi keluhan teman-teman Gapuspindo Bapak Dirjen.

Dan selanjutnya Bapak Dirjen, bahwa terkait dengan saya ulang lagi terkait dengan target untuk produksi di 2021 maupun ekspor. Kalau kita bicara ngejar sapi masih sulit, ngejar ekspor yang lain juga masih sulit tapi kan kita juga bisa mencoba ada kambing, ada domba, yang kita cukup, bagaimana kita bisa support betul kepada peternakan khususnya kambing dan domba ini yang memang cukup populasinya cukup, ekspornya juga bisa, marketnya bagaimana, kan tentu kita satu, satu, satu jadi bisa optimal nantinya Pak, kalau kita sapi belum bisa optimal ya kapan sapi itu akan optimal kalau kerbau belum bisa kita masih impor. Harapan kita juga daging kerbau di impor ini juga ada edit *value*-nya bukan hanya daging kerbau datang langsung dijual itu tidak ada nilai plusnya sama sekali. Apakah kita begitu kira-kira. Nah, harapan kita bahwa harapan kita kedepan negara kita itu ya tambah kuat semuanya. Jadi kalau kerbau datang ada edit *value*-nya, jangan hanya enak banget impor selesai, jual beres, indah sekali itu, itu semua hidup bisa nyenyak kalau begitu Pak.

Mungkin itu saja Pimpinan, saya ucapkan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mempertegas dan memperjelas Bapak Sekjen, potensi ekspor dari Indonesia keluar itu sebagaimana Bapak Kapoksi PDIP itu ada. Ambil yang terkecil saja, domba, kambing, kepada siapa? Kepada orang Indonesia sendiri yang keluar negeri. Haji itu pasti, kan yang pasti-pastilah jangan yang tidak pasti kan, karena semua orang haji di Republik Indonesia itu minimal 250 ribu orang setiap tahun. Kalau ini dianggap peluang dan potensi seriuskan 2021.

Silakan saya kembalikan Bapak Sekjen, Dirjen siapa yang akan menyampaikan selanjutnya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Selanjutnya Kepala Badan Litbang Bapak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M.Si.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Wakil Pimpinan,
Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen.

Mohon ijin Bapak Ketua, menyampaikan beberapa hal terkait dengan program dan hasil capaian Badan Litbang Kementerian Pertanian.

Bapak dan Ibu sekalian.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Litbang Kementerian Pertanian, mendukung Ditjen teknis. Badan Litbang Kementerian Pertanian sesuai dengan Tusnya akan menyiapkan 4 varietas unggul baru padi, 4 teknologi produksi padi dan kurang lebih 1.014 ton benih padi. Untuk jagung kita sudah menyiapkan satu varietas unggul jagung, 3 teknologi produksi jagung and 190 ton benih jagung. Dan kedelai, satu varietas unggul kedelai dan 650 ton benih kedelai.

Bapak Ketua dan Wakil Ketua.

Kami sampaikan bahwa benih Litbang 90% *Alhamdulillah* varietas unggul yang kita kembangkan dan sampai sekarang kita sudah merilis kurang lebih 318 varietas unggul baru terkait dengan padi dan begitu pula komoditi jagung dan kedelai. Lanjut, untuk cabai dan bawang merah kita menyiapkan dua varietas unggul, 2 teknologi produksi dan 72 ton benih bawang merah dan cabai. Untuk ternak 8 galur ternak , 12 teknologi produksi ternak dan 128 ribu ekor...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya mau tanya 128.240 ekor bibit ternak itu bibit apa?

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Jadi ada ayam, ada kambing, ada domba, ada sapi juga Pak Ketua, sesuai dengan target. Jadi benih sumber yang kita siapkan.

KETUA RAPAT:

Oke, lanjut.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Untuk perkebunan kita menyiapkan 8 varietas unggul, 22 teknologi produksi dan 2 juta pohon benih tanaman perkebunan. Lanjut, ini gambaran pagu anggaran kita Bapak Ketua dari tahun 2016 sampai 2021. Lanjut, ini rancangan pagu indikatif jadi untuk belanja pegawai kurang lebih 490 miliar kurang lebih hampir 29%, belanja barang operasional 12% dan belanja non operasional kurang lebih 58%.

Lanjut, ini kira-kira sebarannya per kegiatan memang kita akan fokuskan Bapak Ketua, ke hilirisasi, desiminasi ini sebanyak kalau biasanya bantuan Pemerintah. Jadi bantuan benih, bibit unggul ke penangkar-penangkar dan termasuk untuk kelompok tani.

Lanjut, ini benih yang akan kita siapkan untuk tanaman pangan kurang lebih 1.908 ton terdiri dari; benih padi 1000 ton, jagung kurang lebih 190 ton, kedelai 690 ton dan pangan lainnya. Untuk perkebunan kurang lebih 3,9 juta bucet ini tebu dan 2.358.000 pohon benih perkebunan lainnya. Begitu pula dengan hortikultura kita menyiapkan kurang lebih 80 ton benih untuk bawang merah, cabai, tomat dan sebagainya. Dan untuk peternakan ada sapi 100 ekor, kambing 500 ekor, domba 60 ekor, ayam 63 ribu ekor dan itik 64 ribu ekor.

Lanjut, ini kira-kira rencananya program Pak Ketua untuk 2021. Jadi kita akan merilis kurang lebih 51 varietas galur, 17 galur yang terkait dengan *by technology*, 78 teknologi spesifikasi lokasi dan penetaan. *Alhamdulillah*, kita sudah petakan seluruh kabupaten seluruh Indonesia skala 1:50.000 untuk wilayah komoditas termasuk peta rawa, peta gambut seluruh Indonesia dan untuk Kalimantan Tengah kita sudah fokus Bapak Ketua, sudah menyiapkan peta wilayahan untuk yang rencana pengembangan *Food Estate* yang ada di Kalimantan Tengah. Begitu pula teknologi pasca panen....

KETUA RAPAT:

Sebentar saya mau tanya yang dimaksudkan *Food Estate* itu yang mana yang di Kalimantan Tengah yang 165 ribu hektar yang direncanakan, itu?

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Jadi yang rencananya 28 ribu hektar Pak Ketua, yang sudah disepakati Bersama antara Kementerian/Lembaga.

KETUA RAPAT:

Bukan yang dari Menteri 165 ribu hektar Pak Sekjen?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

20 ribu itu maksudnya yang tahun 2020 Pak, 30 ribu, tapi secara keseluruhan 165.

KETUA RAPAT:

Untuk tahun 2021 20 ribu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

2020 30 ribu hektar.

KETUA RAPAT:

Infrastrukturnya sudah?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Yang intensifikasi ini Pak.

KETUA RAPAT:

Ya saya tahu, kemarin saya baru ketemu Menteri PU, mau dikerjakan kok 2020.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Jadi bukan pembukaan areal baru Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya paham itu eks 1 juta hektar, sebagian sudah ada irigasinya cuman irigasinya rusak. Itu lagi diperbaiki oleh Kementerian PUPR, termasuk juga nanti tahun depan ada lagi. Itu loh, bukannya sudah intensifikasi itu belum mulai Pak. Minggu lalu saya ketemu Menteri PU disana, saya tanyakan di Komisi V DPR RI, "Ya Pak, kami sedang merancang untuk perbaikan irigasinya". Dari 1 juta hektar itu katanya, ini katanya ini, yang laik dilanjutkan itu cuman 165 ribu hektar, sebagian itu sawah yang intensifikasi tetapi sudah ditinggalkan. Ada yang ditinggalkan, ada yang masih digarap sama petani.

Tetapi untuk irigasi saluran tersier dan sekundernya itu sudah tidak terlihat, maka Presiden minta Menteri PUPR untuk memperbaikinya.

Sekarang kira-kira, kira-kira ini saya tidak ahli pertanian karena saya bukan S3. Kalau disana 1 hektar bisa menghasilkan berapa ton gabah kering giling?

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Jadi kalau lahan bukaan baru Bapak Ketua, itu 1 ton per hektar sudah bagus.

KETUA RAPAT:

1 ton?

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Iya Pak, lahan bukaan baru, yang baru dibuka. Kalau yang sudah lama sekarang yang

KETUA RAPAT:

Lamanya berapa tahun?

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Ini paling tidak 3-5 tahun Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bisa 2 ton?

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Bisa Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Coba hitung kalau 2 ton untung tidak?

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Hasil kajian kita beberapa lahan itu sampai 5 ton dengan menggunakan varietas Himpara dengan teknologi pendukungnya Bapak Ketua, itu bisa sampai 5 ton per hektar.

KETUA RAPAT:

Kalau 5 ton untung tidak?

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Masih.

KETUA RAPAT:

Coba nanti saya bikin hitungan kasih ke saya, karena terakhir saya konsultasi sama IPB, sama Rektor, paling top cuman 2 ton. Kalau anda bilang 5 ton itu ya super hebat. Sekarang permasalahannya adalah sawah-sawah itu yang menangani siapa, Pemerintah kah, Kementerian kah, BUMN kah, perbankan kah, ini harus jelas dulu. Nanti sudah ada keluar uang, sudah penyediaan bibit, benih, sapordi dan lain-lain, yang ngurusnya siapa. Ini mohon maaf, kalau BUMN Pertanian yakin pasti berantakan. Jadi minta tolong nanti kalau ketemu Menteri ngobrol-ngnobrol dululah kira-kira ini siapa yang mengerjakan. Orang PT Berdikari dikasih sapi sekian puluh ribu ekor buntutnya saja tidak ada. Punya usaha asuransi bangkrut, punya pabrik mebel ekspor ke Eropa tutup. Jadi tolong nanti Bapak Sekjen, dikaji dulu siapa yang ngurusnya ini, yang ngurusnya siapa, yang mengawasinya siapa, jangan sampai namanya proyek uji coba. Dulukan sudah juga ini ada Dirjen Perkebunan, sapi, sawit, sawitnya ada, sapinya lepas.

Lanjutkan.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Baik Bapak Ketua, siap.

Lanjut, ini beberapa hilirisasi dan inovasi teknologi pertanian. Kita melanjutkan beberapa *Geo technopart* dan ... yang tahun ini tertunda dan beberapa desiminasi dalam bentuk denfarm, denplot dan gelar inovasi teknologi dan sebagainya termasuk pendampingan dan pengelolaan teknologi dan penguatan SDM.

Lanjut, Bapak Ketua yang saya hormati, beberapa yang sudah kita lakukan ini dalam kondisi pandemi COVID-19 terkait dengan webinar yang kita lakukan Bersama-sama dengan teman-teman Badan Penyuluhan tentunya dengan petani di beberapa lokasi di Indonesia.

Lanjut, ini gambaran manajemen dan dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan 2021 mulai dari belanja modal, manajemen dalam bentuk belanja pegawai dan belanja operasional lainnya untuk 64 Satker di seluruh Indonesia.

Lanjut, Bapak Ketua kami ingin menyampaikan realisasi anggaran per hari ini sudah 50,88% jadi dari alokasi anggaran yang 1,41 triliun ini sebarannya untuk setiap belanja pegawai operasional dan belanja modal.

Lanjut, ini ketersediaan benih yang kita siapkan untuk benih padi dan *alhamdulillah* sudah didistribusikan kurang lebih untuk padi itu kurang lebih 72 ton ke seluruh penangkar dan kelompok tani yang ada di Indonesia. Mulai dari padi sawah, padi rawa, padi gogo dan padi khusus dan beberapa varietas yang lain masih dalam uji lab untuk penyiapan benih untuk tahun ini. Jadi kita masih punya cadangan untuk padi sawah itu 50 ton, padi rawa 28 ton, padi gogo 33 ton, dan padi khusus ini seperti stunting, untuk beras khusus kita punya 3 ton.

Lanjut, ini beberapa webinar yang kita lakukan selama ini, beberapa bulan terakhir ini. Lanjut, kita juga sudah menyampaikan desiminasikan beberapa hal dan *alhamdulillah* kemarin kita sudah rilis juga eucalyptus salah satu untuk pencegahan virus corona dan ini sudah dilisensi oleh PT Eagle Indo Farma mudah-mudahan dalam 2 minggu bisa tersedia di seluruh Indonesia. Ini sudah dilisensi dan *alhamdulillah* ini salah satu capaian yang kita hasilkan.

Kita juga membuat beberapa bulan bio etanol untuk menyiapkan untuk membuat hand sanitizer termasuk desinfektan dan kita sudah bagikan seluruh Indonesia Bapak Ketua, ini karena keterbatasan alkohol jadi kita buat dari singkong, dari tebu, dari sogum sehingga pembuatan sanitizer dan desinfektan ini tetap bisa kita lakukan dan kita sudah punya formula juga yang bisa membunuh virus corona 100%. Dan ini juga sudah kita bagi ke semua stake holder kita yang ada di seluruh Indonesia. Lanjut, ini kita bagikan ke rumah-rumah sakit kemarin untuk wilayah Jabotabek kita sudah bagikan kemudian beberapa gugus COVID yang ada di sekitar Badan Litbang.

Itu mungkin Bapak Ketua, gambaran umum yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon saran dan masukannya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Lanjutnya Eselon I lainnya.

F-PG (SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit Bapak Ketua, boleh Bapak Ketua?

KETUA RAPAT:

Ngomong apa Bapak Salim?

F-PG (SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit nyambung Bapak tadi Bapak Ketua, tadi sudah dibagi-bagikan kemudian masyarakat anti virus Bapak Ketua. Memangnya Komisi IV DPR RI

itu bukan masyarakat Bapak Ketua. Soalnya yang dibagikan Bapak ini cuma 3 biji cuma Bapak Ketua. Apa salahnya Bapak Ketua, supaya maksud kita begini Ketua, supaya tahu kita mutu apa yang dibuat oleh Bapak Litbang, bagus tidak sanitizernya kita juga bisa beli Bapak Ketua. Cuma namanya kita mitra maunya Kepala Litbang juga coba diapakan dulu ke Anggota.

KETUA RAPAT:

Abang Anggota DPR RI jangan kayak orang miskin.

F-PG (SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bukan masalah miskin.

KETUA RAPAT:

Nanti saya kasih Abang, sudah.

F-PG (SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bapak Ketua, sedikit Bapak Ketua.

Bukan masalah miskin dan kaya, inikan hasil Litbang kita juga mau uji apakah ini bagus supaya bisa kita tambahkan anggaran Litbang, begitu Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jangan mentang-mentang Abang di Banggar bisa menambahkan anggaran, anggaran itu difokuskan ke Tupoksinya. Seperti saya katakan tadi dari awal fokus pada Tupoksinya bukan cari sensasi. Paham?

F-PG (SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Paham Bapak Ketua, bukan kita cari sensasi, hand sanitizer yang dibuat Litbang ini kita mau tahu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini Abang kalau mau saya kasih.

F-PG (SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Oke, lanjutlah Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Eselon I.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Kepala Badan BPPSDMP.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. (R). Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Komisi IV DPR RI, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, dan para Anggota Komisi IV DPR RI serta rekan-rekan sekalian.

Pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan mengenai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Baik, langsung saja ke halaman 8, mohon maaf.

Baik, jadi ini adalah sasaran dan indicator kerja 2020 dari BPPSDMP. Jadi yang pertama, sasaran strategis pertama termanfaatkannya teknologi pertanian. Nah, ini targtenya teknologi yang diterapkan petani 75%. Kemudian strategis yang kedua, itu meningkatnya kaulitas SDM dan kelembagaan pertanian ada 3 indikator. Pertama, persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 19%. Kemudian persentase SDM Pertanian meningkat kapasitasnya 65%, dan persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian 75%. Ini adalah proporsi anggaran kita, jadi anggaran ada anggaran Pendidikan, ada anggaran manajemen dan ada anggaran untuk tercapainya ketahanan pangan, baik akses maupun konsumsinya.

Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah porposi dari 3 kegiatan yang saya sebutkan tadi rinciannya seperti ini, ada program dukungan manajemen, ada program ketersediaan akses dan konsumsi pangan, dan ada program Pendidikan dan pelatihan vokasi, ada Rupiah murni, ada PNBPN, kemudian ada juga PLN, pinjaman luar negeri.

Terus, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah rincian kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Jadi yang pertama adalah program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, meliputi kegiatan pelatihan dan sertifikasi profesi, kemudian juga kelembagaan penyuluh swadaya, penerapan teknologi dan percontohan kelembagaan ekonomi petani. Fasilitasi insentif kinerja penyuluh baik itu berupa honor maupun BOP untuk penyuluh pertanian PNS dan THR TBPP. Kemudian juga dukungan teknis penyuluhan dan pelatihan serta program PHLN, yaitu program IPDMIP, Litsi dan Simuk.

Kemudian untuk program manajemen, kita fokus untuk manajemen 10 UPT di 34 provinsi, 514 kabupaten kota, kemudian ada UPT Pusat, UPT Pusat itu satu secretariat, 10 UPT pelatihan dan tersebar di 34 provinsi.

Kemudian yang lainnya seperti biasa belanja pegawai dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu program Pendidikan. Jadi program Pendidikan pertanian meliputi kegiatan peningkatan kompetensi calon tenaga terampil dan ahli, baik di Politeknik Pembangunan Pertanian maupun di SMK Pembangunan Pertanian.

Kemudian juga penumbuhan wirausahawan muda, kemudian dukungan teknis penyelenggaraan Pendidikan dan belanja modal. Nah, ini utamanya di Polbangtan, kemudian belanja pegawai dan belanja operasional serta program wirausaha muda dan tenaga kerja di dalam kegiatan *youth entrepreneurship services* ini adalah kegiatan pinjaman luar negeri. Jadi itu adalah kegiatan kita.

Kemudian progress report kegiatan Badan SDM hingga kemarin. Nah, ini adalah ini sebetulnya masih sampai dengan 24 Juni Bapak Ketua, karena ini yang disampaikan ke DPR RI, namun demikian kalau dilihat serapan sampai dengan tanggal 30 Juni kemarin itu sebetulnya meningkat sedikit kurang lebih 51,7%. Rinciannya adalah demikian.

Terus, ini adalah wabil khusus yang terealisasi anggaran penanganan COVID-19. Kemudian untuk isu saat ini utamanya adalah regenerasi petani Bapak Ketua, jadi saat ini memang usia produktif petani itu relative dominan 27%. Namun demikian banyak juga di atas usia lebih dari 55 tahun, artinya usia yang kurang produktif.

Kemudian petani milenialnya itu hanya kurang lebih 27% saja, artinya yang kurang dari 40 tahun. Nah, kalau misalnya kita lihat 10 tahun yang akan datang itu proporsi produktifnya sangat sedikit Pak Ketua, kurang lebih 27% sebagian besar adalah tua, berarti regenerasi ke petani milenial memang harus kita lakukan saat ini juga tidak bisa ditangguhkan lagi. Nah, ini saya kira yang menjadi perhatian kita semua. Nah, oleh karena itu Badan SDM fokus juga di dalam pembangunan petani milenial melalui berbagai program maupun kegiatannya. Saya kira itu Bapak Ketua, dari kami.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya minta penjelasan sedikit yang dimaksud dengan petani milenial bagaimana sih dari jaman Bapak Amran juga sudah ada milenial tapi kok tidak pernah jalan. Sekarang kalau sekolah tinggi pertanian atau Politeknik Pertanian coba anak siswa atau mahasiswa setelah lulus Poltek kemampuannya adakah untuk turun ke lapangan.

Sebetulnya tugasnya SDM salah satunya itu, kemudian juga adakah seorang siswa Poltek Tanaman Pangan mengerti mengoperasikan alat mesin pertanian. Contoh, kemarin minggu lalu saya ke Tanggamus. Politeknik Perikanan, saya tanya kok satu kolam kincirnya cuman 2. Ya ini yang

tradisional, yang intensifikasi mana, tidak ada Bapak Ketua. Oh, jadi siswa kamu diajarkan tidak pintar-pintar. Kalau yang tradisional tidak usah ada Poltek, belajar saja, kerja saja sama orang, ikut pekerja tambang, bisa juga.

Jadi saya bilang kemarin kalau sampai tahun 2021 tidak ada yang berbagai model tutup saja Poltek. Kenapa? Kalau cuman 2 kincir kan tradisional. Ada yang semi intensif, ada yang super intensif. Super intensif paling tidak dalam kolam yang sama pakai gelembung di bawah, kemudian minimal dia punya kincirnya harus 10. Coba nanti tolong dipikirkan nanti kalau ada waktu Bapak Lampung saya dampingi kita ke Poltek. Bisakah mereka mengoperasikan mesin pertanian.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN:

Siap Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Lanjut, siapa Eselon I lainnya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terakhir Bapak Irjen.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. SUMARDJO GATOT IRIANTO, M.S., DAA.):

Terima kasih Bapak Sekjen.

Bapak Ketua, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, cintai dan banggakan.

Ijinkanlah kami menyampaikan rencana kegiatan anggaran Inspektorat Jenderal. Sebelum kami memulai kami ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa fokusnya Itjen pada pencegahan dan deteksi dini. Karena ini adalah aparat pemeriksaan internal jadi pencegahan melalui pengawalan, review dan lain sebagainya menjadi fokus kami.

Yang kedua, kami sampaikan bahwa tadi Bapak Ketua menyinggung dijemput, hotelnya dibayarin, makan dibayarin, pulang dioleh-olehin. Kami umumkan di dalam pertemuan kedepan sudah tidak usah seperti itu saja, dan ini saya kira efektif nanti *Insha Allah*. Kami belum ada pertemuan dengan teman-teman karena kondisi pandemi. Kami sudah sampaikan dengan para Inspektur, kita umumkan saja di pertemuan dan dinas seluruh Indonesia kita tidak mengenal seperti itu dan kami cukup dana. *Alhamdulillah* meskipun dipotong cukup dana.

KETUA RAPAT:

Ya, sudah nanti kalau ke Lampung saya kasih oleh-oleh.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ini tidak gratifikasi ya Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Kalau sampean ke Lampung selalu saya kasih kok.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

Yang kedua Bapak Ketua, kami ingin audit ini seminimal mungkin terkontak dengan *audity* sehingga intervensi akan semakin minimal. Untuk itu, kami butuh prasarana peralatan orang maupun hardware dengan software. Kami tadi menyampaikan dengan teman-teman Inspektur ini pekerjaan dilapangan tidak mungkin kita control satu-satu, karena jumlahnya banyak, maka teknologi menjadi kewajiban dan jaman sudah semakin maju kami ingin open camera ini di-link ke KPPN kalau belum ada fisik photo open camera ini jangan dibayar dulu. Kami pernah punya pengalaman dengan kordinat geofrasi kami bersurat dengan Dirjen Perbendaharaan jangan dibayar kalau belum ada kordinat lintang dan bujurnya. *Alhamdulillah* itu efektif, saya sekarang mau naikan dengan photo open camera.

Lanjut, ini pagunya sementara mudah-mudahan tadi fatwanya Bapak Ketua terbukti sesuai dengan janji, seindah warna aslinya, ini sekarang 99 Bapak Ketua, menurut pagu indikatif. Nah, ini tadi saya sebutkan kami mitigasi resiko kegiatan yang ada di Kementerian Pertanian, kemudian tadi untuk COVID kemudian monitoring pencapaian target kinerja. Kami melakukan evaluasi per Eselon II yang capaiannya merah Bapak Ketua. Nah, yang bikin merah selain ada di pihak pusat, laporan kami yang kami dapatkan langsung salah satunya ya tadi CPCL dari aspirasi belum masuk. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon ini juga bagian dari kerja sama yang baik, seperti dulu-dulu Bapak Ketua. Yang berikutnya ini zona integritas dari wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

Ini Bapak dan Ibu sekalian, saya sesungguhnya ingin menjelaskan ini saja. Yang pertama, kami sudah dengan BPKP di 34 provinsi untuk mendampingi ketika kami dan Bapak dan Ibu sekalian, kesulitan menghadapi Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Saya kira Anggota yang terhormat disini mudah-mudahan tidak tapi yang sebelum-sebelumnya setahu saya kadang-kadang bermasalah dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten. Kami gandeng BPKP dan BPKP tadi pagi sudah merespon, mereka akan mendampingi kita manakala ada kesulitan. Biasanya kalau diperiksa BPKP agak didengar Bapak Ketua.

Yang kedua, misalnya ini ada sudah panen 3 bulan tempatnya Bapak Salim ini tidak ditanam-tanam segera ditanam karena terlalu lama lahannya,

karena dibuat gembala sapi, ya Bapak Salim. Kemudian saya tidak usah baca PP Tarif, PP Tarifnya masih terlalu murah padahal itu adalah sumber PNBPN yang lumayan potensial. Kami akan naikkan misalnya sewa tanah di Sukamandi, sewanya masih kecil sekali 5 juta kalau tidak salah.

KETUA RAPAT:

Sukamandi itu yang lokasinya si SHS.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

Sebelah SHS.

KETUA RAPAT:

Balai besar, sewanya 5 juta per tahun per hektar.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terlalu rendah Pak, ini salah satu contoh saja supaya PNBPN bisa lebih baik.

KETUA RAPAT:

Itu luasannya berapa sih Sukamandi?

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

300, saya mantan Kepala Badan Litbang, jadi boleh jawab sedikit Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, yang pasti sebagian kan disewakan kemudian masyarakat dikantongin oleh oknum.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

Saya harus punya bukti.

Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga melakukan kerja sama dengan perhitungan kerugian negara. Kemudian ditindaklanjuti atas pengaduan masyarakat melalui media sosial kemudian unit pengelolaan gratifikasi dengan BPK saya kira opini yang dihasilkan Bersama BPK dan Komisi IV DPR RI ini saya kira juga peran Itjen dan teman-teman Eselon I sangat signifikan.

Kemudian tadi saya sebutkan PNBPN di Satker UPT supaya ada pendapatan negara diluar pajak yang bisa kita tingkatkan. Kemudian tindaklanjuti atas penyidikan aparat penegak hukum, Satgas Pangan, pengawasan penyaluran Saprotan. Bapak Ketua, sebagai informasi Itjen

ditugasi oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan review terhadap pembayaran pupuk bersubsidi. Bekerja sama dengan BPKP kami melakukan *tracking* terhadap Kartu Tani dan lain sebagainya.

Lanjut, saya kira itu Bapak Ketua supaya kami dapat lebih perform kami menunggu saran, arahan dan tindaklanjut yang lebih produktif.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Saya mau tanya nanti di program kan ada ini sudah disiapkan, anda kan sudah dapat laporan BPK. Bagaimana mencegah, mengurangi resiko yang sudah menjadi temuan BPK agar diprogramnya dikurangi atau diawasi secara ketat, karena saya tidak mau tahun 2021 tidak dapat WTP. Jujur anda sudah tahun 2020 kejadiannya, 2019 kejadian seperti apa sudah tahu. Jadi saya tidak mau sampai banyak temuan lagi. Contoh, program SERASI "Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani", itukan banyak temuannya, termasuk Alsintan. Ini harus diawasi, semakin kecil temuan berarti Irijennya hebat, semakin banyak Irijennya tidur tidak kerja. Maka sebelum program itu diluncurkan harus ada pedomannya ini, BPK ini ada temuan tahun lalu ini, ini jangan sampai lagi itu terjadi.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

Bapak Ketua, nomor satu terkait dengan temuan saya minta untuk diselesaikan kalau itu kerugian negara, disetor segera. Yang kedua, kami lakukan pengurangan alokasi untuk wilayah-wilayah yang memang modusnya terus berulang.

KETUA RAPAT:

Kalau modus ya memang terus berulang, cuman masakannya beda.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

Pak Ketua, kan misalnya pemalsuan benih jagung kan tetap itu-itu saja pemainnya Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Makanya kemarin saya bilang di Lampung banyak itu.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

Makanya itu yang kita gunting.

KETUA RAPAT:

Saya bilang sikat saja, tidak ada urusan.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

Yang ketiga Bapak Ketua, saya mengusulkan kepada Bapak Sekjen tadi pagi, "Pak, pengadaannya jangan diserahkan semua ke daerah, karena kita seperti tidak mengenggam apa yang menjadi kewajiban kita". Itu salah satu bentuk mitigasi kita.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau di daerah kan sama juga, anda tidak punya hak periksa kok.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN:

Betul.

KETUA RAPAT:

Saya juga sebagai fungsi pengawasannya saya susah juga, itu diruangan saya, nanti saya bawa contoh-contoh benih yang jelek, tapi dipaksakan sampai petani bilang daripada ini harus dijual lagi saja. Saya tidak mau terjadi seperti itu. Jadi alangkah dosanya kita kalau menipu petani, kita berbuat apa pun tidak ada gunanya kalau petani saja kita tipu. Petani itu berharap cuman satu, hasil panennya baik, *Insha Allah* dapat untung, bisa menyekolahkan anak, bisa makan dan pakaian yang cukup. Selanjutnya ada lagi? Cukup.

Terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan, selanjutnya kami persilakan ke Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapannya di persilakan. Tapi jangan melebar kemana-mana ini fokus anggaran sama isu-isu aktual.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Bapak Ketua, kalau boleh diijinkan saya sudah daftar tapi saya harus bergeser ke tempat lain.

KETUA RAPAT:

Ya sudah anda boleh duluan.

Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen yang saya hormati.

Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yang pertama terkait dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Bapak Dirjen salah satu Dirjen yang penyerapannya masih rendah itu adalah perkebunan Pak. Ada dua program prioritas disitu, kelapa genjah di perkarangan baru terserap 2,27% dan padat karya perkebunan baru 10,87% Pak. Saya ingat betul ketika refocusing dan realokasi saya memberikan atensi yang cukup kuat kemudian kedua program ini Pak. Pertanyaan saya Pak, apa kendalanya sehingga serapannya masih rendah.

Yang kedua, ini kita tahu dalam situasi krisis ini ketika penjelasan kali lalu dibilang bahwa memang sangat dibutuhkan program ini. Nah, saya kaitkan kembali dengan kemarahan Presiden Pak, kalau terlalu rendah itu berarti belum ada manfaat yang didapat oleh rapat. Nah, karena itu kemudian saya kembali bertanya urgency-nya apa program ini, efektifitasnya apa Pak.

Yang kedua, soal kopi Pak, tadi saya lihat di NTT itu ada ini di Dapilnya Ibu Juli itu di Manggarai dan di Kabupaten Ngada Pak. Sebenarnya ada juga masih di TTU itu di Eban. Saya ingin tanya Pak, ada beberapa isu terkait itu soal regenerasi kopi Pak. Nah, kopi di beberapa tempat di NTT ini, itu tidak mengalami proses regenerasi dan umuknya usianya juga sudah tua Pak. Penyebabnya karena pengetahuannya yang minim Pak, tidak ada program pendampingan dan kopi yang ada disana itu umumnya warisan dari orang tua, dari leluhur. Sementara sebenarnya potensinya ini luar biasa, kopi Manggarai dan kopi Ngada, kopi Bajawa itu bahkan sampai ke manca negara, keluar negeri.

Yang kedua, juga persoalan soal bibitnya Pak, karena minimnya pengetahuan itu kemudian bibit-bibit kopi itu pembibitannya dilakukan secara alami Pak. Nah, kita ingin betul ahli ini mendampingi masyarakat. Saya cek kelapangan yang mendampingi selama ini hanyalah LSM Pak, negara tidak hadir Pak.

Yang terakhir soal pengolahan pasca panen ini polanya juga masih sangat tradisional Pak, butuh sentuhan pendampingan. Kembali lagi Pak, tolong secara fokus saya menyebut kopi Eban, kopi Manggarai dan kopi Bajawa. Itu dua hal terkait dengan Dirjen Perkebunan.

Yang berikutnya terkait dengan Dirjen PKH. Bapak Dirjen, saya mau tanya ini soal ASF Virus Flu Babi yang menyerang beberapa tempat termasuk NTT, ini ceritanya sudah sampai dimana Pak. Saya dengar beberapa waktu lalu Bapak membuat sebuah tim ahli untuk mendapatkan vaksin kalau tidak salah Ketuanya itu Prof. Mahardika dari Bali. Saya ingin tahu progressnya seperti apa, apakah vaksin sudah ada, karena masyarakat di bawah itu tanya mereka menunggu.

Yang berikutnya soal restocking Pak. Restockingnya yang aman ini dari mana bisa didapatkan Pak, karena banyak juga yang sudah konversi dari peternak babi ada yang sudah kepeternak yang lain Pak. Dan dampaknya ini kepada peternak kecil dan juga UMKM yang olahannya adalah olahan babi.

Yang berikutnya soal laboratorium bio molekuler Pak. Ini juga penting sekali Pak, sehingga urusan-urusan virus seperti ini ke depannya tidak terjadi lagi atau kalau pun terjadi bisa disikapi secara cepat Pak. Masih ke PKH Pak, ya kita tahu bahwa kita ini deficit, impor terutama daging sapi dan daging kerbau dari Brasil dan dari India Pak. Pertanyaan saya sampai kapan kita mau impor Pak, kenapa saya tanya pandemic ini seperti kemarin saya ngomong, kebijakan negara di dunia itu menahan produk mereka. Melakukan politik outarkis itu yang sering saya omong. Mestinya pandemi ini merubah mainset dan paradigma kita untuk mengembangkan kekuatan yang ada di dalam kita.

Setahu saya kalau bicara soal kerbau kita punya potensi kerbau lokal Pak, di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan dan di kampung Bapak Johan ini di Sumbawa Pak. Bahkan ada professor kerbau itu orang Sumbawa yang belajarnya sampai ke Itali, kalau tidak salah Pak. Nah, saya ingin tahu apakah ada grand desain menyangkut upaya kita untuk mungkin secara sistematis mengurangi ketergantungan kita terhadap impor sapi dan kerbau ini.

Demikian Kyai Hasan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih.

Selamat berbicara anggaran dan selamat jalan.

Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, dan Bapak Kepala Badan dan juga Anggota Dewan yang tercinta.

Jadi yang pertama ingin saya ungkapkan pertanyaan kemudian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Hansi Lema tentang ternak local kita Pak. Rasanya Pak, dari dulu saya masuk Fakultas Pertenakan tahun 1967 itu sudah ada *mapping* bagaimana ternak-ternak local tadi yang perlu dikembangkan tapi akhirnya kok sekarang malah kita impor. Jadi ini yang kita pertanyakan

mestinya dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini sudah punya mapping tentang potensi ternak lokal kita.

Nah, kemudian yang kedua tentang anggaran Pak. Anggaran untuk optimalisasi reproduksi yang nilainya 464 miliar Pak, diperuntukan 4.100.000 aseptor. Nah, saya mohon penjelasan aseptornya itu tersebar dimana saja Pak, karena dari anggaran ini memerlukan biaya berarti per aseptor Rp113.171,00.

Kemudian yang ketiga ini Pak, yang ketiga tentang prioritas untuk Ruminansia potong. Nah, sekarang inikan sebetulnya sedang dikembangkan sampai ke kelinci Pak, yang sudah dihasilkan oleh Balai Penelitian Peternakan di Bogor. Nah, yang sangat disayangkan kenapa tidak ditangkap oleh Direktorat Jenderal Peternakan untuk mulai didesiminasikan ke tadi ke daerah-daerah yang bisa memenuhi persyaratan itu. Karena inikan bisa mengurangi impor seperti apa yang dikatakan Bapak Ansy Lema. Nah, untuk itu mohon perhatiannya dan *mapping*-nya.

Kemudian yang kedua, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Mohon maaf Pak, saya sependapat dengan Bapak Darori tadi bahwa benih-benih unggul itu harusnya disosialisasikan apalagi tadi Bapak kan dari Badan Litbang Pertanian tentunya sudah tahu persis bahwa di Badan Litbang Pertanian ada Balai Biogen, ada Balai Bio Teknologi yang sudah mulai dan sudah menghasilkan beberapa varietas-varietas unggulan. Nah, mohon Bapak Sekjen juga bisa memfasilitasi pedoman-pedomannya. Jadi kedaulatan pangan inikan mestinya ada kordinasi antar Eselon I dan malah saya sudah mencoba antar departemen Pak. Jadi pada waktu kami dapat bantuan dari Kementerian Perikanan kami sudah mencoba Pak, bagaimana mengemas makanan-makanan anti stunting dengan pola dasar makanannya dari ikan dan juga potensi local dari mokaf dan sagu Pak. Dan itu berhasil tapi tadi Pak, karena tidak pernah ada kordinasi yang baik sehingga hanya ditemukan oleh para peneliti-penelitinya saja. Padahal daun kelor kita ini Pak, di NTT dan NTB cukup banyak. Nah, itukan bisa dipergunakan untuk anti stunting.

Jadi mohon ada mapping juga Pak, karena tentu saja misalnya tanaman-tanaman yang sudah unggul ini tidak bisa ditanam di tempat lain seperti halnya tadi yang dikemukakan oleh Bapak Hansi Lema, misalnya tentang kopi tadi Pak. Nah, kemudian kelapa genjah ini Pak. Tadi sudah dipertanyakan kenapa hanya 2,27% padahal kita juga bisa membantu untuk desiminasi tentang produk-produk tersebut.

Kemudian untuk Badan Litbang Pertanian Pak, jadi tadi mapping itu perlu karena kemarin kita berkuat dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang memaksakan seolah-olah bahwa tanaman-tanaman selain padi itu akan dikembangkan di beberapa daerah, tapi mappingnya belum terbentuk. Nah, mohon Bapak Badan Litbang Pertanian ini bisa membuat mapping sesuai dengan *agro egologi zone* yang sudah kita ketahui bersama.

Nah, disini juga banyak sekali varietas-varietas unggulan dari buah-buahan yang belum dikembangkan secara baik, diantaranya salak, manggis, jeruk yang bisa diekspor sebetulnya. Nah, ini juga PR kita Bersama bagaimana untuk mengurangi impor buah-buahan dari luar negeri.

Kemudian untuk desiminasi hasil penelitian ini tentu saja kami berharap bisa bekerja sama dengan Badan SDM. Karena kita ketahui Bersama bahwa Badan SDM sudah mengelola wiraswasta milenial dan mohon para Anggota Dewan bisa mengecek juga daerah-daerahnya karena kemarin pada waktu saya di Bogor saya kedatangan beberapa milenial yang begitu aktif Pak. Nah, inikan sebetulnya bisa menjadi ujung tombak penggerak dari inovasi teknologi kita. Nah, mohon Badan Penyuluhan Sumber Daya Manusia dan Badan Litbang Pertanian bisa Bersama-sama untuk menggerakkan wirausaha-wirausaha muda ini.

Nah, tentang Badan Ketahanan Pangan. *Nuwun Sewu* ini Pak, jadi makanan local kita yang sudah dikenal di daerah masing-masing ini tergeser dengan adanya impor terigu yang bukan main Pak. Jadi Ibu-ibu kita sekarang sudah menyadari Pak, bahwa umbi-umbian yang ada di sekitar kita itu jauh vitamin dan manfaatnya daripada impor. Impor itu kan menyebabkan selain menyebabkan stunting juga menyebabkan kemunduran otak juga. Nah, ini sudah disadari Pak, tapi tadi sosialisasi dari BKP dan juga tentang kerentanan ini belum diakomodir oleh semua masyarakat. Nah, untuk itu BKP mungkin perlu lebih aktif lagi karena Ibu-Ibu kita sudah menyadari bahwa terigu atau gandum itu jelek dibandingkan dengan makanan-makanan local kita.

Nah, untuk Inspektorat Jenderal, selamat ini kepada Bapak Inspektur Jenderal wah asik ini. Pertama kali saya mengucapkan selamat, saya baru tahu kalau Bapak jadi Inspektur Jenderal. Nah, jadi tugas berat ini mohon Pak, tadi yang sudah dikemukakan oleh Bapak Ketua, di daerah inikan banyak sekali benih-benih yang dipalsukan. Iya, karena dulu adik kelas saya ini. Jadi mohon Bapak lebih gencar lagi bagaimana mengantisipasi itu karena saya juga malu Pak. Saya alumni dari Badan Litbang dan alumni dari sekolahan Bapak juga, kok tidak ada perubahan. Mudah-mudahan dengan Bapak Inspektorat Jenderal yang baru ini semuanya bisa diantisipasi dengan baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ustad Hermanto masih mau bicara Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Masih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Selagi masih Anggota DPR RI kita bicara Pak.

KETUA RAPAT:

Karena digaji untuk bicara.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Kalau Menteri digaji untuk kerja.

KETUA RAPAT:

Masuk barang, silakan.

Bapak Momon tolong dicatat Reses ini pertengahan Juli.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bapak Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI,
Bapak Sekjen Kementerian Pertanian beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan seluruh Dirjen dari kemarin dan juga hari ini, yaitu terkait dengan mengoptimalkan dan segera merealisasikan program-program yang berkaitan dengan masyarakat atau program yang selama ini sudah kita susun berkaitan dengan soal pencegahan COVID dan pemulihan ekonomi, ini harus segera direalisasikan. Kita ini menghadapi satu problem yang memang harus dimana yang Presiden sampaikan sampai marah-marah ini. Presiden kalau sudah marah itu kita lihatlah ekspresinya. Jadi saya minta ini segera direalisasikan.

Kemudian yang kedua, sekarang ini sebenarnya mekanisasi dan teknologisasi pengolahan pertanian kita ini sebenarnya sudah mengalami kemajuan, tapi saya belum melihat Alsintan-alsintan yang dialokasikan itu belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, ini saya minta ini nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan Dirjen yang hadir sekarang berkaitan dengan mekanisasi dan teknologisasi pertanian ini mohon diperhatikan. Terutama juga kita harus juga lebih maju teknologinya dibandingkan dengan negara-negara lain terkait dengan persoalan. Sekarang ini di negara-negara apakah kita sudah juga melaksanakan, waktu masa akhir Pak Amran dia juga sudah memaparkan bahwa teknologi pertanian kita ini sudah bisa menggunakan *remote control* melalui *computerized*. Dan termasuk juga program yang berkaitan dengan penyebaran pupuk melalui *drone*.

Nah, bila memang ini sudah sampai pada tingkat bisa dialokasikan ini harus segera dibuat saja alokasinya dan kemudian disusun saja anggarannya, terutama terkait dengan drone. Nah, ini supaya kita juga lebih

maju dan juga bisa mengandalkan produk-produk pertanian kita ini jauh lebih dibandingkan dengan negara-negara lain.

Kemudian terkait dengan soal yang ketiga, yaitu beberapa waktu yang lalu saya sudah mengunjungi DAM yang rusak di daerah Kelurahan Balai Gadang di Kecamatan Kota Padang itu. Pernah kita Bersama-sama itu mengunjungi lokasi itu dan perbaikannya sekarang sudah selesai, perbaikannya sudah selesai tinggal itu nanti urusan irigasi sekunder dan tersiernya. Nah, ini sekarang ini masyarakat yang di daerah sekitar itu ingin ada sentuhan dari Pemerintah supaya mereka bisa memanfaatkan lahan secara optimal, karena ini adalah lahan ini adalah Kawasan sawah yang bisa dimanfaatkan untuk kita optimalkan produktifitas hasil pertanian kita.

Kemudian yang keempat, saya ingin menyampaikan terkait dengan soal program yang disampaikan oleh Balitbang. Ini Balitbang ini kemarin juga ada keluhannya beberapa waktu yang lalu bahwa anggaran Balitbang ini dipotong sehingga kegiatannya tidak begitu optimal, sampai-sampai di daerah itu BPTP-nya berfungsi sebagai penyalur Bansos. Ini sebenarnya ini bukan kewenangan beliau dan bukan ranah kerja beliau. Nah, tentunya ini jangan sampai kita boros dengan kewenangan tetapi tidak sesuai dengan Tupoksinya.

Nah, saya minta juga ini ada secara jelas dan rinci, di halaman 4 ini disebutkan ada 128.240 ekor bibit ternak. Ini judulnya produksi nasional daging. Nah, ini tentunya di ternak ini tidak dirinci secara detail ternak yang mana ini, ternak inikan banyak, ada kambing, ada sapi, ada unggas dan lain sebagainya. Nah, kalau jumlah sekian 128.240 ekor ini bersifat abstrak sehingga juga tidak muncul anggarannya berapa, kan beda itu sapi, kambing, dan ayam serta unggas yang lainnya itu beda per unitnya. Nah, saya minta ini supaya diperjelas kemana saja ekornya itu.

Kemudian yang kedua ini terkait dengan Balitbang juga. Ada 2.157.426 pohon benih tanaman perkebunan. Ini alokasinya saya minta supaya ini ada pendampingan dari Anggota, karena ini juga terkait dengan efektifitas penyaluran benih pada alokasi-alokasi yang sebenarnya Anggota Dewan ini tahu persis dimana harus dialokasikan. Kemudian terkait dengan Ditjen PHK tentunya program-program yang sudah disalurkan selama ini terkait dengan sapi, terkait dengan pemeliharaan sapi ekspor ini di beberapa tempat memang sudah sukses, sudah melahirkan anaknya tapi anaknya inikan dibuntingkan dari sana, sehingga disini hanya tempat lahir sapi saja. Lahir yang keduanya yang berikutnya ini masih tanda tanya Bapak Dirjen, apakah perlu didatangkan pejointannya itu dari sana lagi atau seperti apa.

Saya menemukan di beberapa tempat itu untuk bisa melakukan penyuntikan itu juga mengalami kesulitan karena sapi ini sangat liar. Ketemu orang juga baru bisik-bisik sudah kabur dia. Nah, ini saya khawatir nanti jumlah target untuk penambahan daripada bibit sapi ekspor ini tidak memenuhi syarat. Jadi saya minta supaya ini bagaimana Bapak Dirjen ini bisa mengefektifkan supaya yang sudah lahir di Indonesia ini juga bisa lahir yang berikut-berikutnya. Saya juga sudah menyaksikan lahir sehat....

KETUA RAPAT:

Sudah 7 menit Prof.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terakhir ini Dirjen PKH juga, kita ini sudah banyak mengalokasikan sapi, baik sapi penggemukan, UPO dan segala macamnya. Sekarang peternak ini mengalami kesulitan pakan. Jadi ada baiknya mungkin ini adalah awal yang baik menurut saya Bapak Dirjen PKH supaya mengusulkan ada bank pakan. Bank pakan ini artinya untuk mencadangkan pakan, karena peternak ini juga keribetan mencari pakan kemana-mana. Nah, kalau disediakan bank pakan di satu titik itu kan bisa didrop pakannya ke kelompok-kelompok peternak.

Demikian Bapak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Kita break 30 menit, kalau saya beri kesempatan Mbak Luluk ini bicara, maka nanti setelah sholat dia hilang. 30 menit nanti kita lanjutkan kembali 13.30 WIB.

(RAPAT DISKORS)

(SKORS DICABUT)

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya Hormati bapak ketua, Anggota Komisi IV DPR RI, dan Bapak Sekjen beserta dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian, serta Hadirin sekalian yang saya hormati.

Yang pertama Dirjen Bun, saya kira dalam utama Kementerian Pertanian untuk Ekspor itu adalah Dirjen Bun hampir semua komoditasnya adalah Ekspor. Sawit saja 52 juta ton lebih target 2021, persoalan sawit kita sekarang ini adalah Pemerintah tidak berdaya melawan Negara-negara yang menuduh Indonesia tidak ramah lingkungan. Saya kira kita tolong sawit dengan B20, B30 tapi sampai saat ini harga juga masih turun terus, olehnya itu perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih strategis sehingga petani sawit ini tertolong oleh Pemerintah.

Sisi yang kedua adalah agar TBS sawit tidak merata di seluruh Indonesia, agar peraturan Menteri nomor 1 tahun 2018 tentang pedoman harga TBS ini diimplementasi secara tepat oleh seluruh provinsi atau TBS-TBS yang ada di Indonesia, olehnya itu Pak Dirjen saya minta mohon supaya ini menjadi pengawasan supaya mengimplementasikan harga sawit di seluruh Indonesia itu sama dengan yang tertuang dalam Permentan nomor 1 Tahun 2018. Tentu saja berbeda harga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, tapi selisihnya jangan terlalu besar. Kemarin di Sulawesi Barat petani Sawitnya Petani yang plasma dan yang mandiri itu demo di DPR RI mengenai persoalan ini.

Kemudian yang ketiga di Dirjen Bun ini saya melihat pagu anggarannya sudah benar, hanya saya melihat terlalu besar ditugas pembantuan 73%, Sedangkan di kewenangan pusat itu hanya 16%. Sering daerah tidak professional di dalam mengelola ini. Oleh karena itu, saya minta supaya Irjen juga bisa mengawasi ini utamanya tender-tendernya di tingkat provinsi. Ini karena 73% ada di, kalau bisa lebih banyaklah kewenangan di pusat supaya jangan terlalu banyak bawa ke daerah dan di daerah juga dimainkan.

Yang kedua ke PKH, konsumsi daging kita ini di Indonesia sebenarnya berapa.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Dirjenya belum ada.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Belum ada ya, okelah saya tinggalkan dulu.

Kemudian Balitbang, Balitbang apa yang tadi disampaikan Bapak Ketua saya juga stressing supaya ketergantungan bibit ini betul-betul adalah hasil olah, hasil penelitian yang dibuat di Balitbang, walaupun tadi sudah dijelaskan ada beberapa. Tahun 2020 kemarin banyak tenaga THL-nya yang mengadu kemudian saya tidak digaji, ya mungkin karena refocusing ya. Tapi saya minta tahun 2021 ditarik kembali supaya mereka yang bekerja kemarin itu mungkin apakah dirumahkan atau diapakan itu kembali ditarik karena mereka sudah punya pengalaman yang baik.

Begitu juga saya berharap bahwa Balai Benih di setiap provinsi itu ada. Kami di Sulbar ini bendahara Balai Benih, sehingga dengan demikian ketergantungan benih, baik padi, jagung semua masih berada di tangan data di luar daerah. Sedangkan satu sisi kami potensi cukup menjadi swasembada di sektor pangan. Kemudian Balai BPPSDMP, BPPSDMP saya juga meminta supaya Balai Pendidikan dan Pelatihan ada di setiap provinsi. Kalau BPPSDMP mau tanah saya kasih tanah, yang penting Bapak siap bangun Balai Pendidikan dan pelatihan di Sulawesi Barat.

Ketahanan pangan, saya ketahanan pangan ini bingung juga saya melihat ini. Fungsinya Bulog sedikit-sedikit diambil, fungsinya tanaman

pangan juga sedikit-sedikit diambil, atau sedikit-sedikit fungsi yang diambil oleh berbagai. Jadi di bagian mana ini ketahanan pangan sebenarnya fokus di dalam menyiapkan anggaran juga cukup besar, tapi saya melihat tidak fokus pada bidang tertentu.

Dan yang terakhir adalah PKH, sapi 438,82 ribu ton sebenarnya berapa kebutuhan konsumsi di Indonesia untuk daging sapi ini....

KETUA RAPAT:

Dirjen PKH-nya dimana, kalau ulang tidak usah dibahas untuk anggarannya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Kemudian pengembangan pakan ternak, ini cukup besar anggarannya begitu juga obat dan penyakit besar juga anggarannya. Saya melihat kalau kita butuh kendaraan, katakanlah kita butuh 5 kendaraan, tapi aksesoris yang lebih banyak dibeli, sehingga hanya bisa satu kendaraan yang kita beli.

KETUA RAPAT:

Itu mobil saya Pak, mobil saya Merci itu 800 juta.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Itukan aksesoris.

KETUA RAPAT:

Makanya saya bangun ruangan karaoke di dalam mobil saya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Jadi kalau aksesorisnya yang besar pokoknya tidak jelas, ini yang perlu kita perbaiki sistem penganggaran di PHK ini. Saya lihat Rp126 miliar untuk pakan, sapi mana yang mau dikasih pakan ini. Rp279 miliar untuk penyakit, sapi mana yang berpenyakit yang perlu kita. Di lain sisi saya tidak melihat anggaran yang besar untuk pengadaan sapi dan pengadaan ternak yang lainnya.

Saya kira saya belum masuk secara teknis hanya hal-hal yang mendasar yang saya kritisi kepada Bapak-bapak dan saudara-saudara.

Demikian, terima kasih Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Abdullah Tuasikal.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Yang saya hormati Ketua, rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen, Eselon I, beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hari yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan kembali seperti pada Rapat Dengar Pendapat yang lalu dan ini sangat cukup menarik soal diversifikasi pangan. Saya kira wilayah-wilayah kita sangat cukup berbeda, di Maluku, Maluku Utara memang ada petani sawah dan ini bersyukur bahwa di sana ada orang-orang transmigrasi, sehingga kita bisa menggarap sawah pada wilayah kita. Di lain pihak diluar itu, itu adalah penduduk-penduduk negeri yang sangat cukup jauh dari produksi atau persawahan. Ini yang juga harus menjadi perhatian dan saya kira bahwa Maluku dan Maluku Utara ini punya potensi lahan yang sangat cukup kuat. Di sini di tanaman pangan ini ada lahan pekarangan P2L, saya kira ini sangat cukup bagus. Tapi kalau untuk menggarap potensi yang sangat besar itu saya kira ini masih sedikit. Untuk itu, saya mengharapkan itu agar potensi-potensi yang daerah kita, pangan yang ada di daerah seperti ubi-ubian, singkong dan jagung itu juga akan menjadi perhatian khusus. Bukan karena COVID baru kita mulai, padahal bisa merupakan cadangan pangan nasional. Apabila kalau ada musim kekeringan atau ada hal-hal lain sehingga produktivitas beras menurun, maka masyarakat atau ketahanan pangan ada pada masyarakat ini bisa diperkuat. Dengan kondisi yang ada saya kebetulan di Dapil saya lihat masyarakat sudah mulai lahan-lahan tidur di pekarangan rumah mereka sudah mulai. Persiapannya apabila musim kekeringan atau kekurangan beras, maka mereka sudah siap. Untuk itu, saya mengharapkan agar program ini tetap saja dilanjutkan. Kenapa sawah atau apa segala menjadi skala prioritas, padahal pangan lokal yang lainnya seperti umbi-umbian ini juga sangat cukup potensi.

Yang berikut ini soal tadi PKH sudah ada ya? Nah, ini saya juga sering teriak juga ini. Ini sesuai data BPS, data BPS dari satu nasional 2,5 kg perkapita pertahun, jadi konsumsi total 653.294 ton sedangkan produksi nasional baru 404 ton atau kurang lebih sekitar ... ekor. Terjadi defisit sekitar 278.704 ton atau 124 juta ekor. Target produksi daging sapi, kerbau Kementerian Pertanian yang diprogramkan untuk tahun 2021 sebanyak 463 ton, maka masih terjadi defisit kurang lebih sekitar 220.294 ton. Ini saya kira perlu ada evaluasi terhadap mekanisme pemasaran, transportasi produk peternakan dalam peternakan local. Untuk itu, kepada Pak Ditjen saya kira yang diprioritaskan dan ini harus jalan pada peternakan lokal. Kita harus fokus

pada penggemukan, bayangkan saja kalau berapa atau sekian banyak kita adakan penggemukan itu maka di kali saja, kira-kira bisa produksi berapa ton, sehingga kita juga bisa memperkecil impor sapi.

Di lain pihak pada saat pengangkutan itu juga minimal ada sapi-sapi yang mau diangkut itu harus diperhatikan, karantinanya bahkan pakannya, karena kalau tidak dalam perjalanan itu sapi pasti sakit secara matematis beratnya juga berkurang. Saya juga sepakat kalau pakan sapi ini sudah waktunya harus diperhatikan, apalagi untuk peternak lokal. Bukan sapi saja tapi kandangnya juga sangat cukup penting. Kalau kita mau menyelesaikan soal ketergantungan kita pada impor.

KETUA RAPAT:

Pak Tuasikal cukup ya.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Sedikit lagi Pak, untuk itu bagaimana skema jangka panjang Kementerian Pertanian dalam upaya mewujudkan swasembada nasional. Mungkin satu lagi terakhir Pak, saya terus terang saja Pak Ketua, ini sangat cukup bagus. Tadi saya lihat Bapak Ketua, agak-agak belum mau tapi Bapak Ketua saya kira dengan COVID yang ada sekarang semuanya pada bimbang, tidak tahu kira-kira apa tapi ini yang sangat cukup tepat. Mudah-mudahan itu menjadi masukan dan kalau tidak berkeberatan khususnya untuk Bapak Ketua, mohon maaf Bapak Ketua, kalau bisa masuk dalam program. Dan ini bukan untuk Komisi IV DPR RI, tapi kalau bisa distribusi ke masyarakat, kalau setuju.

Saya kira sementara Ketua, mohon maaf.

Terima kasih waktu dan kesempatannya.

KETUA RAPAT:

Hal yang paling penting dari kata-kata Bapak Abdullah Tuasikal adalah khusus untuk Maluku, Maluku Utara dan Papua diberikan alokasi yang lebih khusus umbi-umbian untuk kepentingan ketahanan pangan, itu yang penting ya Pak. Pak Suhardi Duka mau ngomong satu menit tadi masalah PKH, Dirjenya sudah datang, tidak perlu, cukup.

Selanjutnya Bapak Johan Rosihan temannya Mbak Luluk.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi IV, jajaran Eselon I Kementerian Pertanian beserta jajarannya.

Pertama, menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Ketua di awal soal kesejahteraan petani dan ini juga sudah kita bicarakan kemarin, karena ini juga semuanya Eselon I juga ada, kemarin juga sudah kita tetapkan ini soal menjadikan kesejahteraan petani itu sebagai acuan kita dalam membuat program dan kegiatan. Dan ini sudah menjadi kesepakatan Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI juga Pak, menjadikan ... itu sebagai acuan. Nah, inikan ada dampaknya. Saya tadi sudah mendengar dari Badan Ketahanan Pangan itu ada distribusi, subsidi dalam distribusi harga ini menarik sebenarnya kalau kita, seperti itu mungkin terobosan-terobosannya mungkin perlu didukung hal-hal seperti itu.

Terus yang berikutnya, ke perkebunan. Pak, saya kemarin betulan sejak COVID itu baru pulang kemarin dari Dapil. Saya didatangi sama petani-petani kopi dulu masyarakat di Tega itu sudah tidak mau tanam robusta, karena produktifitasnya rendah, kalah dibanding dengan robusta dari sisi yang produktifitasnya tinggi. Tetapi setelah Dia memberikan penyadaran kepada masyarakat, memberikan contoh tanam yang baik, ternyata hasil arabika juga tidak kalah dibanding dengan robusta. Nah, karenanya mungkin kita minta tambahan lahan sekitar 400-600 hektar di daerah Tega itu pada ketinggian sekitar 1000, Tega-Sumbawa, itu perkebunan.

Terus yang berikutnya Pak Badan Ketahanan Pangan. Saya kemarin diundang sebagai narasumber berdiskusi di Pasca Sarjana Universitas Mataram. *Alhamdulillah* ada beberapa Profesor, Doktor disitu pegiat ketahanan pangan ini, akhirnya dari diskusi panjang kita membuat kesimpulan bahwa ingin kita membuat semacam *pilot project* Desa Mandiri Pangan Terintegrasi. Proposalnya sudah ada Pak, nanti kita coba sempurnakan, tapi mungkin sekitar 20 desa dulu kita uji coba, nanti kita integrasikan baik itu pertanian, kelautan, dia terintegrasi tapi basisnya desa Pak, kalau Pak Ketahanan Pangan tadikan basisnya keluarga. Saya khawatir sudah basisnya kecil terus titiknya juga sedikit, inikan bisa menjadi pertanyaan orang, jangan-jangan nanti ini program kelompok-kelompok tertentu nantikan. Kalau sedikit kalau ada program yang bagus diminati oleh masyarakat Bapak harus pikirkan berbasis Dapil, jangan berbasis apa namanya jumlahnya 20 titik Anggota saja 50 Pak, 50 kali 5 gitu loh atau berapa kali 10, perbanyak dia. Kalau misalnya Bapak anggap itu sebagai bisa mengangkat pertanian atau ketahanan pangan di tingkat keluarga, jangan 20 titik nanti kita telisik nanti itu, panjang ceritanya Pak Ketua, nanti diambil orang-orang yang berniat jahat, kita tidak tahu. Tapi kalau misalnya dia berbasis Dapil dikali dengan jumlah yang banyak *Insyallah* Pak, kita tidak akan sempat menelisik lain, karena kita kan apa namanya mensukseskan apa yang kita usulkan.

Terus yang berikutnya, saya kaget di PKH, ini justru yang realisasinya nol ini, ini yang menjadi aktivitas masyarakat, yaitu di slide tentang kegiatan prioritas Dirjen PKH tahun 2020, pengembangan ternak ruminansia potong realisasinya nol. Tadi sudah banyak bicara sapi, bicara segala macam ini. Saya juga baru dari Dapil Pak, Dapil saya ini salah satunya sentra ternak, baik sapi maupun kerbau. Kenapa kok bisa nol ini, bapak apakah anggaran ini, mau diapakan, tolong dijelaskan kenapa masih nol sampai sekarang. Nah, saya tadi sambil informal sudah cerita Pak Ketua, di Sumbawa itu sudah

ditetapkan secara nasional sebagai pusat pemurnian sapi Bali. Tapi lihat sekarang termasuk di UPT Bapak yang di Doro Canga itu yang tidak terurus kantor-kantornya. Sapi Bali kita itu sudah kalah, karena pejointannya adalah lembu. Kalau dulu kalau kita lihat di Doro Canga itu sapi Bali itu, sapi warnanya kuning kayak pakai kaos kaki putih, sekarang sudah putih semuanya Pak.

Nah, karenanya Pak Dirjen, tolong kasih kami itu pejointan sapi Bali, nggak usah kasih saya lewat dinas lah, kalau saya juga tidak apa-apa. Kerbau di Sumbawa Pak tahun 70-an, tahun 80-an Sumbawa itu ekspor kerbau, sekarang sudah jadi kayak kakaknya kambing. Tolong kembalikan potensi-potensi lokal ini agar dia kembali Berjaya Pak, di Sumbawa itu di Kecamatan Maronge ada laboratorium kerbau, tapi itu punya Pemerintah Daerah yang kurang dikembangkan. Saya usulkan Pak Dirjen, supaya UPT kerbau di Sumbawa, ada UPT kerbau tadi Pak Hansi Lema juga sudah bicara tentang potensi, baik sumber daya kerbau sendiri maupun sumber daya manusia untuk mengembangkan itu. Jadi mungkin itu Pak, yang saya sampaikan Pak Kepala Badan Ketahanan Pangan nanti saya kita kan coba tindaklanjuti, beberapa rekomendasi kita Bapak sudah bicara BumDes tadi. Kalau BumDes ini kita bawa untuk mem-*backup* Desa Mandiri Pangan ini keren Pak. Nanti coba saya akan saya inikan secara teknis kepada Bapak.

Perkebunan banyak Pak, tadi ternyata yang tidak terealisasi itu adalah kelapa genjah. Saya cari-cari dari dulu kelapa ini Pak, ternyata ada di Bapak tidak terealisasi. Itukan sampai 140 butir potensinya Pak, buahnya itu sampai tanah. Kita buat, kita bagi itu kepada masyarakat kita untuk mengisi pekarangan-pekarangan mereka itu *Insha Allah* itu bisa menjadi solusi untuk menghiasi program kita di Desa Mandiri Pangan, Keluarga Pangan Sejahtera segala macam itu.

Terima kasih Pak Ketua, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wa'alaikum Salam.

Sebagaimana kemarin dan hari ini Pak, bagaimana target 2021 itu dari masing-masing Eselon 1 ini ada kebijakan salah satu lah dan mungkin dari 51 kebijakan yang luar biasa sebagaimana Pak Presiden berfatwa saat marah. Coba kalau kelapa ya mari kelapa di provinsi mana kan itu Pak.

Ustad Haeruddin sudah meninggalkan tempat, Raja Bugis Andi Akmal silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Bugis Ibu Luluk, karena Makassar sama Bugis itu beda Ibu Luluk.

Baik, yang pertama Dirjen Perkebunan. Pertama, saya setuju Pak Ketua tadi Komisi VI DPR RI meminta inventarisir Pak, perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban 20% pertanaman. Saya minta Pak Dirjen, nanti diberikan kepada Pak Pimpinan Komisi agar nanti kita bisa melihat. Seperti di kami juga ada Makassar Tene yang gula rafinasi itu kita tidak tahu di mana kebunnya, kan gitu ya. Jadi saya kira perlu kita terbuka Pak, apalagi sekarang di era digital ini ya.

Yang kedua, selama saya 6 tahun di Komisi IV DPR RI Pak Ketua, mungkin sama-sama belum pernah kami ini mendapatkan apa namanya Bansos atau aspirasi dari Dirjen Perkebunan, 6 tahun saya di Komisi IV DPR RI ini. Jadi apa alasan saya untuk menyetujui anggaran ini kedepannya gitu. Nah, saya melihat kalau kita melihat anggaran Dirjen Perkebunan ini hampir 90% di tugas pembantuan. Asal Bapak tahu bahwa selama ini permasalahan banyak di pengadaan di Provinsi, di Kabupaten itu, petani mengeluh bibit benih tidak sesuai dengan yang diinginkan karena pengadaan asal-asalan, ini proyek semuanya Pak. Ini kasihan rakyat kita diatasnamakan petani tapi mereka dapat barang yang tidak bagus, karena itu Pak Irjen yang baru Bapak Gatot ini diawasi Pak. Sepakat tadi kalau perlu ditarik sebagian anggaran kemudian pusat ini. Jadi Pak Dirjen Perkebunan, saya mohon nanti Pak, semua bantuan Bapak basisnya adalah Dapil, kalau tidak kita tidak setuju anggarannya Pak. Ya karena kami dari 50 Anggota Dewan ini punya komoditi-komoditi tertentu, misalnya ada cengkeh kami di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Selatan 2 ada kopi, ada cengkeh, ada kakao. Kalau Bapak bagi-bagi bibitnya kita tidak tahu dimana kelompoknya, siapa yang terima ya bisa saja katakan ini tidak bisa kita setuju. Jadi kedepannya Pak, Bapak berikan kepada Komisi IV DPR RI ada yang bisa dibagi kepada masyarakat.

Bapak Kepala Badan BKF ini kelihatannya badan tapi bagi-bagi masyarakat banyak. Kita ini Komisi IV DPR RI ada gunanya untuk konsituen Pak, untuk apa kami Anggota DPR RI kalau tidak ada guna-gunanya bagi masyarakat. Itu uang rakyat Pak, uangnya rakyat kit abagi-bagi kepara rakyat itu melalui kami tentunya sebagai Anggota Komisi IV DPR RI. Jadi Bapak Dirjen ini catatan Pak, supaya tahun ke-6 ini Pak, bisa betul-betul kita bagikan.

Kemudian yang selanjutnya, tadi saya kira Pak Kepala Badan Ketahanan Pangan dijelaskan saja seperti apa distribusinya itu Pak, karena ini sesuatu yang baru, punya Bapak anggaran, kemudian bisa memutuskan atau bisa distribusi, bisa lancar ke daerah yang kekurangan.

Kemudian mengingatkan lagi Pak Ketua, kemarin kita ada pemotongan, ada realoksi, ternyata ada beberapa eselon I Pak Ketua dan juga ada aspirasi dari daerah. Saya kemarin dari Makassar, ada beberapa

ternyata tenaga harian lepas yang di rumahkan, karena tidak ada anggarannya. Saya kira saya sepakat Pak Ketua, tadi perlu kita melihat juga satuan 3 kok bisa nggak masuk dalam perencanaan. Atau memang anggarannya mungkin kemarin kita relokasi tanpa melihat mereka punya kebutuhan. Kalau saya Pak Ketua dan Pimpinan, Anggota, kita cari solusinya Pak. Jangan ini masalah nggak ada solusinya, kira-kira apakah memang Dirjen yang lainnya tidak bisa terserap, bisa kita alihkan ke Eselon I lain yang kira-kira kebutuhan untuk tenaga harian lepas ini bisa dipenuhi. Jangan sampai di masa pandemi COVID ini ada orang di PHK gara-gara tidak ada anggaran. Itu mungkin catatan Pak Ketua dan kita semuanya, ini menjadi perhatian Komisi IV DPR RI.

Kemudian terakhir kepada Pak Irjen, Bapak Irjen kita berharap betul-betul juga Pak, Undang-Undang yang dihasilkan DPR itu Pak diinventarisir yang mana yang dilanggar oleh apakah swasta atau Pemerintah. Di Komisi IV DPR RI inikan penghasil Undang-Undang, jangan sampai kita membuat Undang-Undang lama, anggarannya besar, tapi ternyata dilanggar, ini apa gunanya kita buat Undang-Undang. Undang-Undang RIPH misalnya kemarin, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Petani dan Nelayan, itu betul-betul perhatian sehingga Irjen ini bisa memberikan masukan kepada Komisi IV DPR RI bahwa ini ada berapa Undang-Undang atau Pasal-pasal yang perlu penguatan dan dukungan dari Komisi IV DPR RI agar bisa ditegakkan aturannya Pak, ya kan seperti itu.

Saya kira demikian saja Bapak Ketua, karena yang lain sudah bicara teknis tadi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Wa'alaikum Salam.

Tadi kalau yang mengatakan ada THL di Litbang itu di rumahkan, coba saya mau tahu serapannya berapa, belum sampai 50%. Saya minta satuan 3 ayo kita bedah, jangan hanya ngomong THL di rumahkan-di rumahkan. Makanya sekarnag ini polanya kita rubah, apa programnya, targetnya berapa, tujuannya apa, berapa duitnya, itu termasuk semua komponen. Jadi seolah-olah Kepala Litbang ini menyalakan saya, bahwa salahnya sayalah yang memotong. Saya katakan juga Litbang itu urusannya hanya Litbang. Perlu diketahui juga Litbang di periode yang lalu mengadakan ayam, ada tidak temuan ayamnya, coba tanya Pak Irjen. Jadi sudahlah tidak usah diungkit lagi semua orang dikasih tahu bahwa THL ini harian lepas sudah di PHK, coba anggarannya baru persen, ayo kita bedah untuk apa saja duitnya. Kalau kita mau bicara secara terbuka buka-bukaan kita sini, masih ada data di handphone saya. Saya sudah bilang seolah-olah semuanya menyalahkan saya, bahwa saya yang memotong, saya tidak memotong yang memotong Pemerintah Rp7 triliun, itu saja.

Silakan Pak.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Sedikit Pak Ketua, mungkin saya sedikit minta waktu bahwa publik harus tahu bahwa ini bukan pemotongan dari DPR RI, bukan hanya Ketua tapi kita Komisi IV DPR RI ini mungkin memandang bahwa ada program-program yang tidak terlalu mendesak, sehingga kita kemarin realokasi. Saya kira itu fungsi DPR RI Pak Ketua, fungsi DPR RI kita gitu kan. Kalau misalnya memang saya sepakat tadi Pak Ketua, bahwa kita perlu melihat kalau memang ada anggaran yang tidak terserap itu mungkin bisa diarahkan nanti kepada seperti tadi memang kalau kekurangan anggaran untuk THL kalau memang ada ya. Seperti saya katakan tadi bahwa kita tentu juga Anggota DPR RI menerima aspirasi, saya kira tidak ada masalah dan kita akan melihat nanti data-data yang ada.

Itu saja Bapak Ketua, demikian terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Bapak Andi, mekanismenya kita tahu, pemotongan anggaran dilakukan dalam Rapat Kerja, betul? Apabila ada realokasi kembali harus ada Rapat Kerja lagi, bukan kita yang memutuskan, kedua belah pihak, betul Sekjen. Jadi nanti kalau pulang Eselon I nya di briefing lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi 2021 sudah tidak ada mis komunikasi, sinkronisasi itu penting.

Ibu Luluk silakan dari pada ngemil saja, silakan.

Jadi kita melakukan pengawasan dan mengadvokasi ini dari Sabang sampai Merauke, Singapore tidak masuk Tupoksi kita.

Silakan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Sekjen, Bapak Dirjen yang saya hormati.

Ini karena tadi jatah saya disabotase jadi bingung yang mau diomongkan apa. Baik, yang pertama mungkin saya mau sampaikan yang terkait dengan Dirjen Perkebunan. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi saya kira perkebunan itu memang berkontribusi sangat besar bagi ekspor pertanian di Indonesia, benar ya. Dari beberapa komoditas utama mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu tetapi ada satu hal yang menurut saya justru ini menjadi keprihatinan kita semua, karena diantara komoditas perkebunan ada yang justru kita impor dari waktu ke waktu, dari abad ke abad

tidak pernah berubah, yaitu gula. Nah, di sisi lain ternyata target produksi dari yang Bapak sampaikan tadi juga masih sangat sedikit dibandingkan dengan ketergantungan kita atas importasi gula. Nah, ini bagaimana sebenarnya mungkin reasoning-nya antara target produksi dan kemudian kebutuhan konsumsi gula dan kemudian apa ketergantungan kita kepada impor, ini kok jauh banget gitu Pak, rangenya. Padahal *ngapunten* ini kita tidak ngomong tentang situasi flash back masa lalu meskipun saya mau mengatakan bahwa di zaman Belanda saja tahun 1930-an kita ini produksi gula itu sudah 3 juta ton, tetapi hari ini juga kita malah kurang dari itu. Artinya dari kurun waktu yang sangat lama ratusan tahun kita bukannya makin membaik seharusnya semakin membaik, tetapi ternyata juga tidak, meskipun ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhinya.

Pertanyaan saya sebenarnya Bapak, Apakah kita ini memang yang pertama tidak memiliki varietas tebu yang sangat bagus, yang unggulan, yang bisa kita hasilkan sendiri, yang itu memang cocok untuk ditanam di alamnya kita, ataukah justru karena memang kita melakukan penyeragaman apa yang ditanam, jadi semua daerah diatur sama dengan varietas yang sama yang itu padahal kemudian hasilnya akan berbeda. Jadi pasti berbeda kalau varietasnya sama tapi ternyata kondisikan beda antara timur, barat, NTT atau kemudian Jawa, Jawa saja ternyata juga bisa beda, Madura dan seterusnya.

Terus kemudian yang kedua, ada juga temuan ini yang justru yang menyampaikan justru dari badan apa namanya pertanian USA. Salah satunya adalah petani kita yang memang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi penanaman tebu yang memang dibutuhkan. Yang pertama karena memang kondisi lahan tanah itu sudah jelas berbeda dibandingkan sekian tahun yang lalu, tetapi cara bertanamnya ini tidak berubah. Nah, ini nanti nyangkutnya ke SDM Pak, apakah kemudian di lembaga Bapak ini ada pendampingan secara khusus agar produksi tebu kita ini bisa menjadi lebih baik, baik itu SDM-nya, petaninya mungkin juga penyuluhnya, penyuluhnya jangan sampai kemudian malah tidak tahu apa-apa terkait dengan apa namanya komoditas tebu ini dan cara bertanam tebu yang bagus.

Kemudian yang berikutnya, mungkin bukan di komisi ini tetapi ini karena kemarin aspirasi Pimpinan, saya harus menyampaikan karena saya ketemu dengan Asosiasi Petani Tebu. Bagaimana kemudian nilai tukar petani ini juga akan bisa dinikmati juga oleh para petani tebu ini, karena dari catatan mereka sekian tahun terakhir mereka ini nasibnya tidak semanis tebu yang mereka hasilkan, tetapi rasa tebu itu ternyata pahit buat mereka. Nah, Kementerian ini bagaimana bisa memastikan bahwa ketika panen mereka tidak kemudian mengalami jatuhnya, harga itu yang selalu terjadi Bapak, ini juga nanti nyambungnya di sektor yang lain. Ketika tadi dibilang ada surplus, misalnya kayak bawang tapi ternyata tempo hari ketika terjadi apa namanya surplus produksi, produksinya itu berlebih tapi ternyata harganya itu juga turun ke bawah, gimana sih sebenarnya kondisi seperti ini tidak terjadi terus-menerus begitu, sehingga dia bisa bikin orang frustrasi. Saya tidak ngomong tentang Dapil sebenarnya Bapak Ketua, tetapi hanya contoh karena yang saya temui itu ada dua, jadi petani di Brebes sama kemudian di Sragen, jadi

ini kita lintas Dapil. Ternyata mereka sebagian sampai kemudian mengatakan apa kita alih saja deh kemudian komoditas, karena tidak cukup buat mereka untuk bisa bertahan dan kemudian menikmati hasil itu. Jadi ini pertanyaan yang selalu terulang.

Kemudian yang berikutnya Bapak, kalau misalnya sektor perikanan kita mengenal istilah *cold storage*, kalau tempo hari kita juga dengan KKP. Nah, apakah Kementan ini juga punya semacam gudang-gudang atau tempat penyimpanan yang bisa menyerap hasil sayuran, kemudian menyerap hasil buah-buahan, yang kemudian ini kemungkinan bisa untuk menjaga biar tidak terjadi fluktuasi harga yang tajam, karena apa? kita bisa simpan itu pada saat tertentu ini kita bisa keluarkan, mungkin pada saat buah-buahan tertentu atau sayuran tertentu itu tidak bisa diproduksi. Ini contoh saja yang paling sederhana masa Maroko itu *nyuwun sewu* tidak sehebat negara kita punya, tetapi mereka bisa menjaga yang namanya stok pangannya di empat musim yang berbeda, sementara luas lahannya ini tidak bisa dibandingkan dengan kita dan dengan tingkat stabilitas harga yang jauh lebih baik. Jadi tidak ada bedanya mau musim kemarau, musim panas, musim salju, macam-macam gitu tetap gitu Pak, karena sudah terukur berapa sebenarnya rata-rata konsumsi warganya, berapa sih dibutuhkan dari misalnya beras atau jagung dari buah, itu kan ketahuan. Nah, kita punya tidak data itu, data konsumsi, data produksi, gitu ya dan kemudian juga stok yang tersedia.

Saya kira itu ya Pak Ketua ya, selebihnya mungkin terakhir sekali tentang penyuluh karena tadi ada BPPSDMP. *Nyuwun Sewu* Bapak, saya jarang sekali menemukan penyuluh-penyuluh kita di lapangan, banyak sekali Poktan yang kemudian menyampaikan ke saya karena saya tanyakan ke mereka pernah tidak ketemu dengan penyuluh, dia bilang “belum pernah ketemu sama penyuluh”. Jadi mohon disampaikan, penyuluh itu ketemunya itu harusnya di kebun, di sawah, di lading, kalau malam itu dengan mereka, tapi kalau penyuluh tidak di tiga ruang waktu ini berarti kita tidak tahu ada dimana mereka. Jadi ini mungkin masukan dari kami ya Bapak, biar nanti ceritanya tidak selalu indah tapi itu fakta selama 3 bulan di bawah kita tidak menemukan penyuluh itu mendampingi petani kita.

Saya kira itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ibu Riezky, silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak-bapak, saya takut salah baca Pak. Jadi pertama saya ingin bertanya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, di sini kan kegiatan mendukung pencegahan penularan halaman 16. Saya, kami, sudah melihat hasilnya Pak, hasil yang Bapak tapi apakah pertanyaan saya kapan

masyarakat merasakan hasil yang Bapak sudah invented, sudah Bapak temukan.

Kemudian ini agak Panjang Pak, kayaknya lebih dari 3 menit. Nah, di dalam halaman 7 program dan kegiatan 2021. Saya mencoba mengikuti cara berpikir Pimpinan disitu bahwa program kegiatan 2021 di halaman 7 itu targetnya salah satunya teknologi pasca panen dan mekanisasi 26 teknologi. Pertanyaan saya penemuan Bapak, apakah digunakan oleh PSP atau TP, itu yang pertama. Kedua, di sini ada tulisan model korporasi dan spesifik lokasi 48 model, apakah ini juga bagian dari Tupoksi Litbang. Kalau memang betul tolong diberikan, ini bicara target karena nanti target program kerja Bapak terkait anggaran, begitu Pimpinan itu pertama.

Kemudian ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Saya sepakat tadi beberapa teman-teman juga sudah mempertanyakan bahkan Pimpinan mempertanyakan. Yes, yang halaman 12 program wirausahawan muda, tadi eyang putri juga mempertanyakan itu. Tadi Bang Johan bilang ada 50 Anggota Komisi IV DPR RI yang kami yakin Pak Sekjen juga tolong di garis bawahi, kami ini punya anak-anak muda. Pertanyaannya tadi coba dibuka dulu deh ada berapa banyak wirausahawan muda yang sudah dijalani. Saya punya konsep kok, Pak Johan punya konsep, bagaimana me-maintenance para petani ini Pak, kan begitu. Bapak kan juga tidak mau jadi temuan BPK barang-barang yang Bapak berikan ke kami ini nanti tiba-tiba kemana barangnya tidak jelas, kan begitu bener tidak Pak.

Nah, ini agak panjang saya mau bicara kepada Dirjen BUN. Oke Pak, begini Pak, saya mau bahas permasalahan sawit. Saya hanya mengingatkan kepada Pimpinan, beberapa periode sebelumnya, masa sidang sebelumnya saya termasuk orang yang meminta ada Panja terkait BPDPKS katanya waktu itu, karena saya mempertanyakan Pak, Bapak bicara sawit dengan banyak hal, saya Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muba, Banyuasin itu sawitnya banyak Pak, tapi kalau Bapak cek langsung ke lapangan apakah perkebunan sawit ini memiliki fasilitas yang memadai untuk masyarakat di situ, saya pengen tahu di mana tempatnya Pak, karena saya di lapangan terus Pak, kan begitu. Enggak ini bener Pak, karena kasihan Pak, Kalau Bapak-bapak tidak perlu beranak Pak, kami ini perempuan ada beranaknya Pak, bukan sapi doang yang beranak Pak, kan begitu. Jadi penting juga Pak, karena kan saya baca dari tadi BPDPKS kalau tidak salah baru pergantian juga ya. Saya minta dihadirkan Pak, itu direktornya biar clear gitu loh. Apalagi kalau Pak Dirjen jadi apa? Komisaris atau bagaimana Pak, Dewas? Bapak ngawasin bagaimana pertanggungjawaban pengawas itu kayak gimana, jangan kayak dewas TVRI nanti Bapak kena bubar. Saya minta Pimpinan jangan kita ini, Panja dulu Ini masalah sawit ini. Saya termasuk daerah yang lahan sawitnya banyak, tetapi CSR-nya kemana, terus bicara yang 50 Dolar katanya per ton itu apa realisasinya buat masyarakat sekitar situ, tidak ada Pak. Mungkin Bapak Boleh tidak percaya atau kapan Bapak bareng saya, kita turun kita cek bener Pak, siapkan fisik saja Bapak.

Terus kemudian, tidak begini Mbak Luluk ya, Mbak Luluk tidak punya sawit, saya ini dikomplain masalahnya, itu loh. Kita di luar berteman Bapak-

bapak, kita ketawa betul, tapi masyarakat saya menangis saya tidak bisa juga Pak. Nah, kemudian saya mengapresiasi kemarin saya dapat laporan dari BUN di provinsi, Bapak mengirim Sesdit Bapak untuk turun mengecek masalah karet. Saya ini Kebetulan di handphone saya itu setiap hari Pak, diupdate terus, saya di invite ke grup harga karet sampai pusing saya melihatnya. Nah, petani Karet ini naik turunnya harga karet inikan masih dipengaruhi pasar luar negeri, bener tidak Pak. Nah, yang berdampak turunnya juga sama petani hari ini Pak.

KETUA RAPAT:

Saya jelaskan Ibu Kiki sedikit.

Harga karet itu fluktuasi tergantung juga harga minyak bumi. Jadi harganya itu tergantung juga lelangnya di Belanda. Jadi bukan hanya karena komoditas satu tapi ada kaitan dengan komoditas tadi itu, kalau harga minyak dunia turun pasti dia turun, kalau naik biasanya agak naik, betul.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Kenapa saya bahas? Disini di halaman 3, sawit, karet Pak, target produksi Bapak di situ juga besar, bener tidak Pak. Tapi jangan target produksi petani karetnya Pak, sedih Pak. Masa kita tidak punya solusi untuk pasar dalam negeri Pak. Saya pernah dengar janjinya katanya mau buat jadi aspal, sampai sekarang kalau saya balik ke Sumsel ketemu petani karet dimaki-maki saya Pak. Mana ini, mana, padahal yang janji siapa, yang ini siapa. Nah, untuk mengatasi penderitaan petani karet ini Pak, kenapa saya bilang penderitaan, menderita mereka itu, walaupun tadi Pak siapa tadi yang ngomong, coba diajak turun bener ayo saya mah dengan senang hati. Saya mengusulkan kepada Dirjen BUN agar program bantuan pada sub sektor pengolahan dan pemasaran pada saat saya kemarin ada Reses itu bicara UPPB. Nah, bantuan program hilirisasi karet pada tingkat kelompok tani untuk menghasilkan barang setengah jadi maupun barang jadi yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk menghargai harga karet mentah atau lateks. Saya bicara bukan ngarang Pak, saya ketemu dari petani sampai ke provinsinya saya sudah tanya, apa permasalahannya, kan begitu. Saya yakin di wilayah Pak Pimpinan juga ada itu karet, jadi ujung Aceh itu dari tempatnya Bang Salim sampai tempatnya Pak Sudin itu semua karet ada.

Kemudian terakhir Pak, saya lihat di peta Bapak ini juga bicara kopi, Food Estate ya tadi tadi sempat ada pembahasan. Saya dari awal agak untuk masalah Kalimantan Tengah itukan gambut ya sebenarnya, lahannya lahan gambut yang mau dipakai, bener tidak sih? Bener, karena di berita beda nih. Karena gini Pak, saya tahu Kopi Liberika ini tumbuhnya di lahan gambut, benar tidak Bapak Fajri, rawa sama gambut beda tipis Pak, oh beda, ya sudah salah saya Pak, mohon maaf. Saya kalau salah, salah saya ini yang susah kalau yang salah tidak ngaku salah. Nah. Maksud saya Pak, Liberika inikan Bapak taruh Pak kasdi perluasan Kopi Liberika 200 hektar 1 Provinsi Riau, di halaman 21 Bapak baca. Yang punya gambut Pak, bukan cuma Riau, Sumsel itu ada banyak juga gambutnya Pak, bukan Liberika inikan bisa jadi

komoditi saya tahu harganya mahal Pak. Gambut itu intinya yang ada gambut jalan nih barang, kan begitu Pak. Jadi itu Pak, pesan saya jadi mohon Bapak kegiatan dan lokasi pengembangan kopi itu tadi dari NTB bicara Robusta saya fokus di Liberika. Supaya apa? pemetaan Bapak konkrit ke depan, dari kemarin saya sudah minta Pak Momon tolong peta komoditinya clear, supaya kita enak ngomongnya, supaya kedaulatan dan ketahanan pangan itu subsidi silangnya dimana baru kita bicara impor, baru bisa kita ngajak ngobrol Bapak Badan Ketahanan Pangan. Ini petanya tidak ada, ini peta buta Pak.

Itu saja, terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak Effendi, ada Bapak Effendi Sianipar? Oh, sibuk.

Silakan Ibu Renny Astuti, salam kenal dan selamat datang di Komisi IV DPR RI.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.PN.):

Terima kasih Pimpinan.

Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Rini Astuti Pak, saya baru 10 hari ada di Komisi IV DPR RI ini, pindahan dari tetangga sebelah Komisi II DPR RI. Bapak, selama 10 hari saya di Komisi IV DPR RI

KETUA RAPAT:

Dapilnya Ibu.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.PN.):

Saya satu Dapil sama Ibu Kiki Pak, sebetulnya apa yang akan saya tanyakan ini sebagian besar ditanyakan oleh Ibu Kiki, tapi saya kemarin kebetulan Kundapil Pak, jadi saya ada tambahan sedikit menyampaikan aspirasi masyarakat. Selama 10 hari saya baru 10 hari ada di Komisi IV DPR RI ini, saya baru dua kali fisik, karena ada di Dapil, saya mengikuti secara virtual. Ini ada sedikit pertanyaan Pak, untuk yang saya sampaikan kepada Dirjen BUN mengenai karet Pak, Kalau tadi Mbak Kiki sudah menanyakan sawit, jadi itu sudah terwakili Pak. Betul kata Mbak Kiki kalau Bapak siapkan fisik untuk datang ke Dapil kami, karena Dapil Sumsel I ini Pak Dapil yang sangat berat Pak, apalagi untuk kaum perempuan Pak. Dapil kami ini sebagian besar daerah perairan Pak dan untuk mencapai ke Dapil itu kami harus memakai speed boat Pak, itu yang paling jauh itu ada sampai 7 jam naik speed boat. Dan itu saya juga pernah satu papasan sama Mbak Kiki Pada waktu kita sosialisasi, kita betul-betul terjun Pak, di sana Pak.

Nah, ada aspirasi dari masyarakat di Dapil kami Pak, ini mengenai permasalahan rantai pemasaran, baik sawit maupun karet. Karena memang sebagian besar di Dapil Sumsel I itu mereka adalah berkebun karet dan sawit. Bapak, saat ini masyarakat di Dapil Kami sedang susah Pak, untuk membeli membeli 1 Kg beras tidak cukup mereka menjual 1 kilo karet Pak, tidak cukup. Padahal untuk menghasilkan 1 kilo karet itu mereka harus berkeliling kebun mereka. Sama seperti Mbak Kiki, kalau datang kita ini kayak malaikat saja Pak, dianggap kita serba tahu dan bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, mengenai harga karet ini Pak, seperti kita tahu beberapa tahun terakhir ini sangat lemah. Pemerintah belum hadir menjembatani masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Saran saya Pak, Pemerintah membuat regulasi yang menjamin pembelian hasil kebun masyarakat kecil, karena apa? masyarakat kecil ini mereka tertindas oleh kartel-kartel perkebunan Pak, sehingga walaupun harga karet itu di luar sudah meningkat, tetapi di tangan petani itu masih sangat rendah. Itu yang pertama.

Kemudian ini juga sebetulnya kemarin sudah disampaikan oleh Bu Endang masalah jeruk Pak. Di kampung saya Pak, tapi saya cuma numpang lahir saja Pak di sana. Ini ada perkebunan jeruk yang hasilnya itu cukup banyak dan kualitasnya cukup baik. Saya sempat bicara sama Bu Endang kayak gitu, tetapi permasalahannya kembali lagi ke masalah pemasaran Pak. Mereka sangat kesulitan, saat ini petani di sana itu menjual itu dari mulut ke mulut Pak. Nah, ini Pemerintah juga tidak hadir disini. Mohon Pak, bantuannya untuk petani jeruk ini.

Kemudian yang ketiga, ini juga aspirasi masyarakat di Dapil saya Pak, mengenai kepada BPPSDMP mengenai program pendidikan pertanian. Tadi Bapak bicara penumbuhan wirausahawan muda. Saya kemarin di Dapil Pak, padahal saya belum ada di Komisi IV DPR RI tapi saya mendapatkan pertanyaan dari konstituen saya. Kriterianya apa saja wirausaha muda ini. Kemudian bagaimana cara mengakses program ini.

Itu saja Pimpinan yang saya tanyakan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Ibu Julie, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK NTT.

Silakan.

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, teman-teman dari Komisi IV DPR RI,
Dengan Bapak Sekjen, para Dirjen yang saya hormati.

Permasalahan selalu hampir sama ya pertanian, perkebunan itu, di seluruh Indonesia semestinya. Yang tadi sudah dipaparkan oleh beberapa teman-teman, mungkin salah satu juga antara perkebunan besar sama perkebunan rakyat misalnya. Saya punya kakak Johan tadi ada bisik lupa bicara saya wakilin untuk izinkan tentang gula misalnya. Jadi perkebunan rakyat mereka ada gula tetapi yang dijual itu adalah sudah di label adalah perusahaan-perusahaan swasta yang besar, tapi di dalamnya itu bukan gula dari para petani kita. Jadi semestinya kalau itu lama-kelamaan di Indonesia ini mestinya di Indonesia ini keunggulan kita adalah pertanian. Tetapi lama-kelamaan kita ini anak-anak milenial generasi kita terus-menerus kalau begini terus tidak akan mau jadi petani, tidak mau *back to village*.

Terus yang berikut juga adalah tentang pemasaran. Tadi yang integrasinya tidak punya, jadi masing-masing sektor itu kayak Kementerian Pertanian ini hanya bisa cuman di hulunya saja, tapi kan hilirnya itu harus dapat Pak, kalau tidak kan kita selalu cuma fasilitas, fasilitas, fasilitas tetapi habis itu tidak ada perputaran ekonomi di masyarakatnya. Jadi saya rasa makanya izinkan saya balik lagi contohnya NTT karena saya di situ. Untuk NTT-nya sendiri karena tadi saya cukup sedih Pimpinan, di situ tadi program yang sampai Juni NTT tidak termasuk. *Insya Allah* yang berikut itu ada NTT-nya selalu di situ karena saya duduk disini untuk melihatnya, kalau tidak saya lapor Pak Gubernur.

Yang untuk peternakan dulu, Pak Dirjen kami di NTT ini keunggulannya bukan hanya pertanian, perikanan, juga peternakan seharusnya. Tetapi saat belum melihat di NTT kalau untuk lahan sama alamnya itu mendukung sekali, hanya kami kekurangan kayak seperti bibit-bibit unggul. Kami di NTT itu mungkin sekarang banyak sekali bibitnya adalah Sapi Bali, tetapi kami di tempatnya di Sumba itu ada namanya Sapi Ongol yang memang sekarang sudah sampai hampir punah ini. Sedangkan kalau sapi inikan penjual sapi, karena saya pengusaha Sapi Bali dia gedanya sama tapi beratnya itu pasti Sapi Ongol lebih berat dan duitnya lebih banyak di situ, seperti itu. Jadi mungkin kami di NTT minta perhatian untuk bibit-bibit yang unggul dan memang salah satu kendala kita adalah untuk ekspor keluar, karena kita memang konsumsi untuk di NTT sendiri kami adat itu daging, entah dia babi atau sapi, pasti kita secara adat saja dan tiap hari orang NTT itu jarang makan sayur dia makannya daging. Tapi kita juga mau bahwa keunggulan kita itu bisa diekspor keluar tetapi kita dari NTT tidak bisa untuk keluar, harus melalui Surabaya dan untungnya berarti di tempat lain bukan di provinsi kami. Nah, itukan perlu integrasi kepada yang lain tetapi kami dari Bapak mungkin minta perhatian bibitnya.

Dan untuk ke perkebunan, saya sebagai ketua PKK kadang memang kami punya kesulitan. Ini berlaku untuk PKK se-indonesia saya yakin, kami PKK ini mempunyai pasukan tenaga itu sampai dasawisma dengan gratis Pak, kami pakai semestinya. tetapi kami kami hanya punya fasilitas, kami hanya punya hati dan tenaga tetapi tidak mempunyai fasilitas. Selalu kami

harus nebeng dari dinas-dinas dan kita ini sudah rahasia umum bahwa kalau dinas inikan kadang-kadang susah ya tidak ada untungnya buat dinasnya pribadi dan kita tidak digubris seperti itu. Yang mana saya ngomong Pak Sekjen, “Pak, PKK ini bagaimana saya perjuangin bukan hanya untuk NTT untuk seluruh Indonesia punya PKK”, yang kami membutuhkan fasilitas seperti karena kami kan punya program hatinya PKK, pekarangan kami harus dimaksimalkan untuk apa, intinya kami adalah untuk ketahanan pangan mandiri mereka. Jadi situasi apapun mereka bisa hadapi, apalagi perempuan Pak, perempuan itu mohon maaf para Bapak-bapak, perempuan itu kan tanggung sekali, seperti itu. Dan apalagi khususnya di NTT saya berharap bahwa ada bibit bibit dan fasilitas itu yang datang memang melalui PKK, tapi kalau saya suruh kelompok tani wanita bisa Pak, yang kemarin Bapak bilang itu tetapi kan kembali lagi kami harus mendaftarkan itu melalui dinas. Kebetulan saya istri Gubernur jadi saya bisa telepon kepala dinas itu, tetapi yang lain belum tentu bisa fasilitasnya. Nah, itu dia kelompok-kelompok yang baru kalau tidak dia-dia lagi yang ada di daftar dinas saja. Dinas kan paling malas untuk mengecek kelompok-kelompok mana yang ada baru yang bisa diorbitkan.

Milenial juga Pak, karena termasuk NTB sama NTT dengan yang lain mungkin. Sekarang TKI ini yang anak-anak muda ini pada kembali. Nah, mereka ini tidak tahu kalau bahwa bisa cari duit itu ekonomi itu melalui pertanian, karena tangan kotor. Padahal kalau misalnya kita bukan hanya ajarin, fasilitasin, dan menjadikan mereka enterprenuer mungkin nanti itu di ini kali SDM kali ya. Saya minta untuk bisa kalau melalui dinas saya sulit Pak, apakah boleh saya coba perjuangkan melalui Lembaga PKK, sedangkan kalau PKK itu tahun 2015 kami disahkan oleh Bapak Jokowi bahwa kami memang sudah itu memang kami dinasnya itu di Dinas PMD, seperti itu.

Nah, yang berikut adalah satu lagi adalah tadi Bapak Dirjen bilang bahwa kelor. Setahu saya koreksi kalau saya salah, di seluruh dunia pohon kelor terbanyak itu satu tempat, satu adalah Spanyol, satu lagi adalah Nusa Tenggara Timur, yaitu kami. Kami ini kelor ini kemana-mana dan tumbuhan itu cocok banget, karena kami panas banget dan gampang banget. Mungkin pertanian perkebunan cuman bisa bilang kami ya bibit saja, kalau bibit kami sudah banyak Pak. Masalahnya itu bagaimana cara untuk ini karena gizi terburuk di Indonesia NTT salah satu, termasuk stunting tertinggi NTT salah satu, padahal tanaman ini bisa memberantas gizi buruk dan stunting, seperti itu. Tapi kami PKK sekarang memang kami PKK saya lakukan semuanya bukan hanya sosialisasi tapi dijadikan sabun kelor, coklat kelor, kopi kelor, semuanya berhubungan kelor karena tujuan Bapak Gubernur adalah menjadikan NTT provinsi kelor. Nah, saya minta perhatiannya tentang di kelor itu.

Dari hulu sampai hilirnya semestinya Pak, nanti kalau Bapak berkenan saya bisa dari dinas berikan Bapak atau kelompok mana yang bisa kita bikin *pilot project*. Nanti kan Bapak mungkin di Kementerian ini, tapi Kementerian lain biar saya masuk lagi di Kementerian lain, supaya pengolahannya dan segala macam seperti itu. Berhubung istri gubernur jadi boleh kan ke kiri dan kanan seperti itu.

Yang terakhir Pimpinan, yang tadi ada program di SDM yang tentang wirausahawan muda. Untuk NTT mohon maaf, kami butuh sekali karena orang NTT mohon maaf sekali, saya harus bilang bahwa mereka punya otak enterprenuer-nya tidak ada. Sedangkan kami butuh itu untuk hanya dilatih, jadi saya minta untuk Kementerian ini para Dirjen bersinerginya latih, fasilitasi, terus untuk nanti buka pangsa pasarnya itu yang kita punya kendala kan. Saya buka pangsa pasar di perdagangan dan perindustrian, seperti itu. Jadi hulu sampai hilirnya dapat.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Julie.

Selanjutnya juru kunci makam Bung Karno, Mas Hendro, dari kakaknya hingga adeknya teman saya semua ini.

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua yang kami hormati,
Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, Kepala Badan yang sangat saya banggakan.

Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketua tadi dan juga sepekat bahwa alur pemikiran kita perlu untuk dirubah seperti tadi, bahwa apa yang kita rencanakan kemudian tujuan kita apa, berapa luasnya, strategi apa, dan targetnya apa. Ini biar nantinya di dalam alur pemikiran ini mudah dicerna untuk kita. Karena kemarin juga menjadi perbincangan yang cukup menarik juga, ada yang mengatakan bahwa anggaran besar hasilnya naik, anggaran kecil juga naik, ini juga kemarin ini. Bahkan tadi juga di singgung di SDM ini bahwa sekarang ini Pak, petani-petani tinggal petani-petani yang tua. Petani milenial itu tidak ada, otomatis kalau petani tua produktivitas kecil seperti yang dikatakan tadi. Beberapa Rapat Dengar Pendapat yang lalu juga kita diberi penjelasan bahwa sawah kita semakin tahun semakin berkurang, bahkan ada yang merupakan 10% per tahun. Tapi kenyataannya Pak, mulai 10 tahun yang lalu hasilnya naik terus. Ini sulit untuk kita cerna dan sulit untuk kita jelaskan, tetapi apakah datanya itu salah, belum tentu salah juga. Karena data laporan dari bawah, dari dinas-dinas ke Badan Statistik itu seperti itu, dan mungkin juga benar.

Oleh karena itu, ijinkanlah kalau saya dalam hal ini nanti salah untuk dibenarkan, untuk menganalisa masalah ini. Mohon maaf ini kami mengambil data yang tadi saya pelajari dari Ditjen BUN. Bahwa target tahun 2001 kelapa

sawit nantinya targetnya ada 52 juta ton, kemudian kopi 834 ribu ton, kemudian kelapa 2,7 ton dan lain-lainnya. Tentunya Pak, ini adalah hasil dari tiga komponen, perkebunan besar, swasta, kemudian BUMN dan rakyat. Tentunya apa yang dikerjakan oleh Kementan bantuan-bantuan Kementan bukan ke BUMN jelas karena sudah menangani sendiri, swasta besar juga tidak, itu adalah rakyat tentunya. Rakyat itu Pak, yang ingin saya tanyakan disini adalah berapa persen dari luasan yang ada ini. Mohon maaf Pak, kalau saya salah saya juga dapat info bahwa seperti luasan kopi seluruh Indonesia itu ada 1,2 juta hektar, kemudian kakao 1,72 juta hektar, terus yang dibantu Bapak untuk kopi itu hanya 8.930 hektar artinya hanya 0,74 hektar, kemudian untuk kakao hanya 0,39 hektar. Makanya pantas apa yang disampaikan Mbak Kiki tadi nyari dimana pun ya tidak ketemu karena yang dibantu Bapak hanya tidak ada 1%, jadi 99% itu tidak ada. Kalau data saya salah mohon maaf. Jadi berapa persen saya tanyakan tadi, berapa persen yang dibantu ini dari sini. Ini artinya adalah bahwa kecil sekali Pak, sehingga ini nyambung dengan yang kemarin ditanya temen-temen bantuan besar juga naik, bantuan kecil juga naik, bahkan kalau tidak ada bantuan sama sekali dan iklim ini normal mendukung malah tidak bisa naik, karena yang dibantu hanya 1% tidak ada ini Pak, mungkinkah tujuan-tujuan yang mulia seperti meningkatkan produktifitas, meningkatkan daya saing, nilai tambah itu bisa tercapai, ini yang menjadi tujuan kita ini. Ini kalau kami ibaratkan Pak, seperti Karhutla kebakaran hutan dan lahan itu, kita harus memadamkan 1 juta hektar tapi anggarannya hanya 10 ribu hektar atau 5 ribu hektar. Sampai habis ditambah lagi dua kali lipat ya tidak akan nyampe.

Oleh karena itu, menyangkut pertanyaan kedua ini mohon juga ada terobosan-terobosan Pak. Di dalam hal ini supaya harapan masyarakat bahwa ada peningkatan produksi, ada daya saing, ada nilai tambah ini tidak hanya bantuan ini, terobosan-terobosan yang berkenaan dengan 3 hal tujuan yang mulia ini, tujuan yang sangat baik ini, yaitu mungkin daya saing ini bagaimana impor itu selalu kita hambat bagaimana caranya. Memang kita akan berhadapan dengan IMF atau badan-badan, tetapi ini bisa meningkatkan daya saing.

Yang kedua, juga bagaimana beban dari masyarakat petani ini kecil, lebih murah. Caranya gimana? mungkin seperti permasalahan tahun 2019 kemarin. Ada pupuk mau impor, kalau pupuk itu memang harganya lebih murah 50% dari harga produk bisa kita kaji Pak, kalau itu impor yang diuntungkan siapa, yang yang hancur siapa, kemudian petani gimana. Kalau murah kenapa tidak, kalau menguntungkan petani, paling yang hancur adalah perusahaan ini. Ini tolong dikaji sehingga beban petani ini, ini akan menyeluruh. Memang kalau pupuk impor ini sepengetahuan saya Pak, mohon maaf kalau dibandingkan dengan pupuk subsidi jelas murah subsidi, tapi kalau non subsidi kayaknya lebih murah, apalagi kalau menyangkut semua. Banyak yang non subsidi daripada subsidi terutama di perkebunan-perkebunan besar.

Saya kira itu Pak, jadi dua pertanyaan ini yang intinya pertama, berapa persen sebetulnya yang dibantu secara nyata oleh Kementan. Yang kedua adalah mohon adanya terobosan-terobosan untuk menjawab 3 tantangan,

meningkatkan produksi, daya saing dan Karena kalau banyak bantuan itu mimpi Pak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mas Endro.

Silakan ratu dari Maluku, Ratu Alien Mus, coba dibuka maskernya biar Bapak-bapak yang di depan ini tidak ngantuk.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Kalau gitu lagu saja kayaknya biar tidak ngantuk ini.

KETUA RAPAT:

Atau duduk di depan biar langsung.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Nanti dibilang wakil ketua bayangan.

Baik, terima kasih.

Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Dan tentunya Bapak Sekjen dan jajaran Eselon I.

Saya kalau tadi di singgung soal ketahanan pangan, isu yang aktual pada saat ini adalah COVID-19 Pak, tidak mungkin kita lari dari situ. Kenapa setiap kali kita rapat saya selalu mengungkit soal ini, karena kita belum tahu pasti sampai kapan COVID-19 ini bisa berakhir. Tentunya kita juga ketergantungan dengan negara lain, kita melakukan impor, tapi apa yang kita harus lakukan adalah langkah utama ada di Mentan. Saya setuju sekali dengan beberapa rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan masukan, tolonglah kita membuat roadmap atau map untuk setiap daerah-daerah yang memiliki keunggulan-keunggulan. Misalkan NTT apa, NTB apa, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, 34 provinsi memiliki keunggulan-keunggulan tertentu kita lihat. Dan saya juga menginginkan besok Ketua, mudah-mudahan kita sudah ada disini keunggulan-keunggulan 34 provinsi kita taruh di sini, jadi setiap kali Mentan datang liat, ada progresnya.

Jadi saya langsung saja, tadi disinggung sama rekan saya bahwa ada pembagian-pembagian tapi saya belum dapat yang dari Litbang itu, minyak anti virus. Kalau bisa kita uji coba dulu itu barang. Jadi saya melihat dari program dan kegiatan tadi Mbak Kiki di halaman 7, saya di halaman 6, di situ ada di Balitbang. Saya di sini saya melihat penyediaan benih sumber dan sebar tanaman dan ternak yang ada di program kegiatan 2021. Ada di situ benih tanaman pangan padi 1.014 ton, terus juga jagung 190 ton, kedelai 656

ton dan pangan lainnya, kita kan punya 11 komoditi. Jadi Pak, karena kemarin kita sudah berbicara soal Pajale kita balik lagi memang kedelai ini ada beberapa yang menyampaikan bahwa sesuai dengan penyampaian dari Pak Dirjen Tanaman Pangan inikan *connect* ini programnya. Itu ada untuk ke panganggaran soal kedelai. Tapi saya juga sempat menyinggung selama 20 tahun ini kita juga tetap mengimpor barang itu.

Jadi saya pikir ini harus bisa dilihat kembali, kalau memang ini bisa mencapai target kenapa tidak, tapi kita harus melihat dulu 20 tahun lalu ini ada atau tidak barang ini, kalau tidak kita lihat lagi proses penganggarannya, realistis apa tidak. Kalau memang tidak kita alihkan mungkin kita bisa fokus kegiatan-kegiatan lain, mungkin kalau untuk di Balitbang barang itu dulu, karena memang saya juga setuju kalau seandainya kita turun ke lapangan, kita bertemu, karena saya juga petani Pak, keluarga saya hampir semua petani. Jadi memang kita tidak melihat ini ke Bapak....

KETUA RAPAT:

Kemarin nelayan, sekarang kok petani?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Maksudnya petani dan nelayan.

KETUA RAPAT:

Bingung ini, saya nyatet bingung.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Dua-dua itu barang.

Jadi saya mendapat informasi katanya di dua Polbangtan, Medan dan Manokwari kalau tidak salah itu hampir saja mengalami degradasi akreditasi, apakah itu benar. Kalau memang itu benar kenapa bisa terjadi, kenapa barang itu bisa terjadi. Bapak Ketua yang terhormat, jangan kasih waktu yang pendek karena ini masalah banyak orang ini, kayak ini ada berapa Dirjen jadi jangan kasih waktu yang pendek.

KETUA RAPAT:

Jadi sampai selesai saja ngomongnya jangan berhenti.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Kalau Ketua yang ngomong saya langsung berhenti itu barang.

Jadi saya mohon dipertegas mungkin sampaikan karena mereka lagi ikut sekarang, lagi ngelihat TV Parlemen, mereka ingin mendengarkan jawaban dari SDM soal masalah ini, Polbangtan ini.

Jadi saya pikir itu tapi saya langsung saja ke Perkebunan, tadi yang dari Sumatera sudah mengungkit soal sawit dan karet. Saya di sini tentang cengkeh dan pala, cengkeh dan pala ini saya sudah cengkeh, pala dan kelapa. Kita ketahui bersama Pak, saya juga pertama awal-awal saya ingin menyampaikan dan saya akan melihat Bapak dalam 5 tahun ini terus, karena *Insha Allah* dipertahankan, mudah-mudahan jangan dipindahin setelah ini ya. Pak, inikan saya lihat kegiatan dan lokasi pengembangan kawasan kelapa, terus juga cengkeh dan juga pala. Saya sudah melihat di beberapa, ada NTT, Maluku dan juga Papua, saya lihat di Kota Ternate itu ada pengembangan lokasi untuk pala, Kota Ternate. Bapak, itu di Kota Ternate itu gunung Pak, sudah semakin hari barang itu sudah habis tanah di atas dan perkebunan sudah tidak ada. Barang ini bikin program dalam pengembangan lihat dulu petanya, keadaan di daerah tersebut seperti apa. Jadi saya mohon maaf Pak, harus kita lihat sama-sama. Kalau tadi bilang pergi ke Sumatera Selatan saya juga ada Bapak ke Maluku Utara juga, tapi siap-siap ombak juga Pak, ya bagi-bagi bibit boleh juga.

KETUA RAPAT:

Sudah cukup.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Belum Pak.

KETUA RAPAT:

Nanti lagi di akhir.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tidak, kita berbicara sesuai data, tidak asal bicara nanti orang bilang kita dari Singapura, dari manalah itu barang. Jadi Pak, saya mau sampaikan cengkeh dan pala itu alasan Belanda datang jajah kita. Saya kasih tahu dan Maluku Utara sesuai perintah Sultan itu menyumbangkan hasil kopra untuk kemerdekaan Republik Indonesia, itu sejarah Pak, jangan pernah kita melupakan sejarah. Sekarang kopra 2500 per kg Pak, saya tahu ini barang memang dari dari luar negeri juga pasarannya tapi setidaknya kita memperhatikan mereka ini, hidup mereka tergantung dari harga kopra, harga cengkeh, harga kelapa, harga cengkeh sekarang 1 kg itu ada 50 ribu. Untuk naik cengkeh proses pengeringan butuh sehari-hari Rp100.000 itu tidak lebih dari 2 pohon untuk cengkeh, pala pun sama.

Tolong Pak, kita melakukan kalau memang tidak bisa melakukan pengembangan kawasan tapi kita juga melihat bagaimana dengan hasil produksi yang sudah ada. Kita fokus dulu Pak, kita fokus bayangkan tahun 2018-2019 masyarakat Maluku Utara semuanya meminjam uang dengan bunga yang begitu besar, hasil kopra pertahun tidak menutupi uang pinjaman mereka. Anak nganggur, tidak bisa sekolah dikarenakan hal tersebut. Ini

adalah PR kita Bersama, tapi kita juga harus fokus dengan COVID-19 ini, selain tadi yang disampaikan oleh Dirjen Ketahanan Pangan. Kita harus melihat komoditi andalan di luar dari pada beras, kita masih memiliki lahan untuk umbi-umbian, kita masih memiliki lahan untuk tanaman pangan lainnya. Ayo kita semangat ayo kita memberikan support kepada Bapak Presiden agar kesediaan pangan kita ini jangan tergantung dengan negara-negara lain. Saya juga mau masuk ternak-ternak ini.

KETUA RAPAT:

Ternak sudah tadi, belum?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Belum.

KETUA RAPAT:

Tadi ternak bebek.

Lanjut, kalau ayam sudah dibahas sama orang Blitar tadi.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Kalau ayam saya tidak bahas, saya cuman bahas, saya bingung daging kerbau kita impor dari India. Terus karena kita mengetahui sendiri bahwa India itu tidak lulus dari PMK. Sudahlah itu barang sudah masuk di sini sekarang, daging kerbau masuk di pasar harga juga masih tinggi, inikan apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Daging kita yang sekarang ini saja kenapa kita tidak menekan bahwa daging yang ada yang dihasilkan dari peternak kita itu kok bedanya cuman berapa puluh ribu, lebih besar juga itu daging kerbau, tinggi loh, padahal daging ternak kita segar. Kita tahu kesehatannya, saya juga bingung ini barang. Apakah ada korelasi antara ya sudahlah apa itu namanya mafia atau apa, tapi setidaknya kita harus melihat ini. Saya tahu persis Bapak Dirjen semua yang ada di sini sudah lama pemain-pemain lama, sudah mengerti bareng ini. Tapi tolong Pak, kita Indonesia sekarang buka mata semuanya, orang semuanya sekarang lagi melihat bagaimana keadaan negara kita ini. Bagaimana masih bisakah bertahan hidup, ini kita takut COVID tapi orang yang sehat saja bisa-bisa kelaparan, sedih Pak. Saya tidak mau cerita orang lain, sekarang saja di daerah-daerah itu di des-desa uang 10 ribu susah. Hasil tani ada, tidak ada daya beli, kan ini harus kita lihat.

Jadi Bapak Ketua, karena memang di batasi dengan waktu, saya mohon nanti

KETUA RAPAT:

Sudah lebih.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Iya, maksudnya lebihnya terima kasih.

Jadi mohon dengan sangat kita nanti lebih fokus Panja-panja itu kita harus lebih focus lagi Pak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih.

Silakan Bapak Salim Fakhry, Bapak Muslim terakhir.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik, Bapak Muslim kita Dapil Aceh berbagi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua, Pimpinan Rapat yang kami hormati, Bapak Ketua galak hatinya baik,
Bapak Sekjen dan teman-teman Eselon I yang kami hormati.

Setelah tadi Pak, mendengar paparan dari beberapa Dirjen, ada beberapa poin yang perlu saya tanggapi. Pertama, dalam rapat dan media kita selalu mendengar dilaporkan hasil-hasil penelitian Balitbang, keunggulan varietas yang baru dipublikasikan. Namun, kenyataannya produk Litbang tidak berkembang di pertanian. Artinya mungkin saya salah, ini mengalami kegagalan. Beberapa ratus varitas yang sudah dihasilkan tapi yang disukai petani contoh tetap IR-64 dan varietas lokal lainnya yang salah program penelitian kita, sistem penelitian berorientasi angka kredit, orientasi gelar dokter, profesor, riset, banyak profesor yang dihasilkan tapi tidak menghasilkan produk riset yang berhasil di petani. Saya pertanyakan apa terobosan saudara Kabalitbang mengatasi masalah ini.

Yang kedua, tadi ketika pemaparan Kepala Litbang hanya ada daftar kegiatan-kegiatan penelitian. Saya tidak mendengar sasaran nasional Litbang, tentang varietas-varietas atau produk teknologi yang akan menjadi andalan ekonomi nasional ke depan. Dulu Litbang Malaysia kalau ditanya jelas akan menghasilkan varietas durian yang berdaya saing dunia, dan terbukti. Jadi Kalitbang pikirkan jangka pendek, signalnya harus jauh kedepan. Kami meminta jelas produksi riset apa yang menjadi andalan ekonomi pertanian untuk kedepannya. Dilaporkan Kepala Litbang tadi bahwa pemotongan efisiensi anggaran Balitbang telah mengakibatkan PHK Tenaga Harian Lepas, apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi. Setelah kami teliti ternyata yang dikurangi itu adalah tenaga-tenaga yang kasar, pemelihara

kebun, kantor, bukan tenaga teknis penelitian. Mungkin inipun kalau kami keliru tolong dikoreksi Pak Sekjen.

Di sisi lain anggaran perjalanan supervisi rapat-rapat perjalanan luar negeri mungkin masih relatif besar, walaupun dengan suasana COVID. Ini bagaimana apakah akan tadi yang dikatakan Pak Ketua, bukan salah Pak Ketua, bukan salah Komisi IV DPR RI ini. Karena anggaran ini setelah di realokasi karena ada persetujuan dalam Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dan Kementerian. Saya usulkan untuk anggaran tahun 2021 kita harus cermat betul Pak Sekjen, agar anggaran kedepannya memang tepat sasaran. Rencana Kepala Litbang terkait dengan kebijakan reorganisasi penelitian di bawah Menristek apa yang sudah saudara persiapkan atauantisipasi terhadap kebijakan ini, agar riset pertanian makin maju dan tidak mundur kedepannya.

Sselanjutnya ke Ditjen Peternakan, tadi Ibu Alien sudah menyatakan kebijakan impor Sapi Bakalan kurang adil, padahal impor Sapi Bakalan mempunyai nilai tambah bagi peternak Indonesia. Mengapa impor daging kerbau India ini terus ditingkatkan kuotanya setiap tahun, padahal harga daging kerbau masih tetap stabil Bapak Pimpinan. Artinya tujuan menstabilkan harga stabil normal sudah gagal, mengapa kebijakan ini dilaksanakan. Seperti kita ketahui ini saja apanya sudah keluar 170 ribu. Kami ingin penjelasan nanti dari Bapak Ditjen PKH. Dalam masalah perunggasan yang tidak pernah mampu permasalahan klasik peternak ayam, harga jatuh, peternak di industri selalu merugi Pak.

Yang paling penting di sini Pak Ketua, mohon izin Pak Pimpinan, kita berbicara apa pun di Kementerian Pertanian ini tanpa kita memperhatikan penyuluh pertanian mustahil segala program di Kementerian ini akan berhasil. Bagi saya Pak Pimpinan, penyuluh pertanian dan THL BPP itu adalah pahlawan pertanian. Namun jasa-jasa dan karya kadangkala kita abaikan, saya sangat sering berkomunikasi dengan mereka-mereka tersebut. Keberhasilan pertanian tidak pernah terlepas dari pada hasil pengabdian mereka-mereka tersebut, suara mereka terkadang nyaring dan sangat nyaring, sehingga tidak terdengar oleh kita semua. Penyuluh pertanian bekerja tanpa ada sekat waktu Pak Pimpinan, sekat sosial serta ekonomi, sekat produktivitas dan sekat perlengkapan dan fasilitas kerja. Kalau saya tidak salah jumlah penyuluh pertanian PNS, THL, TBPP swadaya dan swasta di Indonesia lebih kurang 69 ribu orang dan BPP yang ada di Indonesia lebih kurang 5.600 sekian. Banyak petani mengatakan kepada kita Pak Ketua, selangkah perjalanan penyuluh sejuta harapan petani. Mohon tepuk tangan dulu Pak.

BPP dan penyuluh pertanian sebagai pelaksana utama mewakili Pemerintah perlu segera kita revitalisasi. Tidak cukup hanya menyusun program-program, penyuluh pertanian harus menjadi eksekutor dan praktisi pertanian. Jangan hanya diajak untuk merubah pola pikir kerja nyata, diajak terbang mereka tidak mempunyai sayap Pak Sekjen. Kita lengkapi Pak, BPP dan penyuluh pertanian dengan piranti teknologi, fasilitas kerja, APD sarana dan prasarana BPP dan penyuluh pertanian harus kita akui masih banyak

kekurangan. Penyuluh pertanian adalah pendamping dan pengawal pertanian sejati dan tugas mereka tidak sanggup kita jalankan hanya di ruangan ini.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Salim?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit lagi Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini pandangan Fraksi, tenaga ahli atau apa.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Tidak apa-apa Ketua, sudah capek dari tadi malam Ketua. Sudah waktunya Bapak Ketua, kita berpikir kepada BPP dan penyuluh pertanian Pak Sekjen, sampaikan Pak Sekjen salam hormat Pak Ketua dan Pimpinan dan Anggota hormat dan apresiasi Komisi IV DPR RI kepada penyuluh pertanian termasuk THL, TPBP di manapun mereka sedang bekerja. Sekarang baik di darat, baik di laut, di tengah sawah, kebun dan ditengah hutan rimba bersama petani. Kami doakan agar pahlawan tani menjadi praktisi dan eksekutor pertanian di Indonesia.

Terakhir Pak Sekjen, terakhir Pak Ketua, Dirjen BUN Bapak Ketua....

KETUA RAPAT:

Setengah menit Pak, sudah 7 menit ini.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Tidak apa-apa Bapak Ketua, setengah menit.

Bapak Dirjen BUN, ini aspirasi dari Aceh Pak, sebab tadi berbicara saya scoop nasional Pak. Mengenai bibit Pak, bibit kopi tolong dibantu di Provinsi Aceh Pak, kalau bisa 1 juta batang, karena ada beberapa kabupaten yang sangat kopi terkenal Bapak Ketua, termasuk di Gayo, Gayo Luwes, Bener Meriah tempat Pak Muslim, termasuk di Aceh Tengah. Sudah itu ada tanaman yang sangat bagus sekarang di Aceh Pak, namanya Pinang Betara Pak. Ini pun harapan kami kepada Bapak Sekjen melalui Pak Sekjen agar diadakan pengadaan bibit Pinang Betara 1 juta Pak, dan ada perlu rehab kebun pala di Aceh, di Aceh Selatan sebanyak 500 hektar. Terakhir Pak Ketua, ada kelapa namanya ini sangat bagus Kelapa Pandan Wangi Pak.

Demikian Pak Ketua, mohon maaf mungkin saya karena terlampau lama Pak ketua, saya paham Pak Sudin senang sama saya, walaupun

kelihatannya beliau itu pura-pura agak apa, beliau hari ini memakai baju merah dengan berlambang Banteng.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Silakan Teuku kedua, setelah itu virtual, 3 menit.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.);

Terima kasih Bapak Ketua yang bijak.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua dan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen beserta jajaran Kementerian Pertanian.

Saya tidak panjang Bapak Ketua, tidak sampai 3 menit. Pertama, saya menyangkut ke Dirjen Perkebunan dulu Pak, ini terus terang ini, ini keluhan yang luar biasa bukan sekali, dua kali Pak, berkaitan dengan kelapa sawit ini ya. Kita lihat betul kemarin itu dalam APBN kita kurang lebih sekitar 2,78 triliun Pak, untuk anggaran yang dikucurkan khususnya berkaitan dengan penanganan ekonomi Pak. Namun demikian, yang kita lihat hari ini anggaran begitu besar ini yang menikmati hanya perusahaan-perusahaan besar Pak, ataupun konglomerat kelapa sawit Pak. Namun, dalam konteks ini kita ini belum melihat Pak, posisi petani dimana disini Pak. Kenapa? mereka berteriak hari ini, harga sawit Bapak tahu betul Rp800 per kilo. Dalam konteks ini kita tahu betul Pak, ini juga banyak aspirasi dari masyarakat bagaimana khususnya petani-petani sawit ini, kelapa sawit ada yang 100 hektar, 50 hektar, 25 hektar, mereka selama ini tidak menikmati Pak. Termasuk itu yang peremajaan kelapa sawit replanting ini, ini semua dinikmati oleh para pengusaha besar Pak. Nah, ini menjadi perhatian Bapak. Tentu dalam hal ini kita minta kepada Pimpinan juga, kita harapkan nanti kita harus ada Panja berkaitan dengan pengawasan kelapa sawit. Jadi kita bantu Pak Dirjen juga, Bapak Sekjen, kenapa? katakan ini besar sekali anggaran tetapi masyarakat tidak menikmati Pak, ini terus menjadi catatan.

Yang kedua tadi berkaitan tadi disampaikan Bang Salim. Saya mendukung Bang Salim Fakhry, artinya bahwa kita tahu betul produksi kopi terbesar di Indonesia salah satunya di Aceh dan sangat bagus, mulai dari Aceh Tengah, Bener Meriah. Ini masyarakat juga teriak Pak hari ini, cuma saya belum melihatnya bantuan bibit kopi Pak. Tadi sepakat Bang Salim masalah Pinang Pak, di Aceh kita betul hari ini masyarakat sangat dibutuhkan bibit Pinang, karena kita ekspor Pinang salah satu terbesar itu di Aceh dan Jambi Pak Ketua, itu rata-rata ke India, Pakistan dan Bangladesh Pak. Artinya

ini kita harus dukung, jadi sehingga betul-betul meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kemudian yang terakhir berkaitan dengan Dirjen PKH Pak. Tadi saya melihat kalau kita lihat bantuan luar biasa di sini Pak, ini menyangkut. Saya ingin tahu output-nya seperti apa, sekian banyak yang Bapak berikan ini Pak Dirjen, artinya berapa banyak. Saya minta juga data yang ada Pak, di mana-mana data yang dilaksanakan oleh Dirjen Peternakan yang berhasil kita bisa lihat nanti Pak. Termasuk di Dapil saya di Aceh Pak, apa yang telah di bantu apakah sapi, apakah kambing dan lain, kita tahu. Jadi sehingga nanti kita bisa melihat di mana kekurangan, di mana yang harus kita dukung, di mana yang harus kita koreksi. Selama ini kita belum dapat, saya berharap Bapak Ketua, kita minta juga data-data yang telah dilaksanakan oleh Dirjen Peternakan, bukan hanya di Aceh mungkin di seluruh Indonesia kita punya gambar seperti. Kita lihat disini pengembangan unggas ada 501 ribu ekor, nilainya Rp46 miliar. Kemudian saya lihat cukup banyak saya tidak jabarkan satu per satu, saya berharap apa yang telah Pak Dirjen lakukan tolong kami diberikan data Pak, sehingga kita bisa tahu betul tingkat sejauh mana kesuksesan dari pada peternakan ini. Hari ini terus terang Pak, masyarakat berharap betul bantuan apakah bibit kambing, tapi betul-betul menyentuh kemudian masyarakat Pak. Apalagi di Dapik kita Pak, jadi artinya yang Bapak lakukan hari ini kita ingin lihat betul hasilnya apa. Nah, ini mungkin menjadi catatan butat kita, tolong nanti Pak Dirjen berikan data termasuk di Dapil saya, termasuk di Bapak Salim Fakhry juga, sehingga kita bisa melihat langsung Pak, apa yang telah dilakukan oleh Dirjen Peternakan ini.

Itu beberapa hal Bapak Ketua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Beri kesempatan dulu Bapak Ketua, Kapoksi itu, kamu kan Anggota.

Silakan.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Ketua yang saya hormati, Bapak Sekjen.

Terkait dengan Litbang Pertanian, jadi dulu pas beliau Bapak Gatot itu pas saya dulu pimpin bantu beliau bahwa di Klaten itu dulu bahwa Rojolele itu Pak, itu 6 bulan baru panen Pak. Dulu dipanasi sama beliau, di kenalkan sama Batan pakai sistem nuklir, sehingga sekarang itu 110 hari sudah bisa panen padinya. Dan rasanya sama, wanginya sama, pulennya sama dan juga tahan hama. Nah, ini masih sekarang itu dalam tahap untuk serempak penanaman Pak. Tentu mohon nantinya bisa menjadi perhatian beliau Pak Gatot kan asli sana Pak, jadi saya yakin nanti Pak Gatot bisa ngerayu Pak Sekjen sama Bapak Menteri biar pengembangannya lebih cepat dan nantinya dibenihnya sudah Pak, sudah mendapatkan persetujuan juga terkait bening ini, ada dikasih dua nama mungkin dua namanya yang ada dua varietas kalau tidak keliru tapi sudah ditanam dan sudah terbukti dan sudah dibuktikan, memang itu 110 hari sudah panen. Itu terkait dulu yang bombing beliau Bapak Gatot, terim akasih Bapak Gatot itu sudah berhasil top Rojolelanya sekarang tidak perlu 6 bulan Rojolele cukup 110 hari.

Selanjutnya kami menyampaikan lagi mengingatkan terkait bahwa kemarin ini sedikit pertemuan dan Gapuspindo kemarin, bahwa menurut mereka bahwa Permenpan Nomor 41 Tahun 2019 ini menganggap memaksa integrasi usaha sapi potong dengan sapi indukan. Bahwa mereka merasa dipaksa bahwa core sapi penggemukan ini akan diarahkan ke usaha sapi indukan. Tentu mereka merasa kesulitan, tapi mereka juga menyampaikan Pak Sekjen, Bapak Dirjen, pada status bencana COVID-19 ini memang aturan tidak berlaku, harapan mereka ini tidak terus Pak, jadi memang berlakunya begitu Pak Dirjen. Dan harapan mereka kemarin waktu bertemu dengan Pimpinan, harapan kami ini bisa terealisasi dan nantinya berjalan dengan seterusnya. Dan harapan mereka juga yang selanjutnya adalah pengurangan untuk impor daging kerbau yang menurut temen-temen Gaposindo bahwa importasi daging kerbau beku dari India bertujuan menyediakan daging dengan harga Rp80.000 yang diatur dalam Permendag. Namun, faktanya harga daging kerbau mengikuti harga daging sapi produksi lokal di harga Pak. Nah, ini harapan temen-temen ini mendapatkan perhatian khusus dari Pak Sekjen, Pak Dirjen dan juga Bapak Menteri terkait dengan nantinya tindak lanjut harapan mereka bahwa terjadi reaksi Permentan Nomor 41 Tahun 2019 ini. Dan juga perlu keberpihakan terhadap usaha peternakan rakyat dan industri peternakan khususnya sapi potong dengan meninjau ulang kebijakan importasi daging asal India.

Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua, Pak Pimpinan, Pak Kyai terima kasih waktunya, Bapak Kyai panjang umur, sehat wal'afiat, tambah ganteng, tambah muda, Bapak Sekjen juga sehat, Bapak Dirjen juga sehat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka!!!

KETUA RAPAT:

Silakan Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya interupsi ya Pimpinan.

Saya hanya mengingatkan, saya mendesak untuk dibentuk Panja Pengawasan Kelapa Sawit berdasarkan Rapat Senin 16 Desember 2019 yang dipimpin oleh Bapak Hasan Aminuddin. Jelas di dalam kesimpulan rapat tersebut, poin pertama dan poin ketiga yang paling penting waktu itu saya ingin mempertanyakan kepada Sekretariat Komisi dan Bapak Sekjen. Waktu itu di laporan singkat dari kesimpulan rapat untuk menyerahkan data alokasi dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang telah dihimpun sejak BPDPKS dibentuk selambat-lambatnya 1 hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini. Pertanyaan saya apakah sudah pernah diserahkan Sekretariat? Sudah, oke. Berarti inikan perlu tindak lanjut, jadi saya mendesak agar segera Panja ini dibentuk.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi Sekretariat dengar, mulai hari Senin absen untuk Panja sudah jalan apa belum, sudah dijalankan belum? Kenapa kalian tidak kasih tahu ke saya. Anggota Panjanya sudah masuk, absennya sudah. Ya sudah nanti saya bahas sama Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu sekalian.

Karena masih ada Anggota yang di rumahnya masing-masing atau di tempat rumah keduanya. Kami persilakan virtual, ada Bapak Bagus Adhi mohon saran dan pendapatnya *to the point* dan 3 menit.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Ketua, Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Bapak Sekjen beserta jajaran.

Konkrit saya menyampaikan terkait dengan pertanian kita. Kita fokus sesuai dengan acuan kita, seperti apa yang saya sampaikan, yaitu terkait riset and development. Jadi terkait dengan yang ada di Bali saya mohon Bapak Sekjen di bidang SDM ini program konstra tani itu di mana pun, tidak hanya di Bali, saya mengusulkan jangan ditunda karena ini penting sekali untuk kita

adakan evaluasi dan tempat mengevaluasinya orang-orang yang kita ajak membangun pertanian tersebut.

Yang kedua, terkait dengan situasi COVID ini di sana kita bisa melihat bahwa COVID ini memberikan pembelajaran. Dan yang paling kita banggakan banyak sekali masyarakat kita kembali ke pertanian sekarang, termasuk anak-anak muda kita. Dan perlu adanya pembinaan terhadap pertanian atau petani milenial kita, karena sudah banyak menghasilkan program-program dan produk-produk yang luar biasa.

Sudah itu di di bidang Litbang, di sini saya sampaikan marilah kita kembali berdayakan kearifan local kita. BPTP kita itu bisa menghasilkan banyak hal, jangan sekarang didrop bibit-bibit yang sudah jadi tapi berikanlah dia melakukan kajian dan melakukan pembuatan bibit-bibit yang tanaman pangan, hortikultura, atau buah yang untuk kita ekspor seperti manggis dan sebagainya. Nah, ini akan jauh lebih bagus lagi.

Jadi yang kedua, yaitu bagaimana kita melakukan pengkajian terhadap tanaman-tanaman yang mempunyai komoditas ekspor tersebut. Nah, ini mari kita lakukan dengan baik, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dan ada parameternya dengan pertanian. Dan tadi Anggota juga sudah banyak saya dengar terkait dengan peternakan yang ada di Bali, ini kita perlu penelitian juga. Dan ada tadi saya sampaikan pada rapat ini, saya menemukan dilapangan ada 11 kelompok rumah tangga yang memelihara babi. 10 yang memakan konsentrat itu mengalami kematian dan 1 ada peternak yang melakukan peternakan di Bali ini, yaitu tepatnya di Kecamatan ... dia memberikan makanan babi ini hanya ketela pohon, hanya daun-daunan saja. Dan hasil peternakannya sampai sekarang selamat, tetangganya itu gugur. Dan satu lagi di Desa Panja, bantuan Bank Pesona kita, yaitu ternaknya babi dapat dia 10 ekor yang 9 meninggal atau mati yang satunya sempat sekarat yang kemudian diganti pakannya keluar dari konsentrat diberikan makanan hasil perkebunan *Alhamdulillah* sampai sekarang masih hidup.

KETUA RAPAT:

3 menit Pak.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Jadi dengan dua temuan itu apa ini virus atau apa. Itu kira-kira Pimpinan yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Bagus Adhi.

Untuk selanjutnya Bapak Sutrisno, Mbah Tris.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Peternakan dan kesehatan hewan, Bapak Dirjen kita tahu yang menarik adalah impor daging kerbau dan sapi. Kenapa itu menarik? Karena kerbau dan sapi itu adalah mainan dan sumber kehidupan rakyat penghuni NKRI. Oleh karena itu, ternak-ternak itu sesungguhnya bisa dikembangkan dimana pun. Pertanyaannya adalah kenapa peluang itu tidak diakses agar kita tidak mengandalkan impor daging. Saya memperhatikan rencana anggaran tahun 2021, itu ada pengembangan ternak ruminansia potong Rp181,5 miliar sedangkan tahun 2020 Rp102,95 miliar belum tercairkan itu, baru 0,07 anggarannya dan fisiknya tidak ada. Artinya itu ada persoalan kenapa program-program yang ada persoalan terus menerus setiap tahunnya malah diprogramkan. Kenapa dalam rangka memulihkan ekonomi, misalnya alihkan saja ke unggas dalam rangka menumbuhkan masyarakat lapis bawah supaya ada kehidupan untuk mengurangi kebutuhan apa namanya protein hewani rakyat bisa mandiri, itu usul saya.

Kemudian yang kedua, Ditjen Perkebunan. Pak Dirjen, pada saat evaluasi anggaran tahun 2019 saya mengatakan bahwa nanti 2020 akan kekurangan gula. Di sini Pak Dirjen menganggarkan di tahun 2021 ini 37,5 miliar, padahal tahun 2020 hanya 12,5 miliar sampai hari ini baru 11,25% direalisasikan, artinya apa? Itu ada persoalan. Saya blusukan, saya komunikasi dengan para GM pabrik gula Pak Dirjen, yang menopang produk gula itu adalah para BUMN PTP I sampai dengan 14, 8 merugi bahkan asetnya pun juga tidak cukup untuk bayar hutang. 6 pun juga dapat untung dari hasil jual tanah. Persoalannya di Pulau Jawa ini sudah sulit, kesulitan lahan, lahan petani sudah sangat mahal, sehingga seharusnya tidak Anggaran Ratum ini dikembangkan karena pemilik lahan pun seperti di Majalengka lahan pabrik gula itu tidak dimanfaatkan, disewakan kepada Kacang Garuda. Hemat saya adalah sudah waktunya untuk mengevaluasi, merelokasi tempat-tempat yang sangat tepat untuk dikembangkan. Menurut hemat saya yang tepat adalah diluar Pulau Jawa walaupun randomnya masih kecil. Bagaimana teknologi dikembangkan di luar pulau Jawa.

Kemudian yang ketiga, Ditjen PSDM. Ada anggaran 28.700 orang dengan anggaran 217,13 miliar peningkatan kompetensi calon tenaga terampil dan tenaga ahli. Pertanyaannya adalah mudah-mudahan apakah itu adalah para penyuluh THL, penyuluh honorer yang sudah diangkat, yang diberikan pelatihan sebagai tenaga terampil. Kalau tidak usul saya kapan nasib mereka mendapat legalitas sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena berbagai macam persoalan di bidang pertanian adalah kata kuncinya untuk menyelesaikan ada di penyuluh. Terlepas dengan berbagai macam kekurangannya, kekurangan-kekurangan yang dimiliki termasuk merekomendasikan, aspirasi masyarakat, usulan-usulan adalah para penyuluh yang mengevaluasi juga para penyuluh. Sudah waktunya dia sudah puluhan tahun mengabdikan diberikan legalitas, itu usul saya.

Kemudian yang keempat, di Badan Ketahanan Pangan. Bapak Kaban, menurut Bapak bahwa negeri ini ketahanan pangannya kuat itu dari sisi yang mana. Bukankah pangan itu asalnya dari desa, masyarakat desa

mengonsumsi beras. Untuk kuat ketahanan pangan kita bagaimana perkuat ketahanan pangan di desa, usul saya adalah perbesar itu dalam rangka pemulihan ekonomi mengatasi COVID, yaitu lumbung-lumbung pangan diperluas, anggarannya diperbesar, agar ketahanan pangan di desa itu sangat kuat.

Yang terakhir Balitbang, Bapak Kaban Balitbang produktivitas pertanian baik maupun juga hortikultura ini sekarang ini sangat menurun, sebab utamanya adalah adanya tingkat kesuburan lahan sudah sangat menurun. Tanaman cabai yang biasanya bisa 14 kali panen hanya 4 kali sudah habis. Begitu juga tanaman padi semuanya pun juga karena dorongan dari pupuk non organik maupun organik. Oleh karena itu, sudah waktunya bagaimaa menyuburkan kembali. Mohon untuk diteliti bagaimana caranya supaya tanah-tanah itu bisa subur kemali.

Itu saja Bapak Ketua, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Mas Budi Gerindra, sudah tidak ada. Oh, Budi ada, silakan Mas Budi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pimpinan yang kami hormati,
Para Anggota Komisi IV DPR RI dan tentunya Sekjen, serta par Dirjen Eselon I Kementerian Pertanian.

Beberapa hal saja yang ingin saya soroti tadi, beberapa kali Bapak Ketua dari awal rapat juga sudah mengemukakan hal ini yang terakhir Pak Sutrisno juga ini permasalahan gula. Pada Rapat Kerja minggu lalu saya juga sudah menyoroti permasalahan ini. Bapak Menteri pun sudah bilang kekurangan kita itu berapa per tahunnya dan saya lihat ini sampai sekarang belum ada rencana konkrit dari Dirjen Perkebunan mengenai rencana kedepan kita untuk memitigasi kebutuhan gula. Yang ingin saya tahu ini data ini kita ini data valid untuk lahan perkebunan tebu ini seperti apa Pak, kalau boleh tahu nanti boleh kami dijelaskan. Baik, rakyat maupun BUMN, swasta itu besar kebunnya dan produksinya itu pertahun berapa supaya kita itu bisa tahu semua. Kapasitas yang terpasang yang ada di tanah air itu berapa. Sangat disayangkan dari tahun ke tahun kita impor masih di jumlah yang sangat luar biasa. Dan kalau tadi kita mendengar penjelasan Bapak Dirjen itu kayaknya cuman ada target-target produksi saja, seperti target produksi tahun depan. Tapi perencanaannya untuk dari tahun ke tahun benar-benar kita bisa mengurangi ini, ini kayaknya belum ada roadmapnya itu belum jelas. Dan kalau bisa kita benar-benar dikasih pencerahan Bapak Dirjen Perkebunan.

Dan tadi sudah juga dikemukakan permasalahan seputar perkebunan sawit dan permasalahannya. Saya tidak mau mengulang-ngulang tapi saya ini ada beberapa aspirasi dari Apkasindo yang beberapa waktu lalu kita terima audiensi di Komisi IV DPR RI juga. Iya ini mengenai program peremajaan kelapa sawit. Terjadi hambatan oleh oknum kepala daerah dan Dinas Perkebunan Pertanian, ada yang memperlakukan program Presiden ini sebagai proyek APBD, sehingga terjadi over kewenangan dengan memaksakan kontraktor itu harus dari mereka dan pembelian bibit juga. Dan ini salah satunya terjadi di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat karena tidak memakai kontraktor yang direkom oleh Kepala Dinas, pencairan dana tersebut dihambat, pekerjaan lapangan sudah 80% tapi sedikit pun dana belum bisa cair, Bank ditekan oleh Kepala Dinas dan berbagai upaya dilakukannya. Ini sudah tiga bulan terjadi dan belum ada penyelesaian. Kami minta Bapak Dirjen kasus-kasus seperti ini untuk diawasi dan ditindaklanjuti. Kalau masih belum bisa nanti kita panggil juga, kita kalau perlu Rapat Dengar Pendapat sama-sama. Ini catatan penting untuk Dirjen Perkebunan, tadi saya mendengar juga saudara kita dari Sumatera Selatan Mbak Kiki dan Ibu Renny juga, permasalahan sawit ini benar-benar harus kita selesaikan bersama. Saya dorong Pak Ketua, Pimpinan yang lain permasalahan Panja Kelapa Sawit segera kita aktifkan, supaya kita bisa carikan solusinya Bersama.

Yang terakhir, kemarin ini saya ingin penjelasan dari Bapak Sekjen Pak, mengenai anggaran khusus untuk dukungan manajemen. Ini saya terpikir saja kemarin waktu saya duduk di sebelah Bapak Ketua, ada anggaran dukungan manajemen yang begitu luar biasa. Saya ingin tahu dukungan manajemen ini rinciannya itu apa saja sih, apa aktifitas dukungan manajemen itu apa saya ingin tahu. Kemarin di Dirjen PSP itu anggarannya Rp355 miliar sendiri, saya tadi melihat ada anggaran untuk pangan lestari dari Kepala Badan Ketahanan Pangan. Karena alangkah baiknya kalau di saat pandemi COVID-19 ini justru program-program yang seperti ini yang kita bisa alokasikan anggarannya lebih besar, makanya saya ingin tahu ini dukungan manajemen itu apa sih kok bisa angkanya bisa begitu fantastis. Tolong Bapak Sekjen, kami diberikan pencerahan.

Terima kasih Pimpinan atas waktu yang diberikan, kami kembalikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Yang terakhir Bapak Slamet, Bapak Dokter Hewan? Tidak ada.

Bapak dan Ibu sekalian.

Saran dan pendapat sudah disampaikan oleh segenap Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya kami persilakan jawaban oleh para pejabat Eselon I yang langsung dimoderatori oleh Bapak Sekjen selaku Sekretaris Jenderal. Di mulai dari siapa mungkin yang sudah tidak ada dirungan ini cukup dengan

tertulis, kan begitu ya. Yang ada kesamaan tidak usah disebut namanya sudah urusan ternak jawab saja sekaligus untuk mempersingkat waktu, untuk disimpulkan oleh Bapak Ketua Komisi IV DPR RI.

Silakan Bapak Sekretaris Jenderal.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.
Untuk yang pertama, saya persilakan Dirjen Perkebunan.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Terima kasih.

Bapak Ketua yang kami hormati,
Bapak dan Ibu sekalian para Wakil Ketua dan Anggota,
Teman-teman sekalian Eselon I dan Eselon II.

Tadi tepat apa yang disampaikan Bapak Hasan, ada yang beberapa banyak sekali masukan kepada kami, untuk itu kami sampaikan terima kasih. Utamanya yang berkaitan dengan sawit, kemudian karet, kopi, dari Ibu Kiki. Tapi ada beberapa pertanyaan nanti juga akan segera kami tanggapi.

Yang pertama Bapak Ketua dan Bapak dan Ibu sekalian, berkait dengan keterlambatan realisasi tadi banyak sekali menanyakan soal kelapa genjah dan sesungguhnya tidak hanya kepala genjah. Kami sampaikan tadi juga benar Pak Suhardi Duka sampaikan 73% memang ada di Satker Daerah, ini yang menjadi penghambat dan tadi saya sampaikan terima kasih. Ada saran untuk memindahkan sebagian dari Satker Daerah itu ke pusat sehingga nanti kita bisa mempercepat itu.

Kami sampaikan sesungguhnya sampai dengan akhir Juni ini sudah banyak yang sudah kontrak kalau itu menyangkut masalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Dan terutama yang terkait dengan perbenihan, kemudian alat mesin yang teruntuk untuk pasca panen dan juga pengolahan. Dan Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk bisa nanti kami di 2021 kami framenya akan memperbesar alokasi yang ada di server pusat.

Kemudian yang lebih spesifik dari banyak sekali yang berkait dengan sawit Pak Ketua dan Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih masukannya Bu Kiki. Seperti sebagian sudah kami sampaikan kemudian Bapak Ketua terkait dengan juga nanti BPDPKS akan kami lengkapi yang berkaitan dengan PSR. Peremajaan Sawit Rakyat kita kami sebenarnya setiap bulan Pak Ketua, melakukan verifikasi dan jemput bola yang terkait dengan usulan Ibu Kiki, tapi luar biasa di daerah itu. Target 3 tahun ke depan ini ditetapkan 500 ribu hektar, 500 ribu Mbak Kiki. Dari 500 ribu itu kita putuskan satu

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Sebentar, 500 ribu hektar 3 tahun, apa mungkin? 1 tahun 150 ribu, ingat loh. Berarti satu bulan itu hampir 10 ribu hektar. Pak, masalah dengan BPDPKS bukan hanya replanting, SDM, infrastruktur, riset. Jadi kalau bicara cuman 500 ribu hektar saya rasa tidak gitu gampang. Dan yang paling penting permasalahan bibitnya, apakah bibit sawitnya misalnya sumbunya atau mana punya itu harus jelas. Kalau dikasih asal bibit saja mereka merawat 5 tahun, tahu-tahu buahnya tidak ada. Ini harus diperhatikan juga, jadi saya minta 2020 berapa, 2021 berapa, tolong diberikan laporannya.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Baik Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ijin Bapak Ketua, terima kasih.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Sedikit saya lanjutkan, tapi itu nanti akan saya tuangkan di laporan dan laporan yang kemarin pun sudah kami singgung, tapi belum lengkap mungkin nanti kami tambahkan. Jadi setiap tahunnya 180 ribu hektar dan itu akan di 21 provinsi Mbak Kiki, terutama yang untuk PSR ini berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan, karena memang sawitnya sudah mulai tua di atas 25 tahun.

Nah, terkait dengan infrastruktur praktis belum banyak usulan di daerah. Ini yang sebenarnya kami jemput juga belum ada usulan di daerah. Kemudian riset dan development nanti bisa ditelisik Pak Ketua, yang kami pahami di BPDPKS ada Komisi Peneliti. Itu pun juga sudah kami kasih masukan tolong libatkan juga periset-periset dari lembaga riset lain tidak hanya mengandalkan disitu, di komisinya tidak cukup karena ini terlalu besar.

Nah, terkait dengan betul sekali Pak Ketua, kami laporkan bahwa terkait dengan benih sawit sendiri ini sedang diproses usulan kami ke BPDPKS untuk ada satu pihak ketiga yang mendeteksi benih palsu tanda petik. Benih palsu ini terkait apakah nanti itu bisa terdeteksi tenera itu yang kita harapkan atau Dura atau Pisifera. Ini ada riset yang namanya dengan DNA Riset dan kami gunakan itu untuk bisa mendeteksi benih-benih yang berkualitas bagus atau bisa menghilangkan

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ijin Bapak Ketua.

Bapak Kasdi, selama ini pakai bibit apa? Selama ini sawitnya pakai bibit apa dari BPDPKS, jenisnya apa?

DIRJEN PERKEBUNAN:

Baik, jadi yang dari PPKS itu yang banyak digunakan Bapak Ketua dan itu produktifitasnya antara 3,6 sampai 4 ton. Padahal misalnya di Litbang kami ini ada juga yang Bapak Kepala Badan nanti tambahkan itu ada yang sampai 6 ton, setara CPO maksud saya.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ini bicara TBS atau CPO?

DIRJEN PERKEBUNAN:

CPO Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Menghasilkan berapa?

DIRJEN PERKEBUNAN:

3,6 sampai 4 ton setara CPO per hektar produktifitas yang sekarang ada, rata-rata produktifitas CPO kita itu. Itulah posisi standing yang ada di lapangan dengan varietas yang ada saat ini. Nah, itu kami akan introduction dengan varietas-varietas baru yang memiliki potensi yang besar Bapak Ketua. Sekaligus mendeteksi potensi supaya tadi riset DNA itu memberikan jawaban ya kalau bisa tenera harus tenera kalau tidak tenera tidak usah diterima. Itu kira-kira Bapak Ketua upaya kami untuk bisa

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Baru upaya?

DIRJEN PERKEBUNAN:

Ya, karena riset DNA-nya belum disetujui oleh BPDPKS pendanaannya ada di sana semua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ya kalau tidak gitu semua jangan direkomendasi saja, anda kan Dewan Pengawas untuk apa, sementara untuk B20 Rp29,8 triliun Bapak dilibatkan tidak?

DIRJEN PERKEBUNAN:

Untuk bio diesel tidak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Yang menghasilkan uang Bapak, tapi giliran untuk riset Bapak tidak dilanjutkan cuman Rp1,9 triliun sekian yang ikutkan, inikan tidak adil dong.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Betul Bapak Ketua, ijin jadi saya sebagai Dewas sekaligus Dirjen Perkebunan yang bertugas untuk teknisnya kami sudah minta kepada Dirutnya bahwa ini tidak bisa tidak, ini sudah 3 tahun tidak disetujui. Saya masuk kira-kira 1 tahun belakangan untuk

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ya, bagaimana mau disetujui Pak, otomatis mereka punya jagoan, kalau tidak itu ya dipecat mereka itu. Dan itu tetap kita jalankan untuk Panjangnya, kalau perlu seperti usulan kemarin oleh Dirjen Keuangan, Bapak Dirjen Keuangan Bapak masih ingat bicara apa, malah dia minta dibuatkan Pansus. Karena dia tahu permainan ini sangat kotor sekali di BPDPKS ini.

Dulukan teman saya bekas Wamen akhirnya mengundurkan diri jadi Dirut BPDPKS, karena dia bilang "payah Mas, ini bahaya", ya sudah ya kita tahu itu semua. Mereka tidak memikirkan masa depan petani sawit, gunakan hati nurani kitalah.

Silakan.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Baik, kami lanjutkan sedikit kopi tadi banyak sekali ini. Saya juga ingin tegaskan sebenarnya kami mengalokasikan benih ini paling besar Pak, termasuk tadi pertanyaan Pak Andi Akmal. Mohon maaf nanti kalau kok sampai tidak sampai pada Dapil mohon maaf nanti saya cek lagi, itu yang harus di bagi pada Dapilnya. Ini paling besar di perbenihan...

KETUA RAPAT:

Saya potong dulu tentang kopi, diserahkan benih itu kepada perkebunan rakyat atau perkebunanya BUMN Pak.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Rakyat Pak, APBN tidak boleh untuk BUMN.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Saya sedikit juga Bapak Ketua, boleh Ketua.

Jadi saya begini Bapak Dirjen, jadi saya begini Pak Dirjen, saya semenjak di Komisi IV DPR RI tidak ada dari staf Bapak. Semenjak saya

disini Bapak belum ada stafnya itu menyampaikan kepada TA bahwa ada bantuan dari perkebunan tidak ada.

KETUA RAPAT:

Nanti bulan Juli ini.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Makanya saya tanyakan tadi Bapak Ketua, karena ini anggaran Bapak anggaran Rp1 triliun pengadaan Pak, ini hanya pengadaan saja sebenarnya anggarannya Dirjen Perkebunan kalau kita lihat. Makanya kami ingin Bapak sesuai dengan daerah kita seperti saya di Bone inikan ada perkebunan rakyat tebu, itukan harus jadi perhatian termasuk bantuan untuk pasca panen. Kita sampaikan ke Bapak tapi tidak ada realisasi juga. Jadi saya tidak tahu nanti kedepannya bagaimana program dari Dirjen Perkebunan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan dilanjutkan, karena teman-teman ini bulan Juli pertengahan Bapak Momon itu sedang Reses, sehingga harus ada yang dibawa walaupun 10 batang daripada tidak ada sama sekali. Silakan nanti listnya masing-masing yang butuh Mangga minta Mangga.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Baik, satu lagi karet Mbak kiki betul sekali, kami sedang mengencarkan untuk UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar). Sekarang sudah jumlahnya naik dari tahun kemarin 450-an sekarang 508 sudah. Itu yang nanti akan kita bantu dengan alat-alatnya untuk menaikkan kualitasnya Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan, interupsi boleh.

Tidak, ini barusan kita diskusi, saya hanya ingin memastikan Pak, seperti kemarin saya sampaikan juga dengan Bapak Sekjen bahwa mayoritas itu pemilihan lokasi untuk karet itu tolong tepat sasaran. Kemarin saya juga sudah sampaikan pemerataan itu penting jangan sampai terjadi nanti konflik, karena daerahnya perbatasannya tipis-tipis loh Bapak Sekjen, itu Bapak Antarjo kemarin habis dari situ kan paham. Itu saja penekanannya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan dilanjut Pak Dirjen, sudah cukup ya.

Silakan Bapak Momon.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Selanjutnya Kepala Badan Ketahanan Pangan.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Baik, terima kasih Bapak Sekjen.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan saran dan masukan dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI. Saya rasa pertanyaan yang mendasar adalah dari Bapak Adhi, karena kalau saya menjawab ini sebetulnya semuanya terjawab.

Bapak dan Ibu sekalian.

Bahwa Badan Ketahanan Pangan intinya adalah bagaimana kita menjamin ketersediaan dan juga kemudahan akses pangan masyarakat termasuk pemanfaatan. Produksi yang dilakukan oleh kawan-kawan Eselon I tentu harus bisa menjadi ketersediaan. Saya menggambarkan ketersediaan itu adalah produksi plus distribusi. Jadi tanpa ada distribusi maka barang tidak akan tersedia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami merancang, mendesain program kami yang pertama adalah kita adalah bagaimana kita mampu mendistribusikan pangan, tadi Bapak Akmal menyampaikan. Kami mencoba memberanikan diri karena di dalam Tupoksi kami itu ada distribusi dan cadangan pangan. Kami harus mengemban tugas itu, saya pasti ditanya gimana anda tidak mendistribusikan. Oleh karena itu, kami mencoba membuat mapping. Indonesia ini ada yang surplus, ada yang deficit, kami akui. Dan tentunya ini adalah tugas kita bagaimana dari yang surplus tadi bisa digeser ke yang defisit.

Di awal tadi kami sampaikan hanya beras yang kita kelola dengan baik sampai dengan hari ini Bapak Ketua, yang dikerjakan oleh Bulog karena dia mempunyai suatu downline yang cukup bagus. Tapi bagaimana dengan komoditas yang lain, bawang, cabai, telur, itu sama sekali tidak ada yang mengurus. Oleh karena itu, kami mencoba masuk kesana. Kami membagi tugas untuk kami, kami bertanggungjawab antar provinsi. Kepala Dinas Pangan di daerah kami minta mereka bertanggungjawab antar kabupaten. Namun demikian, kami sadari betul bahwa kami tidak mampu menjamin 100% karena memang kami tidak bisa menggunakan 100%. Tapi paling tidak apa yang kami lakukan adalah mem-balancing harga dan pasokan. Dalam hal ini misalnya kami memperoleh harga bawang di Brebes harga Rp15 ribu tapi di Aceh harganya Rp40 ribu. Kami bisa mendorong menghubungkan antara penjual di produsen dan pembeli di Aceh dengan harga, dengan margin yang kita tetapkan. Tetapi kita membantu distribusinya itu yang kami lakukan.

Yang kedua adalah terkait dengan akses pangan. Akses pangan ini kuncinya adalah kita mendekatkan bagaimana produksi dekat dengan konsumen. Salah satu yang kita lakukan yang tidak mungkin dilakukan oleh Eselon I lain adalah bagaimana membangun pertanian perkarangan. Ya ini mudah-mudahan dengan cara demikian masyarakat mempunyai kemudahan mengakses, paling tidak bisa menyediakan pangannya sendiri. Saya bermimpi masyarakat mampu menyediakan pangannya sendiri, apalagi kondisi COVID sekarang ini. *Alhamdulillah* Pak Abdullah, kami juga mempunyai program ini yang terus meningkat volumenya. Ya tahun lalu kita ada totalnya 2.900 sekarang meningkat 400 lagi, mudah-mudahan sampai 3.500.

Nah, kemudian juga juga Bapak Abdullah juga, kami juga punya kegiatan serupa yang skalanya besar. Pengadaan pangan itu satu unitnya Rp50 juta tapi kalau kami punya juga kegiatan yang besar lagi, yaitu sampai Rp200 juta. Itu yang namanya pengentasan daerah rentan rawan pangan. Saya mohon izin disiapkan kita punya peta rentan rawan pangan. Silakan Pak, saya melanjutkan beberapa penjelasan dulu, tapi kawan-kawan kalau bisa disiapkan satu lembar peta rentan rawan pangan kita.

Bapak dan Ibu sekalian.

Ini yang kami sudah petakan setiap akhir tahun. Indonesia itu yang merah-merah itu dan merah muda dan merah tua itu daerah rentan rawan pangan. Termasuk mungkin sebagian dari NTB dan NTT juga. Nah, ini yang kita coba intervensi dengan kegiatan pengentasan rentan rawan pangan. Yang tahun lalu ini hilang, tahun ini coba kami usulkan kembali, supaya mudah-mudahan ini bisa. Kalau ini jelas nanti apa yang seperti Bapak Abdullah sampaikan mau membentuk yang namanya Pertanian Pangan Mandiri, Desa Mandiri Pangan itu seperti itu bisa kita lakukan, karena satu cost unit aktifitasnya 200 juta.

Nah, kemudian yang ketiga tentu diversifikasi pangan. Tadi Ibu Endang menyampaikan kita kurang promosinya, iya saya akui Ibu, tapi kami sudah coba tingkatkan sekarang mudah-mudahan tahun depan bisa lebih lagi. Kami bahkan sudah membuat mapping....

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Bapak Kepala Badan, apa sih pengertian diversifikasi pangan, saya tidak paham.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Baik, jadi Bapak Ketua yang terhormat. Jadi kami fokus Pak, diversifikasi pangan yang kita lakukan disini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita beras.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Dengan cara bagaimana?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Dengan cara kita mempromosikan bahan pangan pokok local non beras. Seperti halnya singkong, talas, pisang, jagung dan kemudian sebagian mungkin sukun dan sagu.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saya kasih tahu Bapak, kalau Bapak kerja sendiri sampai kiamat pun tidak akan selesai, itu yang pertama. Yang kedua, melibatkan daerah tetapi daerah hanya sementara. Dulu saya masih ingat tahun 2012 Sumatera Utara melakukan itu, setiap restoran rumah makan menyiapkan pisang rebus atau singkong rebus. Jadi sebelum makan nasi dia makan itu dulu, tapi hanya sementara. Begitu pula di Lampung, Lampung memproduksi beras dari singkong waktu itu Ketuanya namanya Bapak Romy dari PPP. *Alhamdulillah* habis louncing habis juga pekerjaannya. Ini butuh kerja sama pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan baru bisa berjalan. Kalau hanya distribusi pangan ngomong doang tidak ada gunanya Pak, itu harus didoron. Kalau hanya dari misalnya Permen belum tentu bisa kecuali Keppres atau memerintahkan Menteri Dalam Negeri, bilang sama Menteri Dalam Negeri buat Permen, setiap Kepala Daerah wajib bla, bla, bla, kalau Bapak ngomong tidak ada gunanya Pak, pasti tidak didengar Pak. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri kemungkinan akan didengar oleh Gubernur, Walikota, dan Bupati. Jadi Bapak jangan sia-sia Pak, capek kerja Pak, diversifikasi pangan tetapi tidak berjalan ya Pak.

Jadi nanti usulkan sama Menteri supaya bicara dengan Menteri Dalam Negeri ada masalah itu. Setiap kegiatan wajib itu baru bisa jalan, itupun dengan bukan hanya sebulan atau dua bulan terus menerus, misalnya dengan pemberitahuan, himbauan atau apa. Iya Pak, jelas.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Bapak Ketua, ijin melaporkan juga kami sebetulnya kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada surat Bapak Menteri Pertanian, Ke Mendagri, dan Mendagri sudah bersurat kemudian seluruh Gubernur dan Bupati terkait dengan pengalaman-pengalaman kita yang lalu. Kami sudah lakukan itu.

Nah, kami sekarang sedang menunggu waktu yang pas untuk pencanangan nasionalnya mudah-mudahan kita bisa berharap Ibu Presiden nanti yang mencanangkan. Kemudian tentu pengawalan kita seperti yang disampaikan, promosi mohon kalau sempat saya sudah memamanayangkan ini iklan di beberapa media, termasuk media TV dan itu terus menerus kita lakukan. Sampai kami sudah mengidentifikasi juga Pak Ketua, UMKM-UMKM yang memproduksi singkong keju, yang memproduksi jagung yang siap di

konsumsi kami sudah identifikasi. Dan kami terus bantu mereka untuk bisa meningkatkan. Dan TTI-TTI kita juga kita harapkan membuka itu Pak, jadi kita memang mencoba pengalaman yang lalu menjadi bahan pemikiran kami. Nah, itu Bapak Suhardi kira-kira jadi kemungkinan tadi Bapak Abdullah, Bapak Akmal, Ibu Luluk juga harapannya demikian. Mudah-mudahan ini semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian.

Yang paling terakhir tadi, cold storage Ibu Luluk. Ini memang di dalam distribusi ini kami juga tahun lalu sudah merencanakan ada *cold storage* di tiap-tiap ibu kota provinsi tadinya, tapi akhirnya kita batal juga karena pemotongan, tapi kami usul lagi sekarang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian-bagian kita mengatasi itu. *Cold storage* sangat penting Pak.

Saya rasa itu, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Bapak Dirjen PKH.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN:

Baik, terima kasih Bapak Sekjen.

Yang terhormat Bapak Ketua Komisi IV DPR RI, Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Kami mencoba untuk menjelaskan mohon ijin terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terutama yang isu-isu actual terkait dengan impor sapi bakalan, kemudian terkait dengan impor daging kerbau. Nah, terkait dengan impor sapi bakalan ini sebenarnya sudah digodok dari dulu Pak, terus sudah ada kajian dari UNPAD. Namun, dari awal kami sudah membahasnya dan kami sampai ajukan sudah kepada Bapak Menteri, namun Analisa 5% itu sebenarnya mereka yang impor sapi bakalan itu harus ada indukan 5%. Esensinya sebenarnya adalah bukan untuk kapasitas kandang, sebenarnya bagaimana itu mampu menggerakkan petani-petani di sekitar. Untuk disuruh memelihara sapi, sapi betina, sapi indukan yang datang akibat mengimpor bakalan itu. Itu sebenarnya esensinya, namun karena mereka merasa berat akhirnya diukurlah sesuai dengan kandangnya.

Dalam tindaklanjut itu Bapak Menteri waktu itu masih Bapak Menteri Bapak Amran belum disetujui jadi tetap 5%. Nah, sekarang karena ada COVID kami sudah mengajukan kajian lagi adanya relaksasi itu. Termasuk kerja sama Indonesia dan Australia terkait dengan itu untuk tax loan, itu juga sudah disetujui untuk diberikan relaksasi. Itu kami ingin sampaikan terkait sapi bakalan.

Terkait dengan daging kerbau, kami sebenarnya dari awal mengajukan sebenarnya tidak sebanyak yang diputuskan dalam Rakortas. Dan sejarah

anunya masih kami simpan rekaman. Begini kami sampaikan Bapak-bapak mohon maaf, dengan segala hormat kami jelaskan bahwa daging kerbau ini sebenar-benarnya ada barter dagangan dengan India, bukan mafia. Barter dagangannya maksudnya begini, tax terkait dengan ekspor sawit kita yang terbesar ke India itu dalam setahun tahun 2018 kalau tidak salah dalam 3 kali dinaikkan dalam setahun. India minta keringanan terkait dengan banyaknya impor mereka terkait sawit. Untuk itu, India minta barter “boleh tidak daging saya masuk ke Indonesia dengan demikian sawit anda tidak saya ganggu”, begitu mungkin bahasa kasarnya. Karena kami diperingatin oleh Bapak Menteri Perdagangan waktu itu agar jangan terlalu ditahan karena terus terang saja ini akan mengganggu sawit, ekspor sawit kita. Permasalahan sekarang kita mau ekspor sawit kita diganggu kita potong itu, mungkin ini butuh bukan saja kajian teknis tetapi politisnya. Itu yang perlu mungkin kita anu Bersama. Jadi kami untuk khusus kerbau keputusan ada di Menko Perekonomian, karena diputuskan dalam Rakortas bukan oleh Menteri Pertanian.

Demikian barangkali penjelasan kami terkait dengan serapan kami ada yang nol, kami sebenarnya terus terang malu juga. Dapat kami jelaskan bahwa dalam serapan itu karena seringnya terjadi revisi perpindahan dari kambing jadi sapi, sapi jadi kambing, kambing jadi domba itu, akhirnya kami revisi keluar revisinya baru tanggal 16 Juni. Nah, sekarang kami dengan segala hormat mohon CPCL-nya jangan akhir Juli Pak Ketua, kalau bisa makin cepat semakin baik sehingga CPCL ini sebenarnya dasar pijakan kami untuk melakukan lelang. Jadi semakin cepat CPCL disampaikan ke kami, makin cepat kami melakukan lelang. Jadi semakin lama mungkin saja akhir Juli kami baru bisa melakukan pelelangan.

Nah, itu mungkin point-point yang terkait dengan kinerja kami. Kemudian yang terkait dengan bantuan-bantuan kami sangat memahami terutama Ibu Gubernur dari NTT terkait dengan Sumba, kami lama untuk bagian Bali, NTB, NTT Ibu Gubernur. Kami membebaskan penyakit Tahun 2015 di Sumba, karena memang kami berencana Sumba itu jadi sentra Sapi PO di Indonesia. Namun, memang kami yakin mutu genetiknya akan baik.

Kami kira demikian Bapak.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Ketua.

Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Dirjen PKH bahwa memang kita punya kepentingan sawit di India. Defisit perdagangan India dengan Indonesia, tapi kan kita juga harus melihat bahwa persyaratan yang ditentukan oleh Indonesia harus dipenuhi oleh India jangan karena hal seperti itu kita harus terima begitu saja.

Yang kedua, tadi saya tanggapi Bapak PKH adalah jangan beli mobil seperti mobilnya Bapak Sudin, aksesorisnya terlalu banyak. Rp1,2 miliar aksesorisnya harga mobilnya hanya Rp400 juta, sama dengan program yang Bapak lakukan ini terlalu banyak aksesoris. Saya melihat pakannya terlalu banyak, biaya kesehatannya terlalu banyak, tidak berimbang dengan yang sesungguhnya yang menjadi kebutuhan kita, jadi saya minta diseimbangkan pada anggaran 2021 Bapak Dirjen.

Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tadi dikatakan defisit neraca perdagangan, Pakistan ngancam kita kok. Kalau beras saya, mangga saya tidak bisa masuk ke Indonesia saya stop impor CPO, nyatanya sampai sekarang masih. Bapak tahu tidak textile India, kacang-kacangan, kacang tanah yang masuk ke Indonesia itu sebagian besar dari India. Jadi kalau bicara neraca perdagangan saya tidak setuju. Bagaimana pun India butuh CPO kita. Dan tadi dikatakan dalam Rakortas, siapa Rakortas yang memimpin, belum tentu Menko. Jangan mentang-mentang namanya Rakortas itu Deputi terus diikuti. Pak, Bapak punya wewenang sendiri, Bapak punya peraturan, Bapak punya Undang-Undang, tidak boleh orang lain melanggar. Ini yang penting, kemarin di sini pun saya mengatakan sama Dirjen Hortikultura sama Dirjen Karantina seperti itu ya tidak bisa. 30 ada RIPH pemasukan bawang, emang lu siapa? kita punya hak sendiri, punya Undang-Undang tersendiri, mau nggak Kementerian Perdagangan kita intervensi. Kalau gitu yang sudah dapat RIPH tidak perlu ada SPI, kita balikin gitu saja.

Tadi anda mengatakan bahwa salah pengertian yang 5% kandang. Permentan Nomor 41 Tahun 2019 khususnya Bab 11 Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha peternakan, koperasi peternakan, kelompok peternakan, yang melakukan pemasukan bakalan wajib memasukkan indukan sebanyak 5%. Kalau mereka diseruh melanggar nggak berani, disitu jelas wajib melakukan 5% dari setiap rekomendasi implementasi Permentan terkendala pada keterbatasan. Sekarang kalau misalnya sapi indukan dimasukkan iya toh, itu kan gak mungkin langsung dipotong. Dari 350 kilo butuh 3 bulan untuk satu hari satu kilo atau 150 hari, berarti 150 kilo berarti sudah 500 kilo, kan nggak mungkin sapi indukan ini dipotong yang 5% tadi. Coba kalau begitu dia mau masuk lagi yang 5% ini belum bisa diapa-apakan masuk lagi 5% lagi dari setiap luasan kandang. Jadi kalau kandangnya itu luasnya sejuta ekor coba berapa kalau 5% yang wajib dimasukkan, ini jelas ini.

Jadi saran saya kenapa sih kita tidak memperbesar peternakan bangsa sendiri. Kenapa sih Bapak ini sebagai Dirjen kok mau sukses tapi mau dibelit-belit oleh peraturan yang kita buat sendiri. Yang penting selama negara tidak dirugikan, kebutuhan pangan rakyat cukup, kemudian juga peternak kecil ini. Saya tidak bisa bicara peternak besar, saya bicara peternak kecil, peternak kecil itu untungnya Bapak cuman waktu akan tanggal 31 nanti, Idul Adha itu saja selebihnya pas-pasan, kalau mau kaya nggak mungkin mustahil

Sekarang impor daging kerbau dari India tujuannya adalah mengantisipasi kekurangan daging pada saat Idul Fitri. Keluarlah 100 ribu untuk Bulog, 50 ribu untuk Berdikari, 20 ribu untuk ... Berdikari punya Gudang tidak? ini yang kendalanya. Yang kemarin masuk 3.500 ton dari India baru Berdikari. Itu saya dapat laporan makanya kemarin saya tidak mau debat saja disini dengan Direktur Utamanya itu daging untuk Malaysia menghadapi lebaran tetapi karena Malaysia Lockdown, maka tidak bisa masuk ke Malaysia. Sekarang coba pikirkan tiba-tiba Berdikari dapat GPS impor, punya peternakan nggak? nggak punya, minjem, coba gimana nggak harga ayam jatuh. Coba regulasi ini dihitung ulang, peternak besar wajib memiliki berapa layer dari hulu sampai hilir. Anda punya pabrik pakan, anda dapat GPS, anda dapat pembesaran, anda harus punya rumah potong, anda punya pembekuan, anda harus sampai ke ujungnya, baru peternak kecil ini hidup, inikan tidak, coba kita bayangkan lah. Saya kalau saya pulang ke Lampung sampai saya kadang-kadang jemput karena saya takut peternak kecil kumpul di kantor saya, Bapak kan wakil rakyat masa aspirasi kami nggak didengarkan. Terus kalau saya dengarkan saya bisa apa kalau kita tidak ada kerja sama yang baik. Saling mengisi, saling mendengarkan untuk mencari solusi jalan keluar, kalau begini terus susah.

Tadi saya lihat juga anggaran Dirjen PKH, sekian puluh miliar untuk pakan gembala, udahlah tidak usah bikin program-program yang tidak-tidak. Bantu rakyat dengan memberikan sapi indukan yang sekian ratus miliar, yang paling penting penyaluran tidak salah, pengadaan tidak salah dan pengawasannya yang paling penting, itu saja. Kalau perlu bikin kontrak sama penerima, "eh, kalau kami ada penyelewengan saya laporkan ke Polisi". Saya selalu begitu, dalam Alsintan saya bilang saya bawa Koramil, saya bawa Polisi, saya bawa Camat, "eh, tidak ada pungutan 1 Rupiah pun, kalau ada namanya maling", saya bilang. Ya konsekuensinya apa? Ya orang tadi, petugas tadi yang saya undang harus saya kasih uang bensin. Gitukan saja Pak, begitu juga dengan peternakan, bikin perjanjian terjadi penyimpangan apa, termasuk oknum dinas di provinsi. Kalau pengadaannya di provinsi pasti ada penyelewengan, oleh oknum bukan dinas. Misalnya ada 9 ekor sapi, pengadaan oleh Dinas memang uang dari pusat langsung ke kelompok, tetapi kelompok harus wajib belinya ke si A, kalau tidak anda saya cari masalah atau uangnya dipersulit dicairkan, atau yang tidak ada dicari-cari. Pastilah dapat 9 saya jamin, 2 pasti bermasalah.

Ini untuk pembelajaran kita semua, agar apa? Saya sih tidak perlu peternak besar, saya perlu peternak rakyat kecil. Sudahlah tidak usah pakai gembala tidak usah, pakan tidak usah, berikan sapi indukan pengawasan. Itu saja Bapak Ketua.

Terima kasih.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Interupsi Pimpinan, tambahan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tambah lagi interupsi.

Silakan 1 menit ya.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Siap 1 menit.

Terima kasih Pimpinan.

Jadi Bapak Dirjen, kalau kita itu hitung-hitungan Bapak Dirjen pakai nalar dan pakai logika. Kami menganggap bahwa apa yang diminta oleh teman-teman Gaposindo dianggap enteng saja sama saudara Dirjen ini. Jadi kayak angin lalu saja anggapannya bahwa Bapak bisa berpikir dengan logika, seumpama Bapak impor orang bisnis ini untungnya berapa sih Pak? Paling juga 2-3 bagus-bagusnya 4%, kalau mungkin 5%. Berarti kalau mereka datangkan 1000 itu ada 5% indukan ya tentu wassalam, kan kira-kira begitu logikanya. Nah, tugas kita semua kita jadi negara ini mempunyai tugas bagaimana kita swasembada, manggarkan itu berapa indukan datangkan kalau memang tahun depan “oh, kita perlu tambahan indukan, kita perlu 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta sampai 5 tahun”, ya lakukan biar anak-anak kita nanti tidak impor terus. Jadi jangan sampai berharap impor dan impor. Bagaimana bahwa sampaikan di Ratas, jangan bicaranya di Ratas, Ratas karena di sana ada sawit terus kita dikasih kerbau oke, enak benar kita ini negara berdaulat Pak, kok kita kayak ringkish banget gitu, kayak orang loyo, ini negara besar ini, berarti kita ada yang salah dalam mengelola negara ini.

Bagaimana kita Bersama-sama duduk disini mengelola negara ini dengan benar. Jangan dari dulu kala ini impor, ini masalah, ini masalah, semua kok masalah. Orang buang duit saja kok tidak bisa, buang duit saja kok salah. Mestinya kita diajarin sama orang tua, nyari duit bukan jadi Pimpinan semua, duduk buang duit saja sasarannya tidak benar. Sapi bukan bertambah tapi sapi malah berkurang, sapi dikasih siapa, tapi malah pada disunat. Jadi tolonglah bikin program duit berapa, kami pun juga siap, semua yang di Badan Anggaran baik ini lintas fraksi siap untuk mendukung program anda semua, selama memang sasarannya jelas, tidak punya pikiran untuk mencari keuntungan dari anggaran itu sendiri. Kalau kita bareng saya yakin pasti berhasil, tapi bahwa duduk bareng itu penting, duduk Bersama itu penting. Untuk cari apa? Cari solusi, untuk apa? Untuk keberhasilan, tujuan apa keberhasilan itu? Untuk 267 juta rakyat Indonesia.

Kalau kita pengalaman di daerah timur, umpamanya di sana memelihara 100, 200, 300, daerah timur itu mana saja terserah. Titik mana yang mau kita maju, berapa tahun kita mau swasembada, perlu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi kita ada progress Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya angan-angan. Kalau duit tidak ada, semua duit tidak ada Pak, namanya program ya sama. Kalau program semua diduitkan semua ya mana yang prioritas dan mana yang tidak. Jadi semuanya mana yang bisa berhasil,

tiap tahun ada yang berhasil, tiap Dirjen ada yang berhasil, tiap Dirjen ada yang bisa ekspor, tiap Dirjen ada yang mengurangi impor, kan kira-kira kesana.

Jadi gimana ini jalannya pertanian, inilah yang menjadi tumpuan pangan negara dan bangsa kita, kekuatan negara dan bangsa kita ke depan kita harus kuat semuanya. Nah, ini menjadi tolak ukur penting. Intinya bahwa kenapa kita duduk bareng membahas uang, ini uang itu bagaimana sasaran tepat. Kita ini di Pemerintah itukan gampang membuang uang tugasnya Pak, membuang uang saja kok salah. Maksud saya bagaimana kita duduk ini membuang uang ini benar sasarannya, kalau kita jualan soto ya kita untung dari soto itu, tapi bukan kita membuang soto, tapi kita malah rugi motor dan mobil.

Kira-kira itu saja Pimpinan yang saya hormati.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mederka!!!

KETUA RAPAT:

Waktu tinggal 20 menit, kami persilakan Bapak Sekjen ini biar selesai semua nanti diperjelas oleh Anggota.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Silakan Kepala Badan Litbang kalau ada yang perlu dijawab.

KETUA RAPAT:

Silakan Balitbang.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Terima kasih Pimpinan dan Anggota atas masukan dan sarannya. Pertama, sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan saya ingin menyampaikan beberapa tugas selain dari penelitian, pengembangan dan produksi benih sumber. Badan Litbang Kementerian Pertanian, mempunyai beberapa unit balai besar. Yang pertama untuk pengujian alat mesin pertanian dan beberapa alat-alat yang lain sebelum beredar ke pasaran itu diuji di Badan Litbang Kementerian Pertanian itu Balai Besar mekanisasi pertanian, semua tractor, hand tractor, pompa, sebelum diedarkan ke masyarakat itu Balitbang menguji.

Yang kedua, semua produk pupuk, pestisida sebelum beredar di Indonesia diuji di Balai Penelitian Tanah kita yang ada di Bogor. Yang terakhir Bapak Ketua, saya menyampaikan kita punya juga Balai Besar Penelitian

Pertanian yang merupakan lab rujukan nasional COVID-19. Jadi kita kalau bicara corona kita sudah meneliti corona sejak tahun 91. Jadi kenapa juga kemarin Bapak Ketua, kita bisa menghasilkan anti virus corona karena memang teman-teman di Balai Besar ini selain menghasilkan vaksin juga sudah menghasilkan beberapa anti virus terkait dengan unggas dan ternak yang lain.

Masukan Bapak Salim dan yang lain-lain dan yang sangat konstruktif, ini akan memicu kita Bapak Ketua, Bapak Salim, untuk lebih baik lagi. Memang harapan kita semua apa yang dihasilkan oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian tentunya dapat digunakan Dirjen teknis dan bisa meningkatkan produktifitas petani, pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan di masyarakat. Oleh karena itu, ke depan Bapak Salim kita akan mendorong riset kolaboratif, inovatif namanya. Jadi semua yang kita hasilkan, semua yang kita program itu memang sudah apa yang menjadi harapan petani, apa yang menjadi harapan industri memang kita sudah bagi dua, yang mana menjadi publik domain dan yang mana yang akan menjadi komersialisasi dan itu kita salurkan.

Mohon ijin Bapak Ketua, Badan Litbang Kementerian Pertanian dari semua Kementerian/Lembaga 5 tahun terakhir ini kitalah yang paling banyak menemukan vaksin dan royalti dari semua Kementerian/Lembaga Litbang yang ada di Indonesia. Namun demikian, kita masih terus mendorong ini sehingga semua hasil-hasilnya itu bisa dirasakan manfaatnya oleh petani. Dan ini akan kita dorong terus.

Terkait dengan produk eucalyptus ini Bapak Ketua, kalau Bapak Ketua mengizinkan kita siap rencananya di atas tanggal 20 ini ijin edar sudah keluar dari BPOM dan produksi masalahnya sementara berlangsung mungkin di atas tanggal 20 ini sudah tersedia dalam jumlah yang banyak. Kalau ijin Bapak Ketua, kita bisa membagi juga untuk teman-teman untuk seluruh Dapil di seluruh Indonesia, kalau diijinkan Bapak Ketua. Di atas tanggal 20 *Insya Allah* sudah tersedia.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah dijawab siap kok masih interupsi.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Bapak Fajri jangan gantungannya doang, kayak yang kita terima juga, kita ngasihnya enak. Ditunggu Bapak Fajri ya.

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN:

Siap.

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu sekalian.

Tanggapan dan jawaban telah selesai, sudah ada komitmen dari jadi semua Anggota ini mengapresiasi Bapak Balitbang atas keberhasilan dan tadi semua sebelum pulang kampung orang Maluku kan butuh kan ini nelayan, nelayan butuh tidak ini? Butuh, disiapkan sama kalungnya itu, jangan satu nanti satu. Kita sepakati siapa yang akan memperjelas atau masih tidak jelas atas saran dan pendapat para pejabat Eselon I.

Silakan yang terakhir siapa pejabat Eselon I yang belum Bapak Momon.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN:

Baik, terima kasih.

Yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota.

Ada beberapa hal mungkin yang ingin kami klarifikasi atau kami sampaikan. Pertama, kami terima kasih semuanya atas berbagai saran, support dan pertanyaannya. Mungkin wabil khusus kalau Bu Endang, kemudian Bapak Fakhry, Ibu Julie terima kasih atas saran-sarannya luar biasa, kita akan tindaklanjuti. Kemudian mengenai penyuluh Ibu Luluk, tadi Bapak Fakhry juga sudah menyampaikan bahwa ratio penyuluh dengan jumlah desa ini memang masih jomplang kurang lebih satu berbanding dua. Jadi kemampuan kita sebetulnya penyuluh itu kemampuannya covering-nya 50% memang. Jadi kalau disampaikan seperti Ibu, itu memang sangat mungkin artinya 50% itu. Tapi pada saat Ibu sebetulnya tadi menyampaikan itu saya langsung kontak ke kordinator penyuluh di Kabupaten Sragen dan *alhamdulillah* sebetulnya tanggapannya baik. Nah, kemudian mereka mengirimkan photo-photo aktifitas dengan open camera di Kabupaten Sragen. Jadi terima kasih Ibu Luluk.

Kemudian Riezky, Ibu Renny Astuti terkait dengan program yes. Ini sebetulnya program kerja sama dengan Kementerian lain dengan Bappenas, dengan Kemen PUPR, Kementerian Keuangan, Kementan, bahkan dengan foundation. Jadi yang menetapkan lokasi adalah bareng-bareng itu, beberapa kementerian. Nah, untuk yes memang cuman 15 kabupetan Ibu Kiki, jadi kelihatannya memang masih jauh dengan apa yang diharapkan. Namun demikian, tadi kriterianya apa memang ada kriteria khusus memang Ibu, misalnya kalau PUMP itu tingkat akhir dari Polbangtan atau mahasiswa fakultas pertanian yang bisa memberikan proposal nanti kita proposalnya evaluasi. Kemudian yang dapat proposal itulah yang akan dibiayai dengan proses PUMP. Nah, kurang lebih demikian. Nah, bagaimana cara mengaksesnya itu sebetulnya ada di website Badan SDM atau di Polbangtan juga ada. Jadi demikian Ibu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Biar selesai dulu.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN:**

Saya sudah cek barusan pada saat Ibu bertanya ke saya, saya langsung WA. Jadi sebetulnya kalau Manokwari sudah tuntas Ibu, *alhamdulillah* jadi akreditasinya sudah bagus dan sudah baik lagi. Untuk Polbangtan Medan memang masih dalam proses. Jadi kemarin memang ada sedikit trouble, ada perubahan Juknis Ibu. Jadi kebetulan jatuh temponya memang bulan lalu, kemudian sudah mengirimkan dokumen Juknisnya berubah akhirnya diulang. Pada saat diulan ini karena ada COVID Juknisnya berubah ya memang tidak terlalu mulus, jadi upload dan segala macam tidak terlalu mulus sehingga dokumen sekarang sudah Ibu, tapi visitasi belum. Jadi Badan Akreditasi Perguruan Tinggi sudah janji, visitasi akan dilaksanakan bulan Juli ini. Dan setelah visitasi *Insya Allah* biasanya seminggu sampai dua minggu itu sudah turun akreditasinya. Jadi terima kasih Ibu atas arahannya.

Kemudian untuk calon tenaga terampil dan ahli itu sebetulnya tenaga-tenaga alumni SMKPP dan Polbangtan. Jadi kalau SMKPP memang disebutnya sebagai tenaga terampil, jadi calon tenaga terampil kalau untuk alumni Polbangtan disebut calon tenaga ahli. Jadi saya kira demikian Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih Bapak Hasan yang baik hati dan ganteng.

Jadi begini Pak, terkait dengan penyuluh terus tadi dengan “yes” yang kata Bapak program “yes” ini berkolaborasi dengan Kementerian lain. Nah, saran saya bikinlah 50 orang DPR RI ini jadi pilot project Bapak, itu saja. Saya sarankan begitu, habis ini kita diskusi bisa Pak. Begini, kalau bicara pilot project kita kan bisa ini kayak Bapak Johan itu banyak sekali itu relawan dia di NTB itu yang bisa kita, *youth entrepreneurship services*. Jadi maksudnya Bapak, anak jaman sekarang itu kuliahnya saja pertanian Pak, jadi disuruh jadi petani tidak mau Pak. Nah, disinilah program itu masuk. Kami kan punya banyak anak muda Pak, apalagi kami yang ABG-ABG ini kecuali Bapak Hasan sudah tidak ABG ya Pak. Nah, jadi saya mohon Bapak ayolah

membuka diri yang penting kita mendorong pertanian ini kembali ke hakekatnya.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua, setengah menit boleh.

KETUA RAPAT:

Silakan, kalau orang Aceh tidak yakin saya setengah menit.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik, Bapak Ketua.

Saya kira gini saja Bapak Ketua, karena kita sayang dengan beliau ini. Ini sekedar masukan Pak, di oknum-oknum ini indikasi di badan yang Bapak Pimpinan

KETUA RAPAT:

Catat Bapak Dirjen.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ada mainan di Kapus Pendidikan Pak, ini masukan semoga masukan ini bermanfaat dan *Insyah Allah* mungkin masukan ini salah. Kapus Pendidikan tidak mengerjakan Tupoksinya tetapi hanya mengerjakan yang milenail saja Pak. Ini masukan dengan Bapak rasa kasih sayang sama Bapak saja ini Pak.

Terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Silakan Luluk.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Terima kasih Bapak Dirjen SDM, tadi penjelasannya sudah bagus cuman melengkapi yang sudah ditanyakan teman-teman, bahwa belum tentu lulusan sekolah pertanian itu tahu betul sebenarnya tentang dunia pertanian. Saya punya pengalaman ini kemarin saja bagaimana orang-orang yang bukan dari kampus tetapi justru melakukan fungsi seperti sekolah pertanian. Karena apa? Sekumpulan orang-orang muda selalu datang langsung ke

tempat pusat dimana dia bisa menemukan benih, kemudian cara pembenihan, penyemaian, sampai kemudian hasil akhir. Andaikan model-model seperti ini kemudian bisa dapat dukungan dan fasilitasi dari Kementan saya kira akan bagus sekali. Karanganyar itu Pak, nanti kita bawa kesana.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN:

Siap Ibu Luluk, kami punya program P4S nanti kami datangi.

KETUA RAPAT:

Sudah cukup, mau 5 tahun ingin tidak modal bilang.

Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati,
Bapak Sekjen dan para pejabat Eselon I.

Sebagaimana tadi telah banyak usul dan saran khususnya untuk marilah kita *take off* di 2021 yang inovasi-inovasi cukupkan buat *pilot project* sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI, kita kan punya hak budgeting, pengawasan, mau bicara tentang tadi dari BUN ayo mau apa yang ditanam ini di masing-masing daerah ini yang cocok buat hamparan. 54 kita sepakat itu dulu, sehingga hak budgeting teman-teman tidak alot, semenit selesai, pilihannya apa dan seterusnya. Pengawasan ini kalau gagal ini masuk penjara semua, *Insyah Allah* tidak lah karena sudah selesai perutnya teman-teman Komisi IV DPR RI inikan selesai semua kan.

Yang kedua milenial kita sepakat bagaimana di 54 ini buat *pilot project* apa milenial yang mau kita gerakkan. Yang milenial baik laki-laki maupun perempuan, tadikan banyak bicara penyuluh-penyuluh, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin nanti akan dikagetkan banyak PNS penison di Dinas Pengairan itu yang menjadi ujung tombak dan ujung tombok produksi ini berjalan atau tidak, siapa kalau di Jawa itu Ulu-ulu pengatur dan pembuka pintu air. Dia meniggalkan istri sebelum Subuh, lainnya inikan enak-enak ngelonin istri. Dia sebelum Subuh Ba'da Sholat Tahajud selesai dia berangkat ke sawah ngatur dia Pak. Ini sudah banyak pension karena dulu oleh Bapak SBY ini moratorium dan selanjutnya tidak pernah mengangkat PNS lagi. Ada momentum anak muda untuk di kerjakan di pintu air ini, kan harus ada pelatihan. Yang membuka pelatihan kan teman-teman 54 ini kan lumayan, rekrutmennya barangkali dari teman-teman ini buat TS di 2024, itu Bapak Sekjen. Perlu dilatih Ulu-ulu kalau di Jawa, sampean kan wong Jowo. Apalagi pintu airnya PSP suruh ngecek kelapangan Bapak Dirjenya banyak pintu air itu yang sudah rusak.

Itulah barangkali Bapak Sekjen untuk selanjutnya mari kita simpulkan Bersama-sama, supaya kesimpulan ini sampai dengan pada aspirasi yang mampu kita akomodir Bersama-sama. Yang pertama, saya ingin bacakan kesimpulan.

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam merencanakan program dan kegiatan fokus pada peningkatan produksi guna pemenuhan kebutuhan pangan domestik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi maju dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian tidak terpaku terhadap pagu indikatif yang sudah disampaikan sebelumnya, namun fokus terhadap program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu terkait produksi. Dengan demikian kebutuhan anggaran masing-masing Eselon I akan tergambarkan secara komprehensif.

Sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti temuan BPK dan memberikan saran/rekomendasi yang konstruktif kepada seluruh Eselon I, sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pertanian.

Sepakat? Memang Tupoksinya Irjen.

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam melakukan perencanaan anggaran tahun 2021 diawali dengan menentukan terlebih dahulu program utama, tujuan dan sasaran, serta volume yang dibutuhkan secara cermat dan seksama, sehingga akan diperoleh rancangan program dan kegiatan terpadu yang didukung dengan penganggaran yang tepat.

Sepakat, kan normative ini.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam penetapan program, kegiatan, dan anggaran didasarkan kepada output dan sasaran yang menunjang program utama Eselon I teknis yang menangani produksi komoditas pertanian.

Sepakat?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Sedikit Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Tadi kita minta ada keseimbangan anggaran antara tugas pembantuan dengan pengelolaan pusat. Saya minta supaya dimasukkan itu.

KETUA RAPAT:

Masuk kelima Pak?

Anggaran didasarkan kepada output dan sasaran yang menunjang program utama Eselon I teknis yang menangani produksi komoditas pertanian, dengan perimbangan keuangan.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Pengelolaan pusat dan daerah.

KETUA RAPAT:

Sehingga ada komitmen kan kalau Bupati dan Walikota ada komitmen untuk satu sub unit yang mau dikembangkan barangkali itu yang perlu kita support anggarannya, kan itu kan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Supaya anggaran tidak di daerahkan semua Pak, misalnya kesannya perkebunan dari 100% kalau bisa 40% di pusat. Setuju prinsipnya.

KETUA RAPAT:

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam penetapan program, kegiatan, dan anggaran didasarkan kepada output dan sasaran yang menunjang program utama Eselon I teknis yang menangani produksi komoditas pertanian, dengan perimbangan anggaran di pusat dan daerah.

Setuju kan?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, khususnya melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) agar meningkatkan target output hasil penelitian, pendidikan, dan latihan pertanian, yang bisa langsung dirasakan oleh para petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di lapangan.

Sepakat?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMAN, Ms.):

Setuju tetapi ada perubahan sedikit, jangan latihan tetapi pelatihan.

KETUA RAPAT:

Salah ketik saja, maksudnya ke sana Pak.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, khususnya melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) agar meningkatkan target output hasil penelitian, pendidikan, dan pelatihan pertanian, yang bisa langsung dirasakan oleh para petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian di lapangan.

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Pertanian dalam upaya untuk percepatan kegiatan agar dalam melakukan alokasi anggaran Tugas Perbantuan memperhatikan kinerja dari Satker di daerah. Selanjutnya, Satker daerah dengan kinerja yg lambat atau kurang baik agar anggaran Tugas Perbantuannya dipertimbangkan untuk ditarik ke pusat.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ini yang paling setuju Pak?

KETUA RAPAT:

Iya.

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian dan populasi ternak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat, antara lain seperti umbi-umbian, kopi, pinang, pala, kelapa genjah dan kerbau Sumbawa.

Sepakat kan, karena itu aspirasi tadi kan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Kalau soal tebu tadi dan gula dimana tempatnya?

KETUA RAPAT:

Potensi lokal, bicara lokal ini Ibu Luluk, mengakomodir pendapat orang Maluku tadi. Inikan tidak memunahkan tanaman-tanaman nenek moyang kita, memelihara tetap.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ibu Endang dulu, yang mana Bu, masuk 8. Tanaman potensi lokal termasuk ternak.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Iya, dan ternak lokal antara lain.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu tidak usah menyebutkan jenis tanaman saja. Potensi lokal baik tumbuhan maupun ternak, kan gitu kan masuk semua itu barang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Iya, setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju kan?

Ibu Alien yang kau maksud itukan.

Ya sudah hapus semua jenisnya, langsung tanaman dan tumbuhan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Yang dihapus dari antara lain, tumbuhan dan tanaman sudah ada sebetulnya diproduksi komoditas pertanian dan populasi ternak. Jadi sudah tergambar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal.

KETUA RAPAT:

Tidak usah menyebutkan jenis tanaman kan.

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian dan populasi ternak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat.

Sudah sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan agar memperhatikan situasi harga karet dan kopi dunia yang sangat tidak kondusif bagi petani karet dan kopi serta memberikan bantuan yang bisa memulihkan ekonomi petani karet.

Kok hanya karet ini, fokus karet ini ya, sepakat?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Jangan cuman karet saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Benar kan, belum sejam sudah ada yang protes.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Ibu Alien ini fokus karet ini karena di dalam paparannya BUN itu salah satunya sawit dan karet yang menjadi komoditi utama.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Betul itu, saya pun setuju soal karet dan sawit, tapi kita berbicara skala nasional Ibu.

KETUA RAPAT:

Bagaimana kalau ekonomi petani titik, itu umumkan. Tidak hanya perkebunan, memulihkan ekonomi petani.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, tadi Mbak Alien mau menyampaikan apa sampaikan saja dulu, kalau memang bisa diakomodir ya akomodir kalau tidak ya tidak usah. Mbak Alien mau ngomong apa dimasukkan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Jadi Pimpinan, ijin saya, saya pun sangat setuju dengan sawit dan karet. Kita pun sangat-sangat memperhatikan memang, tapi kita juga melihat di beberapa daerah lain pun ada komoditas lain yang kita juga harus perjuangkan, misalkan kita daerah yang timur itu kita melihat itu ada kelapa, dan kita melihat ada cengkeh. Tadi kenapa saya di point 7 sebelumnya saya mau tekankan, kalau memang kita mau melihat komoditi daerah berarti kita harus melihat ada ini, tapi sudah dimasukkan berarti itu sudah bisa digolongkan sama semua komoditi lain. Makanya itu saya mohon maaf, saya harus sampaikan juga bahwa ada perkebunan karet, sawit juga menjadi atensi kita. Tapi juga kita lihat perkebunan kelapa, cengkeh dan juga pala, tembakau juga, kopi juga semua bisa.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Penjelasannya begini, harus dipahami tolong bantu juga Bapak Dirjen BUN benar atau tidak. Yang dipengaruhi oleh harga dunia, minyak dunia loh, itu apa saja komoditinya yang paling besar yang harus kita perjuangkan hari ini. Kan kita kemarin bicara skala prioritas itu harus ada rangenya, sekarang prioritasnya apa, ini kembali ke Dirjen BUN kecuali kalau memang ternyata prioritasnya kakao kita tidak masalah kita ganti ini kakao, kan begitu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan BUN dulu yang menanggapi.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Baik, saya kira kalau idealnya

KETUA RAPAT:

Semua tanggapi tadikan ada usulan untuk tembakau juga karena tembakau inikan kebutuhan Pak, ngerokok inikan tidak mungkin berhenti orang. Karena juga terancam dari Cina sudah mulai masuk Indonesia.

Silakan.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Kalau yang nomor 9 ini kalau yang mau diangkat adalah konsen terhadap fluktuasi harga atau situasi harga saat ini, memang perlu direview beberapa komoditi. Nah, menurut pendapat kami saya tidak keberatan itu cq. Direktorat Jenderal Perkebunan, pertanyaannya adalah apakah ini berkait dengan situasi harga itu hanya perkebunan itu perlu ditinjau. Tapi saya tahu konsennya Mbak Kiki karena fokus kepada yang saat ini *jebeluk* mohon maaf ini harganya itu, maka karet dimunculkan, itu kira-kira yang saya tangkap itu. Sekarang mari kita putuskan apakah kalau memang yang saya sarikan itu adalah situasi harga yang menjadi konsen menurut pendapat saya tidak hanya harus perkebunan, itu saja.

Terima kasih Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ketua, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Sudin.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saran saya ngapain ini didebatkan, bikin saja satu kesimpulan tambahan apa yang diminta sama Mbak Alien tebu, kelapa, masukan saja satu kesimpulan susah amat. Tembakau itu bukan nilai dijual ekspor, tembakau itu lokal dan tanpa perlindungan oleh Pemerintah nampaknya. Sebagian besar tembakau kita hasilnya bagus cuman kalah harga sama impor. Betul Bapak Dirjen? Itulah kendalanya makanya regulasinya yang harus diatur. Termasuk cengkeh yang tempat Mbak Alien, dari Madagaskar, dari Afrika jauh lebih murah dibandingkan produksi dalam negeri. Masukin saja kesimpulan satu tambahin, kan tidak bayar ini kesimpulannya. Yang penting untuk kepentingan rakyat silakan, Mbak Alien bantu redaksinya, silakan.

KETUA RAPAT:

Di akhir saja nanti ya, di 14.

Kita sepakat ya 9 ini dulu, cukup karet kan.

(RAPAT: SETUJU)

10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan usahanya, seperti tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal sebesar 20 persen.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Harus ditambahkan petani plasma, sesuai Undang-Undang Bapak Kasdi, masukan Undang-Undanganya.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tidak mungkin 2018, sudah lama itu.

DIRJEN PERKEBUNAN:

2014 Pak, mohon maaf.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Kalau plasma 2014 tidak loh nampaknya, jauh lebih mundur lagi kalau tidak salah.

KETUA RAPAT:

2014 Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Masukkan Undang-Undanganya, supaya jelas.

KETUA RAPAT:

10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan usahanya, seperti tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal sebesar 20 persen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk bertindak tegas terhadap pabrik gula yang tidak memenuhi kewajiban dengan memiliki sumber bahan baku minimal 20 persen dari kapasitas pabrik. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk 4 menyerahkan laporan serta daftar nama perusahaan tersebut, selambat-lambatnya pada hari Senin, 6 Juli 2020.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, kalau bisa suruh Bapak Kasdi masukan Undang-Undanganya, Undang-Undang nomor berapa, jadi ada penguatan. Kalau inikan masih bias ini, 20% dari kapasitas pabrik sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan nomor sekian.

KETUA RAPAT:

Nomor berapa Pak Kasdi?

DIRJEN PERKEBUNAN:

Sama Pak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

KETUA RAPAT:

11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk bertindak tegas terhadap pabrik gula yang tidak memenuhi kewajiban dengan memiliki sumber bahan baku minimal 20 persen dari kapasitas pabrik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk 4 menyerahkan laporan serta daftar nama perusahaan tersebut, selambat-lambatnya pada hari Senin, 6 Juli 2020.

Senin mampu tidak, kalau tidak mampu kita undur, hari Minggu kan hari libur, hari keluarga, hanya malaikat yang kerja.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Ijin Pak, kalau diijinkan tambah 2 hari Rabu Pak.

KETUA RAPAT:

Sabtu dan Minggu manfaatkan untuk keluarga lah. 8 Juli sepakat?

11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk bertindak tegas terhadap pabrik gula yang tidak memenuhi kewajiban dengan memiliki sumber bahan baku minimal 20 persen dari kapasitas pabrik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk 4 menyerahkan laporan serta daftar nama perusahaan tersebut, selambat-lambatnya pada hari Rabu, 8 Juli 2020.

(RAPAT: SETUJU)

12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi kebijakan impor daging khususnya impor daging kerbau dari India. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberdayakan sapi dan kerbau lokal sehingga ketergantungan daging sapi dan kerbau dari impor semakin berkurang.

Kesimpulannya mengurangi impor bagaimana kita belajar ekspor, kan gitu kan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua, itu tidak nyambung itu. Evaluasi kebijakan impor daging kerbau kok ujungnya kita bicara sapi. Ya buat UPT kerbau di Sumbawa misalnya baru nyambung.

KETUA RAPAT:

Sapi kan kerbau, masa Indonesia di Sumbawa saja Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Maksud saya begini, kebijakan impor daging kerbau tapi ujungnya sapi lokal, kerbau ya kerbau, sapi ya sapi.

KETUA RAPAT:

Inikan pemenuhan daging Bapak, daging seluruh rakyat Indonesia, karena dagingnya kerbau agar supaya tidak masuk kerbau inikan bagaimana petani-petani local karena lokal itu ada sapi dan mayoritas sapi, kalau kerbau ini mungkin hanya Sumbawa. Biar Sabang sampai Merauke, sapi dan kerbau kan begitu.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, boleh tidak usul.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi kita itu dalam membuat rumusan ini harus jelas, nomor 11 lagi.

KETUA RAPAT:

Yang mana lagi Bapak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Itu harusnya hari Selasa, 7 Juli 2020 karena pada saat itu kita Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian. Jadi waktu Rapat Kerja bahannya sudah dibawa tanggal 7 Juli.

KETUA RAPAT:

Bapak Dirjen tidak hafal jadwal tadi. Orang Jawa itu Rabu Pak, kalau Selasa sering bohong.

DIRJEN PERKEBUNAN:

Siap Bapak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ganti saja tanggal 7 Juli 2020, pas waktu Rapat Kerja dibawa bahannya.

KETUA RAPAT:

Sebelum pelaksanaan Rapat Kerja diserahkan.

Kita kembali ke 12, kita masukkan ya, cocok kan kerbau dan sapi. Takut diprotes orang Sabang sampai Merauke, tempat saya juga sapi ini. Sepakat nomor 12 ya.

(RAPAT: SETUJU)

13. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian produksi dan analisa keuangan tentang program *food estate*. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan hasil kajian dan analisisnya, sebelum pelaksanaan Rapat Kerja berikutnya.

Silakan Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Analisis ekonomi saja Pak, jangan keuangan.

KETUA RAPAT:

Ekonomi ya.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Sudin.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi kalau analisis keuangan, keuangan sama anggaran apa bedanya?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Spesifik kalau ekonomi sampai pasca jual dan sebagainya.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Kalau ekonomi sekarang kalau kita tidak tahu masalah keuangannya bagaimana, paling tidak kan harus tahu berapa yang dianggarkan, berapa yang diproduksi, berapa uang hasil penjualan itu harus tahu, kalau tidak ya percuma tidak ada gunanya kesimpulan itu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Tujuannya ke anggaran saya setuju keuangan, dikira saya dari kegiatan food estatenya Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi Bapak Momon ini mungkin salah pengertiannya, padahal anggarannya. Kami mau tahu dengan anggaran Rp100 miliar apa yang didapatkan diproduksi, apa yang dihasilkan, berapa nilai jualnya.

Terima kasih Pimpinan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Saya minta dikembalikan ke keuangan kalau yang dimaksud Bapak Ketua seperti itu.

Terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan mempersoalkan ekonomi ya, keuangan dimasukkan dulu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ekonomi dan keuangan menurut saya.

KETUA RAPAT:

Makanya silakan jelaskan ekonomi, jangan melampaui Tupoksinya Kementan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ekonomi inikan harus ada outputnya apa, keuangannya ini rancangannya, rancangan *food estate*-nya Kementan seperti apa, kira-kira tersinkronisasi tidak anggaran ini dengan output ekonominya, kan begitu Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Ya setuju.

KETUA RAPAT:

Setuju, ya sudah karena pelaksananya setuju, sepakat ya?

(RAPAT: SETUJU)

Yang terakhir tadi mengakomodir dari semuanya selain karet. Coba dibuatkan redaksi.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Jadi gini Pimpinan, karet itu memang ditentukan harganya dari luar negeri, kopra, kelapa pun sama Pak. Jadi maksud saya tambahkan saja itu karena satu satuan itu barang. Jadi satu karena memang bukan di Indonesia penentu harganya. Jadi maksud saya tidak perlu kita bikin lagi tambahan point.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ketua, mungkin ini beda kasus kalau karet itu komoditi dunia, kalau yang dimaksudkan Mbak Alien itu misalnya kopra itu bukan komoditi. Jadi antara komoditi sama non komoditi harus dipisahkan. Masukkan saja buat kesimpulan baru satu.

KETUA RAPAT:

Ibu Alien, inikan biar orang Maluku ini puas.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Suhardi.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya mohon ijin, saya ke dokter gigi dulu.

KETUA RAPAT:

Selamat jalan, salam ke Ibu Dokter Gigi Pak.

Langsung 14, komoditi langsung karena jam 17.05 WIB mau Magrib ini sudah. Termasuk BUN ya, komoditas perkebunan antara lain kopra, pala, cengkeh. Tebu komoditi local itu tidak masuk.

Sudah kan cukup?

14. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan agar memperhatikan situasi harga komoditas perkebunan, antara lain kopra, pala, dan cengkeh serta memberikan bantuan yang bisa memulihkan ekonomi pekebun.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Coba Pak Dirjen, pendapat anda harus buat alenia baru atau gabung, ini beda kasus. Kopra itu bukan komoditi, buah pala juga bukan komoditi, cengkeh juga bukan komoditi, kalau kopi dan karet itu komoditi, ada lelangnya, ada pasar dunia tempat lelangnya itu, kalau yang lain tidak ada. Ada tidak pernah dengar kopra itu dilelang di dunia di pasar lelang? Tidak ada, pala juga tidak ada, itulah kenapa tadi itu tidak dibuat satu pasal lagi dengan hal yang sama tapi sebutnya yang dibawah tadi komoditas perkebunan, kopra, pala, kopi dan cengkeh. Yang itu biar saja sudah, jadi ditambahkan saja pasal baru. Kopinya di atas karena komoditi.

KETUA RAPAT:

Masuk 9 berarti, kopi dan karet.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Iya bener, karena karet itu yang utama, kopi yang kedua.

KETUA RAPAT:

Sudah kan, termasuk kopi dan karet.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Hanya supaya nyambung yang belakang jadi nomor 10 mohon ijin Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Nomor 14 ke 10.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Baik Bapak Ketua, sudah setuju.

KETUA RAPAT:

Sepakat yang nomor 10.

(RAPAT: SETUJU)

Kesimpulan telah kita sepakati Bersama-sama, untuk itu kami persilakan Bapak Sudin untuk menutup kembali karena tugas saya selesai. Mohon maaf lahir dan bathin dari awal hingga akhir atas segala kekurangan.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamithariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sebelum kita menutup rapat ini silakan kata penutup dari Eselon I yang diwakili oleh Bapak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Pertama-tama, kami atas nama Kementerian Pertanian mengucapkan banyak terima kasih atas masukan, usulan, saran yang sangat luar biasa. Jujur hari ini Rapat Dengar Pendapat yang paling berbahagia Pak Ketua, karena usulannya sangat konstruktif terutama dalam menyempurnakan program kegiatan dan anggaran tahun 2021 dan juga percepatan penyerapan anggaran tahun 2020.

Hanya memang pada kesempatan ini juga saya mengingatkan teman-teman ya tadi Pimpinan menyampaikan tanggal 15 mau Reses, artinya aspirasi masyarakat yang pada daerah Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI ada yang bisa didistribusi bantuan Pemerintah. Saya minta dari perkebunan dan peternakan, Badan Ketahanan Pangan khusus dari Litbang hari ini sudah disiapkan 100 paket Pak, dari Badan Litbang untuk kesehatan.

Terakhir, kami mohon maaf Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Anggota, apabila dalam Rapat Dengar Pendapat dua hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan tetapi sebetulnya sebagai mitra kami siap usulan dari Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan diimplementasikan dan tetap diawasi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Para Eselon I dan Bapak Sekjen, perbedaan itu biasa yang penting tujuan kita sama untuk kemajuan bangsa dan rakyat. Apabila kita melakukannya dengan *Nawaitu*, niat yang baik pasti apa pun bisa kita selesaikan.

Terima kasih, dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, kami mohon maaf apabila selama kami memimpin ada kekurangan, kekhilafan, dengan mengucapkan *alhamdulillah* Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.05 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001